



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP

Tahun 2013



Kata Pengantar



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang terhingga, sehingga penyusunan LAKIP Tahun 2013 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2013.

Tahun 2013 merupakan masa transisional, dimana Presiden Republik Indonesia melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode Tahun 2012-2017 pada Tanggal 10 Oktober 2012, maka sesuai ketentuan mempunyai kewajiban menyusun RPJMD Tahun 2012-2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

Tahun 2013 merupakan LAKIP Tahun pertama dalam masa RPJMD Tahun 2012-2017. LAKIP Tahun 2013 disusun berdasarkan RKPd Tahun 2013 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013, sedangkan target kinerjanya diukur berdasarkan RPJMD Tahun 2012-2017.

LAKIP Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemda DIY Tahun 2013.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2013 telah banyak membuahkan hasil pembangunan, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Berkenaan dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima Kasih

Yogyakarta,

Maret 2014

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LAKIP Pemda DIY tahun 2013 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemda DIY.

LAKIP ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Gubernur yang telah dicanangkan pada tahun 2013 telah berhasil dicapai. Analisa ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tahun 2013 adalah berada pada periode transisi RPJMD dari RPJMD 2009-2013 ke RPJMD 2012-2017.

Dari 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur tahun 2013, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa **16 IKU** telah memenuhi **kriteria tinggi (2 IKU)** maupun bahkan, lebih banyak yang masuk **kriteria sangat baik (14 IKU)**. Satu IKU yaitu “Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya” belum menentukan target kinerjanya, karena adanya proses transisi dari RPJMD 2009-2013 ke RPJMD 2012-2017. Transisi ini membutuhkan penyesuaian indikator kinerja yang baru akan dihitung mulai tahun 2014, khususnya untuk jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembinaan model pendidikan berbasis budaya dan model unggulan mutu pendidikan.

Untuk 2 IKU yang masuk kriteria baik, adalah IKU “Lama Tinggal Wisatawan Nusantara” yang realisasinya mencapai 79.50% dari target, dan IKU “Lama tinggal wisatawan mancanegara” yang mencapai 88,37% dari target. Tantangan utama yang dihadapi menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih serius untuk memasarkan dan mengembangkan berbagai destinasi wisata di DIY, selain mendorong lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) seperti ketersediaan transportasi, perhotelan dan penguatan serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan budaya dan pariwisata.

Sementara 14 IKU yang lain, pencapaiannya masuk kategori sangat baik yaitu indikator yang pencapaiannya $\geq 91\%$. Sebanyak 8 IKU diantaranya memiliki kinerja sangat baik (91-100) yaitu:

1. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
2. Rata-rata lama sekolah
3. Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta)
4. Indeks Ketimpangan Antar Wilayah
5. Indeks Ketimpangan Pendapatan
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
7. Opini pemeriksaan BPK
8. Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan

6 IKU mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2013. Indikator-indikator ini mencakup:

1. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya
2. Angka Melek huruf
3. Angka Harapan Hidup
4. Jumlah wisatawan nusantara
5. Jumlah wisatawan mancanegara
6. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemda DIY ke depan. *Pertama*, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan penurunan ketimpangan (baik antar wilayah maupun pendapatan), kualitas lingkungan dan penegakan tata ruang, hingga meningkatkan lama tinggal wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Peran Pemda DIY diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi warga miskin dan kelompok-kelompok marjinal lainnya yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemda DIY dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY, daerah yang berbatasan dengan DIY maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti peningkatan pendapatan, pengurangan ketimpangan dan peningkatan jumlah dan lama tinggal wisatawan menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi

dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemda DIY sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Di luar IKU, pencapaian kinerja pemerintah daerah juga ditunjukkan oleh pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta Indeks Pembangunan Gender (IPG). Trend dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pencapaian IPM dan IPG di DIY menunjukkan kecenderungan yang positif karena nilainya selalu meningkat, walaupun masih menyisakan persoalan kesenjangan gender dalam hal pencapaian angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan sumbangan pendapatan. Untuk pencapaian target MDGs, dari 41 indikator, sebanyak 34 indikator telah dan akan tercapai pada tahun 2015. Diantara 34 indikator ini, sebagian indikator bahkan sudah tercapai saat ini sebelum tahun 2015 yang menjadi tahun pencapaian tujuan MDGs. Beberapa indikator di bidang pendidikan telah menunjukkan pencapaian yang baik, seperti pencapaian angka melek huruf usia 15-25 tahun, ataupun rasio angka partisipasi murni baik perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan SD dan SLTP. Namun demikian, beberapa indikator diperkirakan tidak akan bisa tercapai pada tahun 2015, seperti penurunan angka kemiskinan, kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS, serta indikator untuk penurunan emisi karbon dan kawasan lindung perairan. Beberapa indikator ini perlu menjadi perhatian dari program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemda DIY untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Sejarah Pemerintah Daerah DIY	2
1.4 Kondisi Geografis Daerah	4
1.4.1 Batas Administrasi	4
1.4.2 Luas Wilayah	5
1.4.3 Topografi	6
1.5 Gambaran Umum Demografi	7
1.5.1 Jumlah Penduduk	7
1.5.2 Indeks Pembangunan Manusia	8
1.5.3 Penduduk Miskin	9
1.6 Kondisi Ekonomi Daerah	9
1.7 Struktur Pemda DIY	12
1.8 Keragaan SDM Pemda DIY	13
1.9 Sistematika Penyajian LAKIP	15
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Reformasi Birokrasi dan Manajemen Perubahan di Pemda DIY	16
2.2 Inovasi dalam Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Kinerja Pemda DIY	18
2.3 Rencana Strategis Pemda DIY	21

2.3.1	Visi dan Misi	21
2.3.2	Tujuan	22
2.3.3	Sasaran	23
2.3.4	Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2012 - 2017	25
2.3.5	Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	29
2.4	Rencana Kinerja 2013	32
2.4.1	Program untuk Pencapaian Sasaran	33
2.5	Penetapan Kinerja (PK) tahun 2013	34
2.5.1	Strategi untuk Pencapaian Kinerja Lainnya	35
2.5.2	Rencana Anggaran Tahun 2013	36
BAB 3	AKUNTABILITAS KINERJA PEMDA DIY 2013	39
3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama 2013	40
3.2	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	47
3.3	Pencapaian Kinerja Lainnya	117
3.3.1	Pencapaian Target MDGs	117
3.3.2	Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Jender	125
3.4	Akuntabilitas Anggaran	133
BAB 4	PENUTUP	136
LAMPIRAN	138

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010.....	7
Tabel 1.2	IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di DIY, 2012	9
Tabel 1.3	Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2011-2013 (Milliar Rupiah)	10
Tabel 1.4	Komposisi PNS Pemda DIY Menurut Jenjang Pendidikan	13
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	23
Tabel 2.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan DIY Tahun 2013	31
Tabel 2.3	Prioritas dan Sasaran Strategis Pembangunan DIY Tahun 2013	32
Tabel 2.4	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2013	33
Tabel 2.5	Penetapan Kinerja Pemda DIY Tahun 2013	34
Tabel 2.6	Realisasi Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	37
Tabel 2.7	Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2013	37
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	40
Tabel 3.2	Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2013	40
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Gubernur Tahun 2013 Per Triwulan.....	42
Tabel 3.4	Kinerja dan Deviasi Pencapaian IKU Tahun 2013	44
Tabel 3.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan.....	47
Tabel 3.6	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, 2009-2013	48
Tabel 3.7	Jumlah Organisasi Kesenian di DIY Tahun 2009-2013.....	48

Tabel 3.8	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Melek Huruf Masyarakat Meningkatkan.....	51
Tabel 3.9	Perkembangan Angka Melek Huruf DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2012	52
Tabel 3.10	Rencana dan Realisasi Capaian Aksesibilitas Pendidikan Meningkatkan.....	55
Tabel 3.11	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2012	56
Tabel 3.12	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode 2009/2010 s/d Periode 2012/2013	57
Tabel 3.13	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode 2009/2010 s/d Periode 2012/2013	59
Tabel 3.14	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di DIY Tahun 2009-2013.....	62
Tabel 3.15	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di DIY Tahun 2009-2013	63
Tabel 3.16	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan.....	64
Tabel 3.17	Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2009-2013	67
Tabel 3.18	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk Tahun 2009-2012	68
Tabel 3.19	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY Tahun 2012-2013.....	69
Tabel 3.20	Cakupan Jaminan Kesehatan	70
Tabel 3.21	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pendapatan Masyarakat Meningkatkan.....	73
Tabel 3.22	Nilai PDRB per Kapita DIY, 2009-2013 (Rupiah)	73
Tabel 3.23	Data Penduduk Miskin dari Tahun ke Tahun	73
Tabel 3.24	Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja di DIY Tahun 2008-2013	76
Tabel 3.25	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	79
Tabel 3.26	Persentase Lokasi Kumuh Yang Telah Ditangani	82
Tabel 3.27	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	85
Tabel 3.28	Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY, 2009-2011	86
Tabel 3.29	Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkatkan.....	89
Tabel 3.30	Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Meningkatkan	91
Tabel 3.31	Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan di DIY, 2009-2013	93
Tabel 3.32	Kawasan Cagar Budaya	97

Tabel 3.33	Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, 2009-2013	97
Tabel 3.34	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan.....	99
Tabel 3.35	Hasil Penilaian Akuntabilitas Pemda DIY Tahun 2012, Kemenpan-RB	100
Tabel 3.36	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	105
Tabel 3.37	Opini BPK Atas Laporan keuangan Pemda DIY, Tahun 2009- 2012	105
Tabel 3.38	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Layanan Publik Meningkat Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi dan Akses Masyarakat di Pedesaan	108
Tabel 3.39	Load Factor Angkutan Umum Perkotaan dan AKDP di DIY	109
Tabel 3.40	Panjang Jalan Berdasarkan Kelas dan Kondisi dalam Km	109
Tabel 3.41	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan	111
Tabel 3.42	Hasil Pemantauan Kualitas Udara.....	112
Tabel 3.43	Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai	112
Tabel 3.44	Kesesuaian Lahan dengan RTRW DIY Tahun 2012	115
Tabel 3.45	Kesesuaian Lahan dengan RTRW DIY Tahun 2013	116
Tabel 3.46	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pemanfaatan Ruang Terkendali	116
Tabel 3.47	Target dan Realisasi Pencapaian MDGs di DIY Tahun 2013	117
Tabel 3.48	IPM DIY Menurut Komponen, Tahun 2009-2012.....	125
Tabel 3.49	IPM Antar Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2008-2011	126
Tabel 3.50	Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Riil Per Kapita, IPM, dan Peringkat IPM di DIY Tahun 2012	127
Tabel 3.51	Capaian IPG Menurut Kabupaten/Kota DIY, Tahun 2008-2011	128
Tabel 3.52	Frekuensi Kejadian Bencana di DIY Tahun 2012-2013	132
Tabel 3.53	Jumlah Desa Tangguh dan Sekolah Siaga Bencana.....	133
Tabel 3.54	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2013	134

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Monumen Perjanjian Giyanti	3
Gambar 1.2	Peta Administrasi DIY	5
Gambar 1.3	Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota	6
Gambar 1.4	Luas Wilayah DIY Menurut Jenis Tanah.....	6
Gambar 1.5	Persebaran Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2012	8
Gambar 1.6	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, 2005-2012	8
Gambar 1.7	Pertanian Lahan Pasir Sebagai Pendukung Perekonomian DIY	10
Gambar 1.8	Industri Kreatif Sebagai Pendukung Perekonomian di DIY	11
Gambar 1.9	Aktivitas Perdagangan Sebagai Pendukung Perekonomian di DIY	11
Gambar 1.10	Struktur Organisasi Pemda DIY	12
Gambar 1.11	Komposisi SDM Pemda Berdasarkan Gender	13
Gambar 1.12	Presentase PNS Pemda DIY Menurut Jenjang Pendidikan.....	14
Gambar 1.13	Perimbangan per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin	14
Gambar 1.14	Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Pemda DIY, 2013	14
Gambar 2.1	Manajemen Perubahan Untuk Reformasi Birokrasi di Pemda DIY	17
Gambar 2.2	Sistem Aplikasi Jogjaplan.....	19
Gambar 2.3	Tema Pembangunan DIY Tahun 2013.....	30
Gambar 2.4	Strategi Peningkatan Kualitas IPM dan MDGs	36
Gambar 3.1	Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2013	41
Gambar 3.2	Pertunjukan Karya Tari Yogyakarta	48
Gambar 3.3	Belajar Membaca Sadar Melek Huruf	50
Gambar 3.4	Diskusi Pada Proses Belajar Mengajar	50

Gambar 3.5	Persentase Angka Melek Huruf DIY, 2009-2013	51
Gambar 3.6	Trend Angka Melek Huruf di DIY, 2009-2012	52
Gambar 3.7	Perpustakaan Kota Yogyakarta.....	53
Gambar 3.8	Jumlah Perpustakaan di DIY per Kabupaten/Kota	53
Gambar 3.9	Situasi Belajar Mengajar.....	54
Gambar 3.10	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) DIY 2008-2013	55
Gambar 3.11	Angka Putus Sekolah di DIY Per Jenjang Pendidikan.....	61
Gambar 3.12	Fenomena Anak Putus Sekolah	61
Gambar 3.13	Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2008-2012	65
Gambar 3.14	Angka Harapan Hidup di DIY Termasuk Tinggi.....	65
Gambar 3.15	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY, 1971-2010	66
Gambar 3.16	Trend Prevalensi Balita Gizi Kurang di DIY	66
Gambar 3.17	Balita Sehat	67
Gambar 3.18	Puskesmas di DIY	68
Gambar 3.19	Rumah Sakit Sebagai Sarana Kesehatan di Yogyakarta	69
Gambar 3.20	Kemiskinan di DIY	74
Gambar 3.21	Trend Persentase Penduduk Miskin di DIY, 2005-2013.....	75
Gambar 3.22	Sebaran Penduduk Miskin, Desa, dan Kota	75
Gambar 3.23	Sinergi Arah Pembangunan Kewilayahan dan Pengentasan Kemiskinan	77
Gambar 3.24	Indeks Williamson DIY, 2008-2012	80
Gambar 3.25	Kekeringan di Kabupaten Gunungkidul.....	81
Gambar 3.26	Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kulonprogo	81
Gambar 3.27	Persentase Rumah Tangga dengan Sarana Sanitasi Layak	83
Gambar 3.28	Peta Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan.....	84
Gambar 3.29	Indeks Gini DIY, 2007-2016	86
Gambar 3.30	Paket Wisata Pedesaan di DIY.....	88
Gambar 3.31	Trend Jumlah Wisatawan.....	89
Gambar 3.32	Wisata di Pesisir Pantai Selatan DIY	92
Gambar 3.33	Keramahan Yogyakarta	92
Gambar 3.34	Lama Kunjungan Wisatawan	93
Gambar 3.35	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	94
Gambar 3.36	Hotel di Yogyakarta.....	94
Gambar 3.37	Jumlah Hotel Berbintang dan Non Berbintang di DIY, 2009-2013	95
Gambar 3.38	Cagar Budaya Istana Ratu Boko	95
Gambar 3.39	Cagar Budaya Watugudig di Kotagede.....	96
Gambar 3.40	Museum Ullen Sentalu.....	96
Gambar 3.41	Kerangka <i>Digital Government Services (DGS)</i>	101

Gambar 3.42	LPSE DIY	102
Gambar 3.43	Web Monev APBD DIY (monevapbd.jogjaprovo.go.id)	103
Gambar 3.44	Kondisi Transportasi di Ruas Jalan Malioboro	107
Gambar 3.45	Load Factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan DIY	108
Gambar 3.46	Status Jalan di DIY Menurut Kualitas	110
Gambar 3.47	Pemukiman Padat di Sekitar Sungai Code	113
Gambar 3.48	Peta Indeks Pembangunan Manusia DIY Tahun 2013	126
Gambar 3.49	Grafik IPM DIY Tahun 2005-2012	127
Gambar 3.50	Pemukiman Padat di Sekitar Sungai Code	128
Gambar 3.51	Angka Harapan Hidup Per Jenis Kelamin dan Wilayah	129
Gambar 3.52	Angka Melek Huruf Per Jenis Kelamin dan Wilayah	129
Gambar 3.53	Rata-rata Lama Sekolah per Wilayah dan Jenis Kelamin	130
Gambar 3.54	Sumbangan Pendapatan Per Jenis Kelamin dan Wilayah	131

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Latar Belakang*
2. *Maksud dan Tujuan*
3. *Sejarah Pemerintahan Daerah DIY*
4. *Kondisi Geografis Daerah*
5. *Gambaran Umum Demografi*
6. *Kondisi Ekonomi Daerah*
7. *Struktur Pemda DIY*
8. *Keragaman SDM Pemda DIY*
9. *Sistematika Penyajian LAKIP*

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemda DIY.

Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang

dalam hal ini adalah Pemda DIY. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, LAKIP tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan

LAKIP Pemda DIY merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LAKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemda DIY. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Sejarah Pemerintah Daerah DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.



Gambar 1.1 Monumen Perjanjian Giyanti

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah *Kooti*, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern.

Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin kebhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

1.4 Kondisi Geografis Daerah

1.4.1 Batas Administrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah, di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut



Sumber : Bappeda DIY, 2013

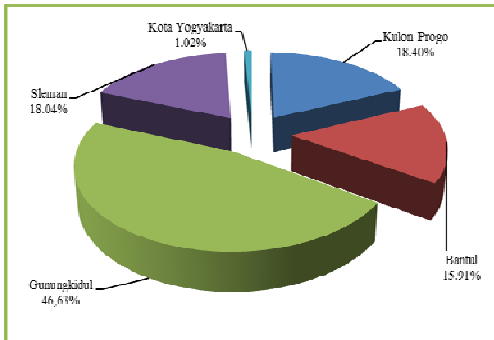
Gambar 1.2 Peta Administrasi DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian:

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa;
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa;
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/desa;
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa;
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa.

1.4.2 Luas Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7°.33'-8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00'- 110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²). DIY merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri atas:



Sumber : DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY

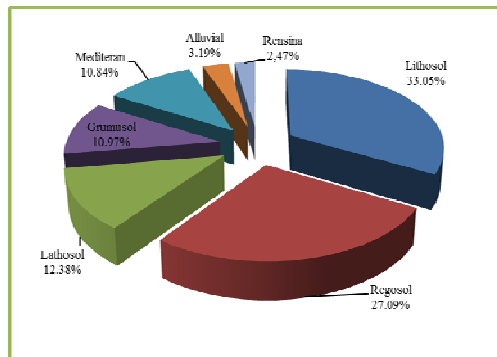
1. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02%);
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91%);
3. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km² (18,40%);
4. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63%);
5. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04%).

Gambar 1.3 Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota

1.4.3 Topografi

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100-499 m dari permukaan laut, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500-999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m. Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas:

1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas \pm 1.656,25 km², ketinggian 150-700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas \pm 582,81 km², ketinggian 80-2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;



Sumber : DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY

Gambar 1.4 Luas Wilayah DIY Menurut Jenis Tanah

3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62 \text{ km}^2$, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas $\pm 706,25 \text{ km}^2$, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

Dilihat dari jenis tanah, dari 3.185,80 km^2 luas Daerah Istimewa Yogyakarta, 33,05% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09% merupakan tanah Regosol, 12,38% tanah Lathosol, 10,97% tanah Grumusol, 10,84% tanah Mediteran, 3,19% Alluvial dan 2,47% adalah tanah jenis Rensina.

1.5 Gambaran Umum Demografi

1.5.1 Jumlah Penduduk

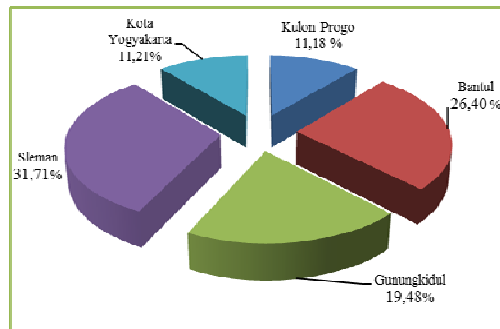
Jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 3.457.491 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa. *Sex ratio* penduduk DIY sebesar 97,73.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Kota Yogyakarta	189.137	199.490	388.627	94,81
Bantul	454.491	457.012	911.503	99,45
Kulon Progo	190.694	198.175	388.869	96,23
Gunungkidul	326.703	348.679	675.382	93,70
Sleman	547.885	545.225	1.093.110	100,49
DIY	1.708.910	1.748.581	3.457.491	97,73

Sumber: DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY

Estimasi jumlah penduduk DIY pada tahun 2012 menurut BPS sebanyak 3.514.762 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.737.506 jiwa dan perempuan sebanyak 1.777.256 jiwa. Dari tabel di atas, persebaran penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 2012 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.114.833 jiwa atau sebesar 31,71%. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu Kabupaten Bantul sebanyak 927.956 jiwa atau sebesar 26,40 %, disusul oleh Kabupaten Gunungkidul pada urutan ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 684.740 jiwa atau sebesar 19,48%. Selanjutnya, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 394.012 jiwa dan 393.221 jiwa atau sebesar 11,21% dan 11,18 %.

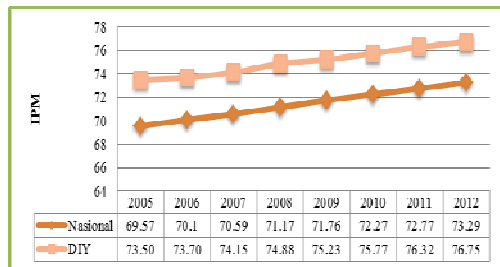


Sumber : DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY

Gambar 1.5 Persebaran Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2012

1.5.2 Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). Trend dari tahun 2005 sampai dengan 2011 menunjukkan bahwa IPM baik di tingkat nasional maupun DIY cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 IPM DIY sebesar 75,23 sedangkan nasional sebesar 71,76. Untuk DIY baik pada tahun 2009 maupun 2010 menduduki posisi keempat nasional. Pada tahun 2010, IPM DIY sebesar 75,77, sedangkan IPM nasional 72,27. IPM DIY tahun 2011 sebesar 76,32, juga lebih tinggi dibandingkan capaian nasional pada tahun yang sama yang besarnya 72,77. Pada Tahun 2012 IPM DIY sebesar 76,75 dan Nasional sebesar 73,29.



Sumber : Statistik Indonesia, BPS Diolah

Gambar 1.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, 2005-2012

IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY tahun 2012 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat ke-1 dengan angka 80,24. Kabupaten dengan angka IPM yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Sleman dengan angka 79,31. Sementara itu,

tiga kabupaten lain dengan angka IPM yang relatif masih rendah adalah Kabupaten Bantul (75,58), Kulon Progo (75,33) dan Kabupaten Gunungkidul (71,11).

Tabel 1.2 IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di DIY, 2012

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan (000 Rp)	IPM	Peringkat IPM
Kulon Progo	74,58	92,04	8,37	634,34	75,33	4
Bantul	71,34	92,19	8,95	654,96	75,58	3
Gunungkidul	71,04	84,97	7,70	631,91	71,11	5
Sleman	75,29	94,53	10,52	653,11	79,31	2
Yogyakarta	73,51	98,10	11,56	657,65	80,24	1
DIY	73,27	92,02	9,21	653,78	76,75	4

Sumber: DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY

1.5.3 Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2012 menurut data BPS sebanyak 565.350 orang atau sebesar 15,88% dari total penduduk DIY. Jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,80% dari tahun 2011 yang banyaknya ada 16,08%. Jumlah penduduk miskin tahun 2012 di wilayah kota/urban sebanyak 305.340 orang atau 13,13%, sedangkan penduduk miskin di wilayah desa/rural sebanyak 259.550 ribu orang atau sebesar 21,76%. Data terbaru per Maret 2013 bahkan menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 15,43%.

1.6 Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai PDRB di DIY tahun 2013 mencapai Rp 63,690 triliun atas harga berlaku atau sebesar Rp24,36 triliun atas harga konstan. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp6,87 triliun (atas harga berlaku) atau sebesar Rp. 1,051 triliun (atas harga konstan). Empat sektor dengan kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB DIY tahun 2013 adalah sektor perdagangan, jasa, pertanian dan sektor industri pengolahan.

Tabel 1.3 Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2011-2013 (Milliar Rupiah)

Lapangan Usaha	ADH Berlaku	ADH Konstan
	2013	2013
Pertanian	8,861,281	3.730.297
Pertambangan dan Penggalian	416,531	167.669
Industri Pengolahan	8,771,188	3.142.836
Listrik, Gas dan Air Bersih	796,704	229.640
Bangunan	6,908,381	2.459.172
Perdagangan, Hotel-Restoran	13,152,524	5.225.055
Pengangkutan dan Komunikasi	5,400,530	2.744.146
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,543,153	2.552.445
Jasa-jasa	12,840,026	4.316.214
PDRB DIY	63,690,318	24,360,798

Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013



Sumber : DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY

Gambar 1.7 Pertanian Lahan Pasir Sebagai Pendukung Perekonomian DIY

Kontribusi sektor pembentuk PDRB tahun 2013 di DIY tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Meskipun kontribusi beberapa sektor mengalami perubahan, namun masih didominasi oleh sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, Jasa-jasa, Pertanian dan Industri Pengolahan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor Perdagangan Hotel Restoran menempati urutan tertinggi dengan nilai kontribusi sebesar 20,65%, kemudian diikuti oleh sektor Jasa 20,16%, sektor Pertanian 13,91% sektor Industri Pengolahan 13,77%, sektor bangunan 10,84%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 10,27%, sektor pengangkutan dan komunikasi 8,47%, sektor listrik, gas dan air bersih 1,25% dan kontribusi paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai kontribusi 0,65%.



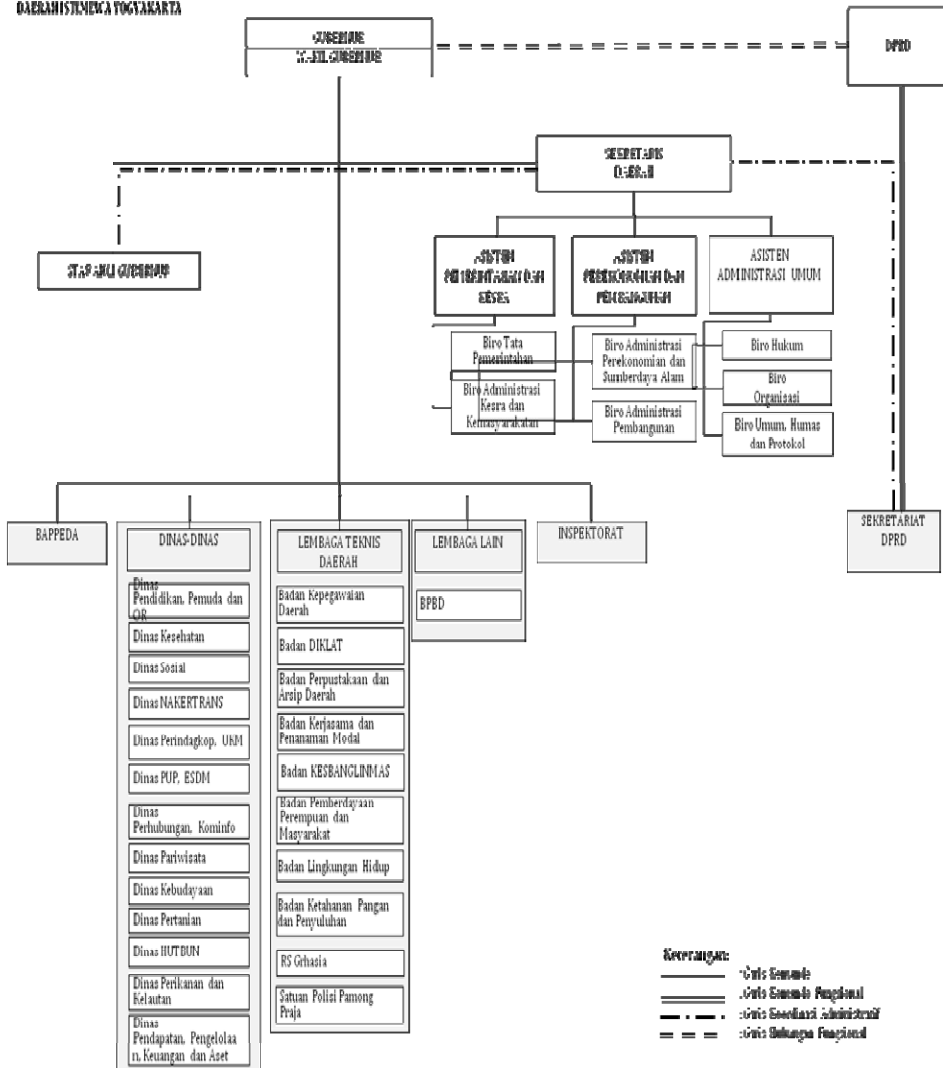
Gambar 1.8 Industri Kreatif Sebagai Pendukung Perekonomian di DIY



Gambar 1.9 Aktivitas Perdagangan Sebagai Pendukung Perekonomian di DIY

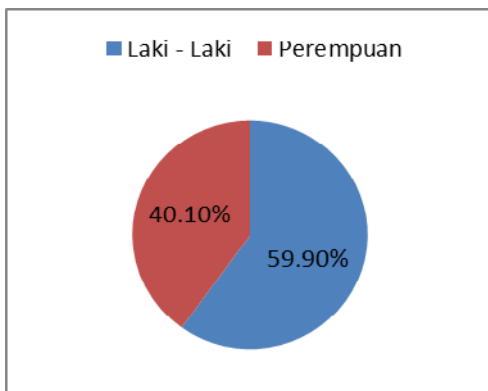
1.7 Struktur Pemda DIY

BAGAS ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Gambar 1.10 Struktur Organisasi Pemda DIY

1.8 Keragaan SDM Pemda DIY



Gambar 1.11 Komposisi SDM Pemda Berdasarkan Gender

orang (39,85%), kemudian SLTA sebanyak 2236 orang (31,75%). Selain itu, PNS dengan pendidikan S2 dan D3 juga cukup banyak, yaitu berturut-turut sebanyak 493 orang dan 474 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Pemda DIY memiliki keragaan sumber daya manusia yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

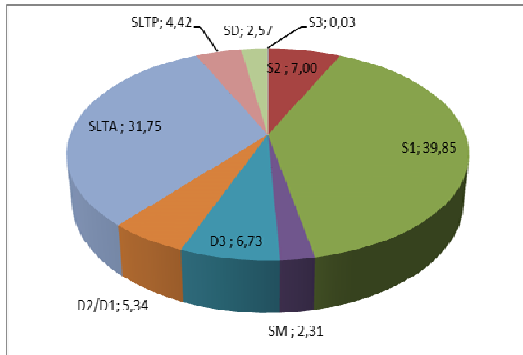
Pemda DIY memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Desember 2013, jumlah PNS di Pemda DIY adalah sebanyak 7042 orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 4218 orang (59,90%) dan perempuan sebanyak 2824 orang (40,10%), yang menunjukkan perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam gambar berikut ini:

Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 2806

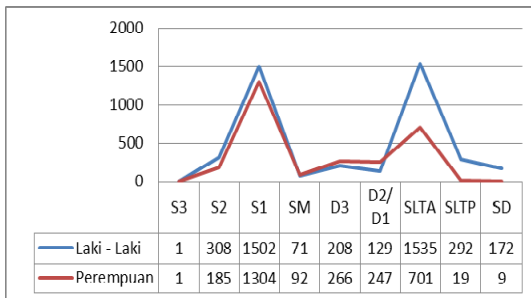
Tabel 1.4 Komposisi PNS Pemda DIY Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S3	2
2.	S2	493
3.	S1	2806
4.	SM	163
5.	D3	474
6.	D2/D1	376
7.	SLTA	2236
8.	SLTP	311
9.	SD	181
Jumlah		7042

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari D3 hingga S3, perimbangan gender nya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (D2/D1, SLTA, SLTP dan SD).

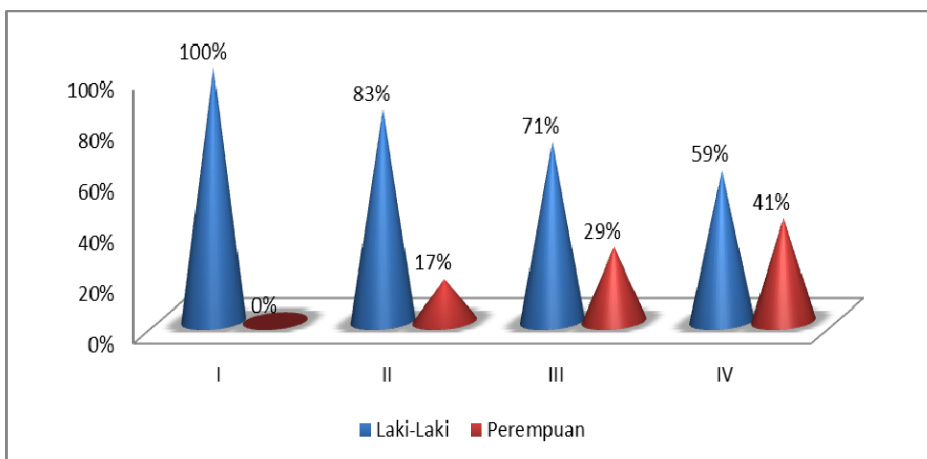


Gambar 1.12 Presentase PNS Pemda DIY Menurut Jenjang Pendidikan



Gambar 1.13 Perimbangan per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.



Gambar 1.14 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Pemda DIY, 2013

Melihat kecenderungan bahwa kapasitas SDM Pemda seringkali terbebani dengan urusan administrasi dan terbatasnya inovasi, Pemda DIY mengembangkan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk penguatan kualitas perencanaan pembangunan. Sejak tahun 2013, Pemda DIY telah menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dalam melaksanakan program Pendampingan Doktor-doktor Muda sebagai Tenaga Ahli bagi semua SKPD di lingkungan Pemda DIY.

1.9 Sistematika Penyajian LAKIP

Sistematika penyajian LAKIP Pemda DIY 2013 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, sejarah pemerintah DIY, kondisi geografis, data demografi dan kondisi ekonomi daerah. Bab I juga berisi struktur organisasi dan deskripsi keragaan SDM Pemda DIY, serta sistematika penyajian

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat Pengelolaan Kinerja Daerah, Rencana Strategis Daerah, Tema-Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2013, dan Penetapan Kinerja tahun 2013. Bab ini juga berisi Daftar Program untuk Pencapaian IKU 2013.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja Pemda DIY

Berisi penjelasan singkat tentang Capaian IKU tahun 2013, juga Evaluasi dan Analisis Capaian IKU 2013 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan Capaian Kinerja Lainnya dan Kinerja Keuangan Daerah.

Bab IV : Penutup

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Perubahan di Pemda DIY
2. Inovasi dalam Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Kinerja Pemda DIY
3. Rencana Strategis Pemda DIY
4. Rencana Kerja 2013
5. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013

2.1 Reformasi Birokrasi dan Manajemen Perubahan di Pemda DIY

Reformasi birokrasi merupakan strategi untuk menjawab menguatnya desakan publik akan perbaikan kinerja instansi pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Sasaran dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sebagai amanat regulasi di atas, Pemda DIY telah menyusun *road map* reformasi birokrasi yang tergambar dalam gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Manajemen Perubahan Untuk Reformasi Birokrasi di Pemda DIY

Pemilihan 5 area perubahan di atas menggambarkan pilihan strategis untuk konteks pemda DIY, yang memiliki makna merupakan area perubahan yang bisa dicapai dan memiliki dampak lanjutan untuk mendorong perubahan pada area yang lebih luas.

Selain itu, Pemda DIY juga telah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang menghasilkan regulasi, kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan di bidang organisasi yang diharapkan dapat semakin mendorong proses reformasi birokrasi secara signifikan. Melalui pelaksanaan program tersebut, area perubahan yang dituju meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan antara lain organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *culture set* aparatur. Hal ini juga menggambarkan upaya mendorong perubahan pola pikir dan budaya kinerja di lingkungan Pemda DIY, seperti mendorong keterlibatan staf melalui pembentukan *agents of change* di lingkungan Pemda DIY.

Manajemen perubahan juga didorong melalui penataan regulasi di tingkat Pemda DIY, antara lain melalui penyelelarasan produk hukum daerah. Hasilnya telah menunjukkan bahwa tidak terdapat inkonsistensi antar berbagai produk perundangan daerah, serta kinerja penyelesaian penyusunan peraturan gubernur sebagai amanat Peraturan Daerah. Data tahun 2013 menunjukkan bahwa 80% Pergub yang merupakan tindak lanjut Perda telah dihasilkan, sedangkan 20% Pergub akan diselesaikan pada tahun 2014. Pemda DIY juga telah mengeluarkan Pergub No 48 tahun 2012 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota. Selain itu, sebagai bagian dalam mendorong partisipasi, transparansi dan akuntabilitas perundangan, pemda DIY mengembangkan tautan <http://www.birohukum.jogjaprovo.go.id/>, dimana informasi terkait peraturan perundangan bisa diakses publik luas.

Aspek lain sebagai bagian dari manajemen perubahan adalah penguatan pengawasan publik melalui keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS). Keberadaan lembaga ini menunjukkan pelembagaan pengawasan masyarakat sebagai bagian integral dalam perbaikan kualitas pelayanan

publik. Keberadaan LOD disahkan melalui Pergub No. 21 Th 2008 ttg LOD, sementara keberadaan LOS disahkan melalui Pergub No 22 Th 2008 ttg LOS

Sebagai bagian dari komitmen untuk peningkatan pelayanan publik, Pemda DIY telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, Pemda DIY juga mengembangkan penilaian pelayanan publik melalui Citra Pelayanan Prima. Penilaian ini menjadi stimulus bagi unit-unit pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan, utamanya adalah hal visi/misi pelayanan, sistem dan prosedur pelayanan, sumber daya manusia dan sarana-prasarana pelayanan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga telah dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pemda DIY mengembangkan program *Digital Government Services* (DGS) sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Upaya-upaya ini telah menghasilkan peningkatan pelayanan publik, sebagaimana yang ditunjukkan oleh penilaian eksternal terhadap kinerja Pemda DIY. Pada tahun 2013, DIY berada di urutan pertama dalam *Indonesia Governance Index* (IGI) untuk penilaian kinerja tata kelola pemerintahan tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh *Partnership for Governance Reforms in Indonesia*.

2.2 Inovasi dalam Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Kinerja Pemda DIY

Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, berbagai inovasi telah dikembangkan oleh Pemda DIY. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas perencanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Hal ini meliputi pengembangan Jogja Plan untuk perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi untuk monitoring dan evaluasi yang mengintegrasikan ROPK, Monev APBD dan E-sakip. Selain itu, Pemda juga melakukan rangkaian inovasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, termasuk pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi aparatur di jajaran Pemda DIY.

Jogjaplan merupakan program aplikasi untuk menjaga konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang diwujudkan dalam penentuan rencana program dan kegiatan dengan program dan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian sasaran dalam RPJMD. Sistem aplikasi ini juga dikembangkan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan dengan memberikan ruang bagi usulan kegiatan oleh masyarakat melalui tautan <http://www.jogjaplan.com/login>.



Gambar 2.2 Sistem Aplikasi Jogjaplan

Pengembangan Jogja Plan juga didukung dengan pengembangan kualitas perencanaan dengan pelibatan tenaga ahli pendamping setiap SKPD dan penyusunan academic paper perencanaan sebagai pelengkap dokumen perencanaan formal pemerintah. Untuk pendampingan tenaga ahli, kerja sama dengan UGM dilakukan untuk program pendampingan doktor muda sesuai kompetensi tenaga ahli dan tupoksi SKPD. Kerja sama ini telah dimulai sejak tahun 2013 yang diwadahi dengan kesepakatan kerjasama no. 5/KSP/IV/2013 tentang penggunaan tenaga kualifikasi doktor UGM dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan oleh SKPD di lingkungan Pemda DIY.

Untuk peningkatan monitoring dan evaluasi pembangunan, Pemda DIY mengembangkan aplikasi Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), Web Monev dan e-SAKIP. Program aplikasi ROPK adalah instrumen yang digunakan oleh SKPD untuk menuangkan rencana detail pelaksanaan kegiatan dalam tata kala waktu dengan memberikan target progres capaian fisik dan keuangan pada tahapan waktunya. Webmonev merupakan aplikasi untuk melaporkan realisasi progres pelaksanaan kegiatan. Data yang dihasilkan dalam ROPK telah diintegrasikan dengan Webmonev dalam bentuk database nama program dan kegiatan serta target fisik dan keuangan. Penggunaan ROPK dan Webmonev dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah. Selanjutnya, aplikasi e-Sakip merupakan aplikasi yang dibangun untuk melakukan evaluasi atas sejauh mana tingkat pencapaian target kinerja baik di tingkat provinsi maupun di level SKPD. Sistem aplikasi berbasis teknologi informasi ini bisa diakses di <http://monevapbd.jogjaprovd.go.id/bpsys/www/auth>.

Inovasi-Inovasi dalam Pengelolaan SDM di Pemda DIY

Inovasi dalam pengelolaan SDM juga merupakan bagian kunci dalam manajemen perubahan di lingkungan Pemda DIY. Salah satunya adalah pengembangan sistem rekrutmen pegawai berbasis kompetensi, pengembangan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), dan rapor triwulanan SKPD.

Untuk rekrutmen berbasis kompetensi, Pemda DIY telah bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Komponen utama dari sistem rekrutmen ini adalah pengembangan assessment center, rekrutmen terbuka dengan mempromosikan fit proper, dan pejabat pemda dari lingkungan perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemda DIY. Upaya-upaya ini dipandang strategis untuk menjawab persoalan birokrasi yang gemuk dalam hal kuantitas namun seringkali tidak memadai dalam hal kualitas.

Selain perbaikan pada aspek rekrutmen, Pemda DIY juga menerapkan presensi pegawai dengan menggunakan sidik jari, dan pengembangan penilaian kontrak kerja pegawai, bersama dengan sistem insentif dan disinsentif untuk pegawai Pemda DIY melalui skema TPP. Skema TPP ini memasukkan variabel penilaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan bobot pegawai, disiplin dan penilaian prestasi kerja pegawai melalui penilaian kinerja instansi, kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dan kinerja Subbid/Subbag/Seksi. Pedoman TPP adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2011. Dalam pelaksanaannya peraturan gubernur ini mengalami beberapa kali penyesuaian, dan saat ini, TPP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37.1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan, Gubernur DIY melakukan pengendalian terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemda DIY melalui pemberian Rapor Triwulanan Kepala SKPD. Pemberian rapor diharapkan dapat memberikan dorongan bagi SKPD dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Selanjutnya penetapan ranking Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam setiap rapor pengendalian, merupakan salah satu wujud transparansi serta manifestasi *reward and punishment* dari Gubernur terhadap kinerja PA/KPA di lingkup Pemda DIY.

2.3 Rencana Strategis Pemda DIY

2.3.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis DIY untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program gubernur, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode 2012-2017, RPMD DIY disahkan melalui Perda No. 6 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

Visi :

Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Ini sejalan dengan konsep Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbudaya, di mana interaksi budaya melalui proses inkulturasi dan akulturasi justru mampu memperkuat budaya lokal, menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat dengan kearifan dan keunggulan lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata dengan menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah. Visi ini juga menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Misi:

1. **Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan.** Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan

umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

2. **Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.** Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif
3. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.** Penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien, melalui sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Misi ini mengemban tujuan peningkatan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
4. **Memantapkan prasarana dan sarana daerah.** Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang.

2.3.2 Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. *Misi Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, dengan tujuan:
 - a. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya;
 - b. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter;
 - c. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup;
2. *Misi Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, dengan tujuan:
 - a. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.
 - b. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.
3. *Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, dengan tujuan:
 - a. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.
4. *Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, dengan tujuan:
 - a. Mewujudkan pelayanan publik.
 - b. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

2.3.3 Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Misi: *Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, dengan sasaran:
 - a. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
 - b. Melek huruf masyarakat meningkat.
 - c. Aksesibilitas pendidikan meningkat.
 - d. Daya saing pendidikan meningkat.
 - e. Harapan hidup masyarakat meningkat.
2. Misi: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, dengan sasaran:
 - a. Pendapatan masyarakat meningkat.
 - b. Ketimpangan antar wilayah menurun.
 - c. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.
 - d. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.
 - e. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.
3. Misi: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, dengan sasaran:
 - a. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.
 - b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.
4. Misi: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, dengan sasaran:
 - a. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.
 - b. Kualitas lingkungan hidup meningkat.
 - c. Pemanfaatan ruang terkendali.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir 2017
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	persen	30%	70%
2	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.	Persen	91,99	95
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.	Tahun	9,6	12
4	Daya saing pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	Persen	0%	40%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir 2017
5	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup.	Tahun	73,37	74,55
6	Pendapatan masyarakat meningkat.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta).	Juta	7	8,5
7	Ketimpangan antar wilayah menurun.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	-	0,453	0,4481
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	-	0,298	0,2878
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Jumlah wisatawan nusantara.	Orang	2.113.314	2.437.614
		Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	212.518	245.198
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	Hari	2	2,6
		Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	Hari	2,15	2,69
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	-	B	A
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini pemeriksaan BPK.	-	WTP	WTP
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat.	Persen	34,57%	42,57%
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Persen	3,14%	15,72%
15	Pemanfaatan ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	Persen	50%	90%

2.3.4 Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2012 - 2017

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

2.3.4.1 Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mencapai misi: *Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, yaitu:
 - a. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan.
 - b. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
 - c. Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin.
 - d. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.
 - e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.
2. Strategi untuk mencapai misi: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, yaitu:
 - a. Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan.
 - b. Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif.
 - c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.
 - d. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat.
 - e. Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar pelaku wisata.
3. Strategi untuk mencapai misi: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, yaitu:
 - a. Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel.
 - b. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.
4. Strategi untuk mencapai misi: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, yaitu:
 - a. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.

- b. Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.3.4.2 Arah Kebijakan Daerah

1. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama: *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dari 30% menjadi 70%.
 - b. Meningkatkan Angka Melek Huruf dari 91,49% menjadi 95%.
 - c. Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dari 9,2 menjadi 12, dan peningkatan Daya Saing Pendidikan.
 - d. Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya dari 0% menjadi 40%
 - e. Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 73,27 menjadi 74,55.
2. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pendapatan perkapita pertahun dari Rp. 6,8 juta menjadi Rp. 8,5 juta.
 - b. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Antar Wilayah dari 0,4574 menjadi 0,4481.
 - c. Mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan dari 0,3022 menjadi 0,2878.
 - d. Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuhkan kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dari 2.013.314 menjadi 2.437.614 dan jumlah wisatawan mancanegara dari 202.518 menjadi 245.198.
 - e. Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuhkan kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dari 1,9 hari menjadi 2,6 hari dan lama tinggal wisatawan mancanegara dari 2,04 hari menjadi 2,69 hari.
3. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari B menjadi A.
 - b. Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% dan peningkatan akses di pedesaan.

- b. Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan dari 2% menjadi 15,72%.
- c. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi dari 45% menjadi 90%.

2.3.4.3 Program

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan program pembangunan menurut urusan, yaitu:

1. Program untuk mencapai Misi Pertama: *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, adalah sebagai berikut:
 - a. Urusan Pendidikan
 - 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - 2) Program Pendidikan Menengah
 - 3) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
 - 4) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
 - 5) Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - 6) Program Pendidikan Tinggi
 - 7) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
 - 8) Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya
 - 9) Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan
 - b. Urusan Perpustakaan
 - 1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
 - 2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
 - 3) Program Pengembangan Budaya Baca
 - c. Urusan Kesehatan
 - 1) Program Pembinaan Kesehatan Ibu
 - 2) Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja
 - 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - 5) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 6) Program Pembinaan Kesehatan Lansia
 - 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - 8) Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita
 - 9) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Bapel Jamkesos
 - 10) Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
 - d. Urusan Keluarga Berencana
 - 1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - e. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak
 - 2) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
 - 3) Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan
 - 4) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
 - f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - g. Urusan Tenaga Kerja
 - 1) Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

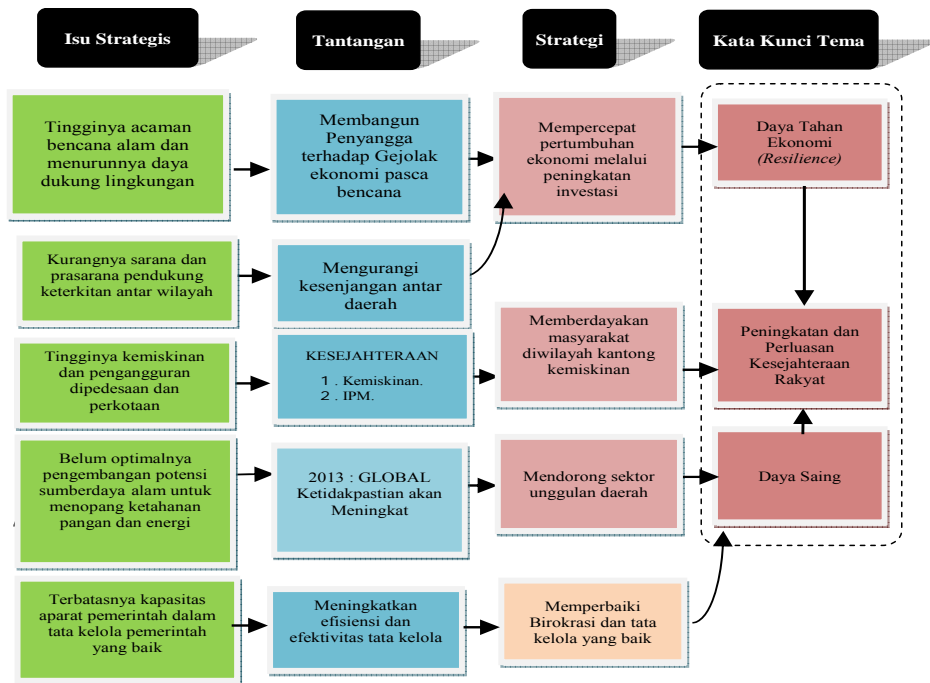
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- h. Urusan Kebudayaan
 - 1) Program Pengembangan Nilai Budaya
 - 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
2. Program untuk mencapai Misi Kedua: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, adalah sebagai berikut:
 - a. Urusan Pariwisata
 - 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - 3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - 4) Program Pengembangan Desa Wisata
 - b. Urusan Penanaman Modal
 - 1) Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Investasi
 - 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - c. Urusan Ketahanan Pangan
 - 1) Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
 - 2) Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - 3) Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - d. Urusan Pertanian
 - 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan
 - 2) Program Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura
 - 3) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - 4) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
 - 5) Program Peningkatan Produksi Perkebunan
 - 6) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
 - e. Urusan Kehutanan
 - 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - f. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - 4) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
 - g. Urusan Perindustrian
 - 1) Program Pengembangan Industri Kreatif
 - 2) Program Pengembangan IKM
 - 3) Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif
 - 4) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
3. Program untuk mencapai Misi Ketiga: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, adalah sebagai berikut:
 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4. Program untuk mencapai Misi Keempat: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, adalah sebagai berikut:
 - a. Urusan Perhubungan
 - 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - 3) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 4) Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan
 - b. Urusan Tata Ruang
 - 1) Program Pemanfaatan Ruang
 - 2) Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY
 - c. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
 - 1) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
 - d. Urusan Lingkungan Hidup
 - 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - e. Urusan Pekerjaan Umum
 - 1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - 2) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur
 - 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - 4) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - 5) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
 - 6) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
 - 7) Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
 - 8) Program Pengelolaan Persampahan
 - 9) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
 - 10) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 11) Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan
 - f. Urusan Perumahan
 - 1) Program Pengembangan Perumahan
 - 2) Program Pengurangan Kawasan Kumuh

2.3.5 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.3.5.1 Tema Pembangunan Daerah

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DIY No. 26 tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), tema pembangunan propinsi DIY tahun 2013 adalah “Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Kerangka pikir yang melandasi tema ini tergambar dalam skema berikut ini:



Gambar 2.3 Tema Pembangunan DIY Tahun 2013

Penguatan daya saing (*competitiveness*) daerah dimaknai sebagai upaya mengatasi perubahan dan persaingan global dan nasional, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding daerah lain, membentuk/menawarkan lingkungan yang lebih produktif bagi bisnis, menarik *talented people*, investasi, dan mobile factors lain, serta peningkatan kinerja berkelanjutan. Daya saing perekonomian akan dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi. Apabila kita berbicara mengenai produktivitas, maka unturnya yang paling pokok adalah sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Efisiensi menyangkut aspek kelembagaan ekonomi, terutama bekerjanya mekanisme pasar secara efektif dan sedikitnya hambatan dalam transaksi.

Penguatan daya tahan (*resilience*) ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan perekonomian yang tidak mudah terombang ambing oleh gejolak yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Penguatan daya tahan juga dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menjaga momentum dan stabilitas ekonomi pada suatu wilayah dari perubahan ekonomi global (seperti kenaikan bahan bakar minyak). Perekonomian yang tidak mudah terombang ambing tersebut, ditandai oleh tiga ciri berikut. Pertama, adanya diversifikasi kegiatan ekonomi, seperti tercermin dalam keragaman sumber mata pencaharian penduduknya antara lain, sumber penerimaan daerahnya, dan sebagainya. Kedua, pelaku ekonominya mempunyai keluwesan yang tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan usaha yang dapat berubah dengan cepat. Ketiga, kerangka kebijakan dan peraturan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat.

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dari aspek materi maupun spritual.

2.3.5.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan DIY Tahun 2013 bersama dengan sasarannya sebagai berikut.

Tabel 2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan DIY Tahun 2013

1.	Reformasi birokrasi dan tata kelola	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
2	Pendidikan	Melek huruf masyarakat meningkat Aksesibilitas pendidikan meningkat Daya saing pendidikan meningkat
3	Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat
4	Penanggulangan kemiskinan	Pendapatan masyarakat meningkat Ketimpangan pendapatan masyarakat menurun
5	Ketahanan pangan	Pendapatan masyarakat meningkat
6	Infrastruktur	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Pemanfaatan ruang terkendali
7	Iklim investasi dan usaha	Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara meningkat Lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara meningkat
8	Energi	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan
9	Lingkungan hidup dan bencana	Kualitas lingkungan hidup meningkat Pemanfaatan ruang terkendali
10	Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik	Ketimpangan antar wilayah menurun
11	Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi	Peranserta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat

Kerangka pembangunan dalam konteks negara kesatuan mengandung arti terdapatnya kesesuaian antara kerangka pembangunan di tingkat pusat dengan pembangunan di daerah, dalam satu wadah bernama pembangunan nasional. Karenanya, prioritas pembangunan di daerah juga disusun dengan mengacu dan mendukung prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Prioritas nasional yang dimaksud adalah:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;

3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik;
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, serta 3 Prioritas lainnya yaitu (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian dan; (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat

2.4 Rencana Kinerja 2013

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan, adalah merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran dalam 5 tahun periode RPJMD. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel 2.3 Prioritas dan Sasaran Strategis Pembangunan DIY Tahun 2013

No	Prioritas	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Reformasi Birokrasi dan tata kelola	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		B
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini pemeriksaan BPK		WTP
2	Pendidikan	Melek huruf masyarakat meningkat	Angka Melek huruf		91,99
		Aksesibilitas pendidikan meningkat	Rata-rata lama sekolah		9,6
		Daya saing pendidikan meningkat	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	persen	0%
3	Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka Harapan Hidup	tahun	73,37
4	Penanggulan gan Kemiskinan	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan		0,298
5	Ketahanan Pangan	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta)	juta	7

No	Prioritas	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6	Infrastruktur	Pemanfaatan ruang terkendali	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat	persen	50%
7	Iklim Infestasi dan Usaha	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Jumlah wisatawan nusantara	orang	2.113.314
			Jumlah wisatawan mancanegara	orang	212.518
		Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	Hari	2
			Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	Hari	2,15
8	Energi	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Load factor angkutan perkotaan meningkat	Persen	34,57%
9	Lingkungan hidup dan bencana	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	Persen	3,14%
10	Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik	Ketimpangan antar wilayah menurun	Indek Ketimpangan Antar Wilayah		0,453
11	Kebudayaan , Kreativitas, dan Inovasi Teknologi	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	persen	30%

2.4.1 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2013 sebagai berikut

Tabel 2.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2013

Sasaran	Didukung Jumlah Program
Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	5
Melek huruf masyarakat meningkat	4
Aksesibilitas pendidikan meningkat	7

Sasaran	Didukung Jumlah Program
Daya Saing Pendidikan meningkat	9
Harapan hidup masyarakat meningkat	25
Pendapatan masyarakat meningkat	34
Ketimpangan Antar Wilayah menurun	10
Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	17
Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	7
Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	4
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	51
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	8
Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	11
Kualitas lingkungan hidup meningkat	6
Pemanfaatan Ruang terkendali	5

2.5 Penetapan Kinerja (PK) tahun 2013

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2013 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKP 2013, IKU dan APBD. Pemerintah Daerah DIY telah menetapkan PK sebagai berikut.

Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Pemda DIY Tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	persen	30 %
2	Melek huruf masyarakat meningkat	Angka Melek huruf	-	91,99
3	Aksesibilitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	-	9,6
4	Daya saing pendidikan meningkat	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	persen	0%
5	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka Harapan Hidup	tahun	73,37
6	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta)	juta	7,0 jt
7	Ketimpangan antar wilayah	Indek Ketimpangan Antar	-	0,4530

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	menurun	Wilayah		
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan	-	0,2980
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Jumlah wisatawan nusantara	orang	2.113.314
		Jumlah wisatawan mancanegara	orang	212.518
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	Hari	2,00 hari
		Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	Hari	2,15 hari
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	-	B
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini pemeriksaan BPK	-	WTP
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat	Persen	34,57%
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	Persen	3,14%
15	Pemanfaatan ruang terkendali	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat	persen	50%

2.5.1 Strategi untuk Pencapaian Kinerja Lainnya

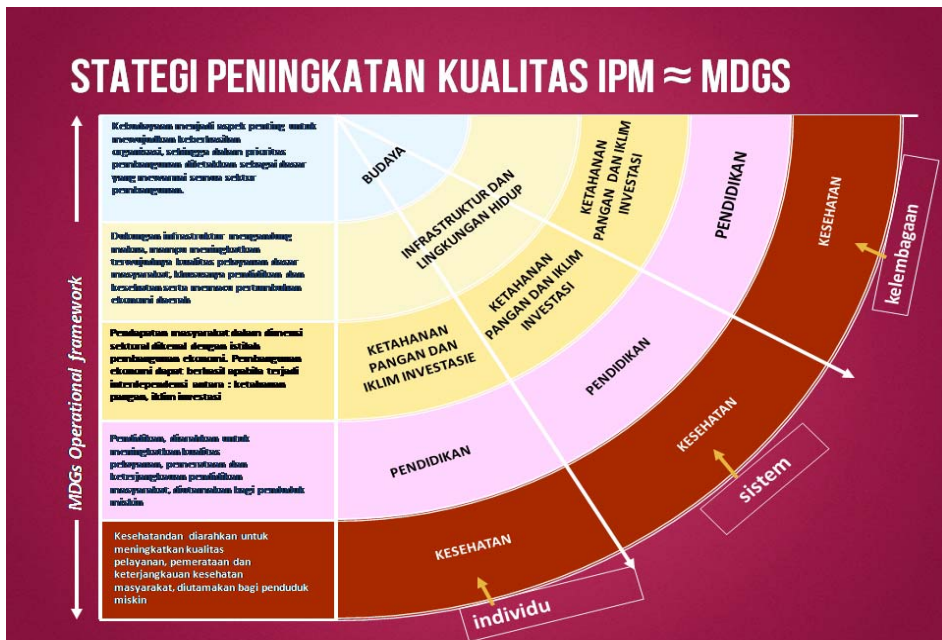
Selain penetapan kinerja berupa IKU sebagaimana telah diutarakan di muka, Pemda DIY juga telah menetapkan strategi untuk pencapaian kinerja lainnya, khususnya untuk pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki komitmen kuat dalam upaya mewujudkan tercapainya target MDGs pada Tahun 2015. Integrasi tujuan-tujuan MDGs tersebut dapat dicermati dalam berbagai program prioritas pembangunan yang terdapat pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Aksi Daerah MDGs disusun sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian target MDGs selaras dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 telah menyusun Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah dan telah diperkuat dalam pelaksanaannya dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 36.2/TIM/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs yang substansinya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target MDGs.

Begitu juga dengan strategi untuk pencapaian target IPM dan IPG. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY juga dalam kerangka untuk meningkatkan IPM dan IPG sebagai salah satu ukuran pembangunan yang berfokus pada pengembangan *human capabilities*. Strategi yang menggabungkan intervensi pada aspek individu, sistem dan kelembagaan ini mendorong pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara, laki-laki dan perempuan.

Strategi untuk pencapaian baik target MDGs maupun IPM-IPG nampak dalam gambar berikut ini:



Gambar 2.4 Strategi Peningkatan Kualitas IPM dan MDGs

2.5.2 Rencana Anggaran Tahun 2013

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 2.917.270.974.520,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Realisasi Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.530.012.706.032,00	52,45
2	Belanja Langsung	1.387.258.268.488,00	47,55
Jumlah		2.917.270.974.520,00	100

Sumber: DPPKA DIY, 2014

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2013 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2013

No	Sasaran	Anggaran	% Anggaran
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	2,751,045,660	0.20
2	Melek huruf masyarakat meningkat	14,001,932,546	1.01
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat	59,272,667,085	4.27
4	Daya Saing Pendidikan meningkat	32,544,708,600	2.35
5	Harapan hidup masyarakat meningkat	102,050,956,258	7.36
6	Pendapatan masyarakat meningkat	47,307,672,297	3.41
7	Ketimpangan Antar Wilayah menurun	159,661,741,418	11.51
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	15,593,831,420	1.12
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	59,009,655,938	4.25
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	13,785,073,150	0.99
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	94,031,725,373	6.78
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	14,784,647,305	1.07
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	163,743,003,418	11.80
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat	32,234,718,792	2.32
15	Pemanfaatan Ruang terkendali	6,778,477,300	0.49
Jumlah		817,551,856,560.00	58.93
Belanja Langsung Pendukung		569,706,411,928.00	41.07
Total Belanja langsung		1,387,258,268,488.00	100.00

Pada tabel di atas, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja

langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp817,551,856,560.00 atau sebesar 58.93% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp569,706,411,928.00 atau 41.07% dari total anggaran belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran pembangunan dengan anggaran paling besar adalah sasaran layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. dengan besaran anggaran 11,80% dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran ketimpangan antar wilayah menurun yaitu sebesar 11,51%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat sebesar 0,20% dari total anggaran belanja langsung.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja Pemda

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Indikator Kinerja Utama 2013*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
3. *Pencapaian Kinerja Lainnya*
4. *Akuntabilitas Anggaran*

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu

akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemda DIY untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq$	Sangat Baik	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber :Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2013

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemda DIY untuk tahun 2013. Pencapaian IKU Gubernur tahun 2013 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2013

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	-	30%	63,46%	212	70%	91
2.	Angka Melek huruf	91,49	91,99	92,02*	100,03	95	96,86
3.	Rata-rata lama sekolah	9,2	9,6	9,21	95,94	12	77
4.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	-	0%	0%	-	40%	0
5.	Angka Harapan Hidup	73,37	73,37	74	100,9	74,55	98,4
6.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta)	6,68	7	6,94	99,14	8,5	81,65
7.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah	0,4524	0,453	0,4547	99,62	0,4481	98,55
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan	0,3194	0,298	0,3187	93,05	0,2878	90,30
9.	Jumlah wisatawan nusantara	2.162.422	2.113.314	2.602.074	123,13	2.437.614	106,75
10.	Jumlah wisatawan mancanegara	197.751	212.518	235.888	111,50	245.198	96,20
11.	Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	1,9	2	1,59	79,50	2,6	61,15
12.	Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	2,03	2,15	1,90	88,37	2,69	70,63
13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	B	B	100	A	66,67
14.	Opini pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
15.	Load factor angkutan perkotaan meningkat	30,66	34,57%	34,49%	99,77	42,57%	81,02
16.	Persentase Peningkatan	-	3,14%	3,14%	100	15,72%	20,0

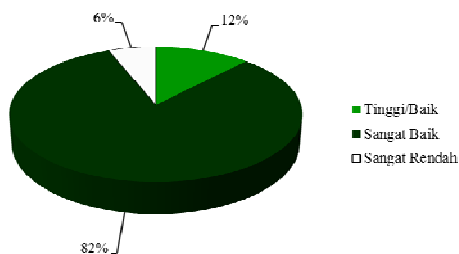
No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Kualitas Lingkungan						
17.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat	45%	50%	63,25%	127,86	90%	70,28

Catatan:

- untuk sasaran 13 dan 14, merupakan capaian kinerja tahun 2012, karena realisasi kinerja baru bisa dilihat pada akhir tahun 2014.
- Terkait dengan periode transisi RPJMD dari RPJMD 2009-2013 ke RPJMD 2012-2017, beberapa IKU mengalami penyesuaian rumusan indikator, sehingga belum ada data realisasi kinerja pada tahun 2012. Hal ini mencakup IKU tentang “Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya”, “Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya”, dan IKU terkait “Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan”.

Dari 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur tahun 2013, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa **16 IKU** telah memenuhi **kriteria tinggi (2 IKU)** maupun bahkan, lebih banyak yang masuk **kriteria sangat baik (14 IKU)**. Satu IKU yaitu “Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya” belum ditentukan target kinerjanya pada tahun 2013. “Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya” mempunyai target N/A dan realisasi 0 disebabkan adanya penyesuaian indikator kinerja lama pada tahapan RPJMD yang lama menjadi indikator kinerja baru sesuai RPJMD 2012-2017 akan dihitung mulai tahun 2014. Dengan demikian, pada tahun 2014 baru akan dilakukan perhitungan jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembinaan model pendidikan berbasis budaya dan model unggulan mutu pendidikan.

Untuk 2 IKU yang masuk kriteria baik, adalah IKU “Lama Tinggal Wisatawan Nusantara” yang realisasinya mencapai 79,50% dari target, dan IKU “Lama tinggal wisatawan mancanegara” yang mencapai 88,37% dari target. Sementara 14 IKU yang lain, pencapaiannya masuk kategori sangat baik ($\geq 91\%$). Bahkan, 7 IKU diantaranya, mencapai lebih dari 100% dari target tahun 2013. Capaian ini bisa dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 3.1 Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2013

Mayoritas IKU Gubernur 2013 telah berhasil dicapai dengan **kriteria tinggi (12%)** dan **sangat baik (82%)**. Untuk pencapaian dengan **kriteria sangat baik**, bahkan 6 dari 14 IKU atau **42,85%** diantaranya, realisasinya bahkan mencapai **lebih dari 100%** dari rencana kinerja yang dicanangkan. Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Gubernur Tahun 2013 Per Triwulan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Peran Serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	30%	10%	15,33%	153,3	15	34,42%	229,46	25	44,75%	179	30%	63,46%	212
2	Melek huruf masyarakat meningkat	Angka Melek huruf	91,99%	91,49	91,49	100	91,49	91,49	100	91,80	92,02	100,2	91,99%	92,02*	100,03
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Rata-rata lama sekolah.	9,6	9,2	9,2*	100	9,3	9,2*	98,9	9,4	9,2*	97,8	9,6	9,35*	95,94
4	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka Harapan Hidup	73,37	73,355	73,357	100,002	73,36	73,369	100,012	73,365	73,382	100,023	73,37	73,394	100,9
5	Pendapatan masyarakat meningkat (ADHK)	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta)	7.00	3.00	2.71	90.47	4.00	3.85	96.25	6.00	5.85	97.50	7.00	6.94	99.14
6	Ketimpangan antar wilayah menurun	Indek Ketimpangan Antar Wilayah	0,4524	0,4524	0,4524	100	0,4524	0,4526	100,04	0,4534	0,453	100	0,4547	0,4524	99,62
7.	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan	0.2980	0.3190	0.3192	99.94	0.3150	0.3190	98.73	0.3050	0.3189	95.44	0.2980	0.3187	93.05
8.	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Jumlah wisatawan nusantara	2,113,314	550,000	559,115	101.66	1,000,000	1,231,636	123.16	1,750,000	1,849,110	105.66	2,113,314	2,602,074	123.13
		Jumlah wisatawan mancanegara	212,518	40,000	44,074	110.19	90,000	106,362	118.18	150,000	180,768	120.51	212,518	235,888	111.5

LAKIP DIY Tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2013	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
9	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	2.00	1.9	1.64	86.32	1.92	1.63	84.90	1.95	1.61	82.56	2.00	1.59	79.50
		Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	2.15	2.03	1.98	97.54	2.10	1.83	87.14	2.10	1.88	89.52	2.15	1.90	88.37
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	B	B	B	100	B	B	100	B	B	100	B	B	100
12.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini pemeriksaan BPK.	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
13.	Layanan public meningkat, terutama pada penataan system transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Load factor angkutan perkotaan meningkat	34,57%	33,07	32,53	98,37	33,57	33,54	99,91	34,07	34,08	100	34,57%	34,49%	99,77
14.	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	3,14%	2,20%	2,30%	100	2,50%	2,60%	100	2,80	2,90%	100	3,14%	3,14%	100
15.	Pemanfaatan ruang terkendali	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat	50% Gap: 5%	46,25	50,73	110	47,50	55,21	116	48,30	59,69	124	50	63,25	127,86

Beberapa IKU yang diuraikan di atas, penetapan target dan pengukuran realisasi triwulan dilakukan dengan menggunakan *proxy indicator* karena karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator. Indikator yang dimaksud dan penjelasan mengapa dipergunakan *proxy indicator* adalah sebagai berikut:

1. Sebagian indikator merupakan indikator pada *level outcome*, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja IKU secara langsung, seperti IKU yang pertama.
2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar SKPD di lingkungan Pemda DIY, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Indeks Ketimpangan Wilayah, Indeks Ketimpangan Pendapatan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Opini Pemeriksaan BPK.

Proxy indicator yang dipakai adalah pencapaian sub-indikator yang menjadi penyumbang IKU. Apabila disandingkan pencapaian kinerja tahun 2013 dan dibandingkan dengan target kinerjanya, maka deviasi nya ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Kinerja dan Deviasi Pencapaian IKU Tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2013			2014		2015	
				Target 2013	Capaian 2013	Deviasi	Target (RPJMD)	PK	Target (RPJMD)	RKT/ Target RKPDP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	Persen	30	63.46	-33.46	40	74.57	50	85.68
2	Melek huruf masyarakat meningkat	Angka Melek huruf	Persen	91.99	92.02	-0.03	92.6	92.6	93.25	93.25
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Rata-rata lama sekolah	Persen	9.6	9.21	0.39	10	10	10.8	11.19
4	Daya Saing Pendidikan meningkat	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Persen	0	0	0	5	5	10	10
5	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka Harapan Hidup.	Tahun	73.37	74	-0.63	73.67	74,41	73.97	74.71

LAKIP DIY Tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2013			2014		2015	
				Target 2013	Capaian 2013	Deviasi	Target (RPJMD)	PK	Target (RPJMD)	RKT/ Target RKPDP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Pendapatan masyarakat meningkat. (ADHK)	Pendapatan perkapita pertahun.	Juta	7	6.94	0.06	7.4	7.4	7.8	7.8
7	Ketimpangan Antar Wilayah menurun	Indek Ketimpangan Antar Wilayah	Persen	0.453	0.4547	0.0017	0.4515	0.4515	0.4501	0.4501
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan	Persen	0.298	0.3187	0.0207	0.295	0.295	0.2691	0.2691
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Jumlah wisatawan nusantara	Orang	2,113,314	2,602.074	-488760	2,237,500	2.754.981	2.337.000	2.877.493
		Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	212,518	235.888	-23370	225,100	249.854	235,190	261.053
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	2	1.59	0.41	2.15	2.15	2.3	2.3
		Lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2.15	1.9	0.25	2.25	2.25	2.35	2.35
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		B	B	Tercapai	B	A	B	A
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini pemeriksaan BPK		WTP	WTP	Tercapai	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Layanan public meningkat, terutama pada penataan system transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Load factor angkutan perkotaan meningkat	Persen	34.57	34.49	0.08	36.57	36.57	38.57	38.57
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	Persen	3.14	3.14	0	6.29	6.29	9.43	9.43

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2013			2014		2015	
				Target 2013	Capaian 2013	Deviasi	Target (RPJMD)	PK	Target (RPJMD)	RKT/Target RKPDP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Pemanfaatan Ruang terkendali	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat	Persen	50	63.25	-13.25	60	63.42	70	72.77

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

1. Sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat

Urusan kebudayaan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan signifikan di DIY. Setelah UU Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan, posisi kebudayaan menjadi semakin kuat karena kebudayaan menjadi payung atau pengarusutamaan pembangunan di segala bidang. Terkait dengan sasaran di atas, aspek penting dari derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya bisa dilihat antara lain dari jumlah desa budaya yang maju, selain juga keberadaan organisasi budaya yang berkembang dengan baik.

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat

Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	-	30%	63,46%	212	70%	91

Untuk tahun 2013, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang **sangat baik**, karena terealisasi jauh diatas target yang dicanangkan (212%). Capaian ini juga menyumbang sebanyak 70% dari target pada akhir RPJMD (2017).

Capaian ini juga selaras dengan posisi Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan dimana beragam budaya bertemu dan berinteraksi. Namun demikian, sebagai sebuah produk sosial yang dinamis, pertukaran ini justru memiliki peluang untuk menguatkan budaya lokal dan mengukuhkan identitas budaya yang tidak bersifat eksklusif.



Gambar 3.2 Pertunjukan Karya Tari Yogyakarta

Festival, Karnaval, Gelar Budaya, Pasar Rakyat dan event-event budaya lainnya baik yang bertaraf lokal, nasional maupun internasional juga semakin banyak diselenggarakan baik oleh swasta, masyarakat maupun pemerintah. Beberapa event budaya tersebut antara lain adalah: Pekan Budaya Rusia, Pekan Budaya Tionghoa, Gelar Budaya Jogja, Bienalle, FKY, Gelar Ketoprak, Karnaval Jogja, Jogja Fashion Week, Sekaten, Kirab Budaya, Festival

Adat Istiadat, Festival Dalang Anak, Festival Film Indie, Festival Desa Budaya, Pagelaran Musik, Festival Budaya Kotagede. Data penyelenggaraan festival seni dan budaya menunjukkan peningkatan kuantitas pada tahun 2009 sebanyak 720 menjadi pada tahun 2013. Hal ini mengisyaratkan adanya geliat kehidupan dan upaya pelestarian seni dan budaya, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, 2009-2013

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	720	720	720	790	1.093
Prasarana Budaya	92	135	137	412	412
Lembaga Budaya	107	107	107	107	107
Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan	31	31	31	31	31

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Interaksi dan pertumbuhan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan juga bisa dilihat dari banyaknya organisasi kesenian di DIY. Nampak dalam tabel berikut, adalah kecenderungan peningkatan jumlah organisasi kesenian dari tahun ke tahun, terkecuali untuk perusahaan bioskop.

Tabel 3.7 Jumlah Organisasi Kesenian di DIY Tahun 2009-2013

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013
Organisasi Sinematografi	14	14	14	14	42
Organisasi Seni Pertunjukkan	4.203	4.219	4.269	4.269	4.269
Organisasi Seni Rupa	8	25	25	25	25
Perusahaan Film	9	10	10	10	20
Perusahaan Bioskop	4	4	4	4	1
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	37	37	37	37	38

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya. Dalam tahun 2013, program yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 5 program, yaitu:

1. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
2. Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip
5. Program Pengembangan Kehidupan Beragama

Permasalahan:

1. Dalam implementasi program terutama yang berasal dari Dana Keistimewaan dihadapkan pada persoalan keterbatasan waktu. Pencairan anggaran untuk kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan baru terjadi pada saat triwulan akhir 2013, sehingga kegiatan yang sifatnya pengadaan atau kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dalam rentang waktu lebih dari tiga bulan tidak dapat dilaksanakan.
2. Keragaman kondisi organisasi budaya, yang memerlukan strategi penguatan organisasi yang berbeda-beda. Upaya yang dilakukan adalah melakukan kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dengan mendatangkan narasumber/pakar/ahli dari Perguruan Tinggi, Seniman/budayawan senior berkaitan dengan pengelolaan Organisasi budaya. Dari hasil ini, terdapat 3 organisasi (0,06%) dari 5 organisasi budaya (0,09%) yang meningkat statusnya dari berkembang menjadi maju. Namun dengan durasi waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas, menjadikan upaya penguatan organisasi belum maksimal dilakukan.

Solusi:

1. Hambatan terkait keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran untuk kegiatan yang bersumber dari Danais pada tahun 2013 bisa dipahami karena merupakan tahun pertama implementasi Danais. Untuk periode ke depan, tertib pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan akan membantu mengurangi persoalan minimnya durasi waktu pelaksanaan kegiatan yang berimplikasi pada tidak efektifnya kegiatan yang dilakukan.
2. Mengembangkan pembinaan organisasi budaya dengan mempertimbangkan kondisi dan strategi yang tepat. Upaya ini bisa dilanjutkan dengan melanjutkan pembinaan organisasi budaya di tahun 2014, dengan melakukan kegiatan untuk dua sasaran, yaitu organisasi budaya tumbuh menjadi organisasi budaya yang berkembang, dan organisasi budaya yang berkembang menjadi organisasi budaya yang

maju. Hasil yang diharapkan terdapat keseragaman kondisi pada masing-masing organisasi.

2. Sasaran Melek Huruf Masyarakat Meningkat

Target penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Terlebih lagi, dalam RPJMD DIY 2012-2017, penegasan akan pentingnya pendidikan juga bisa ditemukan dalam misi

1 tentang membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dimana peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan telah menjadi arah bagi pembangunan di DIY.



Gambar 3.3 Belajar Membaca Sadar Melek Huruf



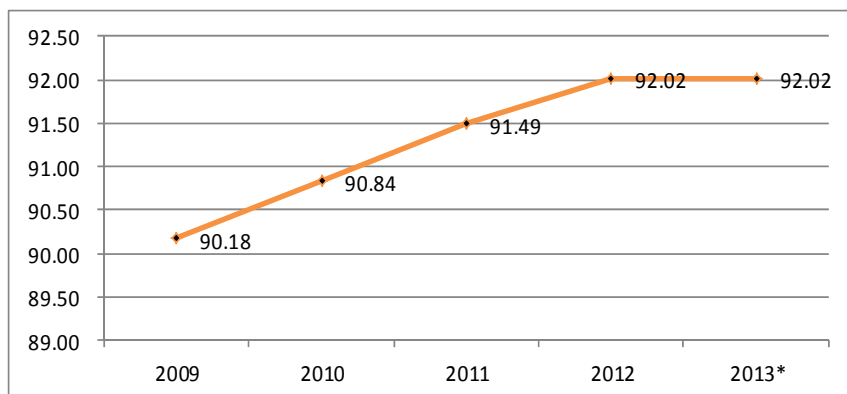
Gambar 3.4 Diskusi Pada Proses Belajar Mengajar

Dalam tahun 2013, realisasi pencapaian sasaran angka melek huruf telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa angka melek huruf telah melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 92,02% dari target 91,99%, atau sebanyak 100,03%. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang sangat baik** untuk sasaran kedua ini. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 98,86% dari rencana kinerja tahun 2017.

Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Melek Huruf Masyarakat Meningkat

Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Melek Huruf	98,23	91,99	92,02*	100,03	95	96,86

Bila melihat data historis dalam kurun 2009-2012, angka melek huruf DIY selama kurun waktu 2009-2012 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2009 capaian angka melek huruf DIY tercatat sebesar 90,18% kemudian naik menjadi 90,84% di tahun 2010 dan menjadi 91,49% dan 92,02% di tahun 2012. Berdasarkan data BPS, saat ini terdapat sekitar 8% penduduk DIY buta huruf, yang sebagian besar ditengarai berusia 50 tahun ke atas, yang menyebabkan target peningkatan angka melek huruf menjadi tidak mudah dilakukan.



Sumber : BPS Provinsi DIY

*: Angka Sementara

Gambar 3.5 Persentase Angka Melek Huruf DIY, 2009-2013

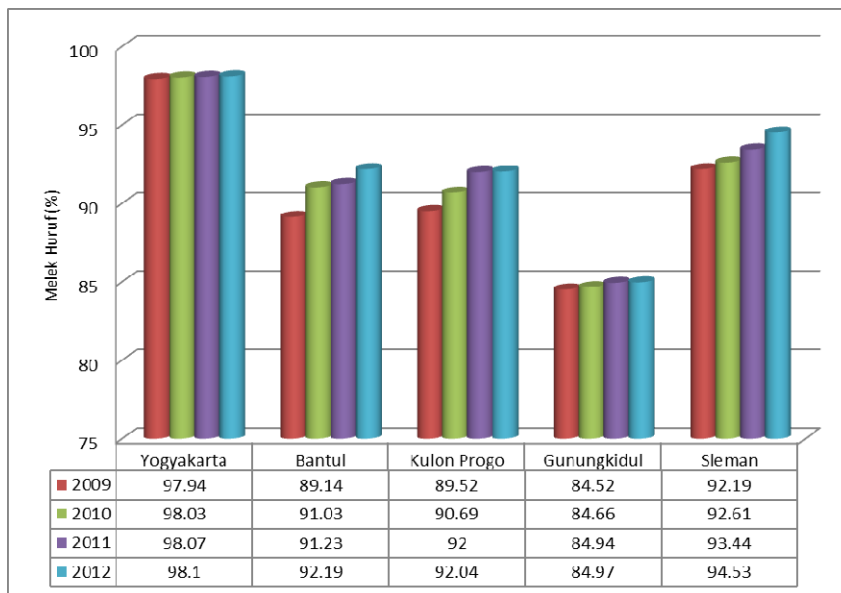
Jika dilihat data per kabupaten/kota, capaian angka melek huruf tahun 2012 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 98,10% sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 84,97%. Capaian Angka Melek Huruf DIY tahun 2009-2012 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perkembangan Angka Melek Huruf DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2012

Kab/Kota	Angka Melek Huruf			
	2009	2010	2011	2012
Yogyakarta	97,94	98,03	98,07	98,10
Bantul	89,14	91,03	91,23	92,19
Kulon Progo	89,52	90,69	92,00	92,04
Gunungkidul	84,52	84,66	84,94	84,97
Sleman	92,19	92,61	93,44	94,53
DIY	90,18	90,84	91,49	92,02

Sumber : BPS Provinsi DIY

Trend pencapaian angka melek huruf di kelima kabupaten/kota dalam tahun 2009 (tahun ke-1) hingga tahun 2012 (tahun ke-4) menunjukkan kecenderungan peningkatan angka melek huruf dari tahun ke tahun. Sedikit pengecualian adalah untuk kabupaten Bantul, yang pada tahun 2012, angka melek hurufnya justru mengalami penurunan walaupun nilainya tidak terlampau signifikan. Selengkapnya bisa dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 3.6 Trend Angka Melek Huruf di DIY, 2009-2012

Kondisi pencapaian angka melek huruf yang positif menunjukkan hasil dari program/ kegiatan yang telah dilakukan, yang menggambarkan bukan hanya peran dari pemerintah. Capaian ini juga menunjukkan kontribusi penting dari pihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang.

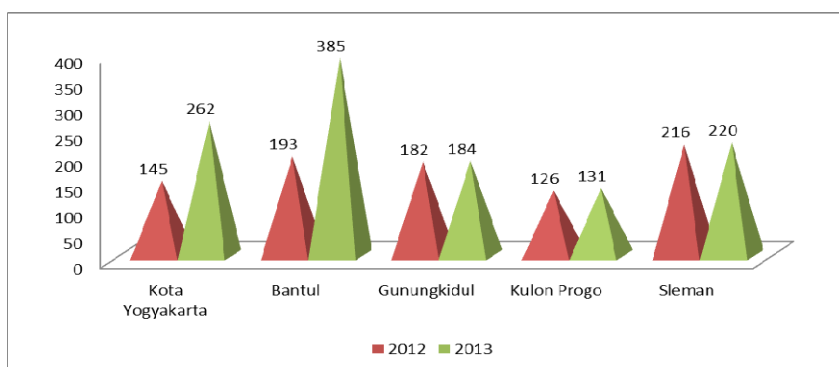


Gambar 3.7 Perpustakaan Kota Yogyakarta

Untuk Pemda DIY sendiri, pada tahun 2013, capaian ini merupakan kinerja dari program-program berikut ini:

1. Program Pendidikan Non Formal dan Informal
2. Pengembangan budaya baca
3. Pengembangan dan Pembinaan perpustakaan
4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Beberapa data berikut menggambarkan bagaimana ketersediaan dan perbaikan-perbaikan telah dicapai dalam upaya peningkatan angka melek huruf. Salah satunya adalah jumlah perpustakaan di wilayah DIY. Di kelima wilayah, jumlah perpustakaan menunjukkan peningkatan pada tahun 2013. Ketersediaan perpustakaan ini bisa menjadi faktor penting untuk meningkatkan tradisi baca di masyarakat.



Sumber : BPAD DIY

Gambar 3.8 Jumlah Perpustakaan di DIY per Kabupaten/Kota

Permasalahan:

1. Mayoritas penduduk yang masih buta huruf adalah penduduk berusia lanjut. Kelompok ini seringkali tidak terjangkau dalam upaya-upaya pengentasan buta aksara, karena pendidikan tidak dianggap penting bagi kelompok usia sekolah ataupun usia produktif.
2. Walaupun persentase penduduk melek huruf sudah semakin membaik di semua kabupaten/kota, kesenjangan antar wilayah masih menjadi persoalan. Wilayah seperti Gunungkidul memiliki angka melek huruf yang jauh di bawah wilayah lain seperti Kota Yogyakarta, dengan selisih persentase penduduk melek huruf sebanyak 13,13%.
3. Fluktuasi angka melek huruf dari tahun ke tahun harus dicermati untuk melihat apakah faktor yang menjadi penyebab situasi ini. Data Bantul pada tahun 2012 dimana angka melek huruf mengalami penurunan harus dikaji lebih jauh faktor penyebabnya dan bagaimanakah menjawab persoalan ini.

Solusi:

1. Strategi yang tepat untuk memfokuskan program pengentasan buta huruf pada kelompok lansia, seperti pelibatan kelompok lansia yang mengakar di masyarakat. Selain itu, juga perlu mempromosikan pentingnya pendidikan bagi lansia kepada masyarakat luas melalui media yang efektif.
2. Fokus pengembangan pendidikan dengan dukungan bagi daerah-daerah dengan capaian melek huruf yang tertinggal, seperti di Gunungkidul. Koordinasi yang efektif dengan Pemerintah Kabupaten yang memegang kewenangan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar perlu dilakukan. Juga upaya-upaya untuk menjaga dan meningkatkan capaian melek huruf dari tahun ke tahun.

3. Sasaran Aksesibilitas Pendidikan Meningkatkan

Seperti juga angka melek huruf, komponen penting dari pembangunan pendidikan adalah perluasan akses pendidikan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Perluasan akses ini menjadi kunci karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemda DIY telah menetapkan indikator peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan. Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang



Gambar 3.9 Situasi Belajar Mengajar

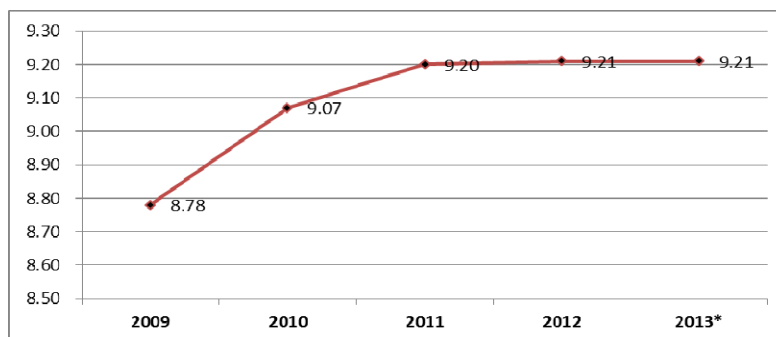
dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya **sangat baik**, karena mencapai 95,94% dari target yang dirumuskan. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah adalah 9,21 tahun, dibandingkan dengan target sebanyak 9,2 tahun. Pencapaian ini juga telah mencapai 77% dari rencana target kinerja pada akhir RPJMD pada tahun 2017 yaitu rata-rata lama sekolah sebesar 12 tahun.

Tabel 3.10 Rencana dan Realisasi Capaian Aksesibilitas Pendidikan Meningkat

Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Rata-rata lama sekolah.	9,2	9,6	9,21	95,94	12	77

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di DIY, selama 2009-2012 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 8,78 tahun di tahun 2009 menjadi 9,21 di tahun 2012 (setara SLTA). Peningkatan rata-rata lama sekolah di DIY ini dapat dimaknai bahwa penduduk DIY semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian, seperti halnya angka melek huruf, stagnasi capaian tahun 2013 dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 dimana rata-rata lama sekolah tetap, perlu menjadi perhatian untuk pengembangan strategi yang lebih efektif.



Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 3.10 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) DIY 2008-2013

Apabila dilihat data per kabupaten/kota, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2012 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 11,56 tahun sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 7,70 tahun. Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan di DIY. Capaian rata-rata lama sekolah DIY tahun 2009-2012 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2012

Kab/Kota	Rata-rata lama Sekolah			
	2009	2010	2011	2012
Yogyakarta	11,48	11,48	11,52	11,56
Bantul	8,64	8,82	8,92	8,95
Kulon Progo	7,89	8,20	8,37	8,37
Gunungkidul	7,61	7,65	7,70	7,70
Sleman	10,18	10,30	10,51	10,52
DIY	8,78	9,07	9,20	9,21

Sumber : BPS DIY

Sedangkan apabila dilihat dari data pilah rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin, rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Untuk tahun 2010, rata-rata lama sekolah laki-laki di DIY 9,73 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah bagi perempuan 8,45 tahun. Sedangkan untuk tahun 2011, rata-rata lama sekolah laki-laki di DIY 9,78 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah bagi perempuan 8,67 tahun. Kesenjangan ini bisa menjadi gambaran bahwa persoalan pemerataan akses yang setara masih menjadi tantangan bagi DIY. Hal ini bisa berkorelasi dengan berbagai faktor sosial seperti pandangan budaya yang masih memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan karena terkait dengan peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Pengembangan skema kebijakan untuk menjawab persoalan kesenjangan ini perlu menjadi agenda yang lebih kuat di masa depan.

Akses pendidikan juga bisa digambarkan oleh beberapa data lain seperti Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Selain itu, juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau, seperti data tentang rasio antara jumlah sekolah dengan jumlah penduduk atau sarana dan prasarana pendidikan yang lain. Bagian berikut akan menguraikan situasi untuk beberapa aspek tersebut di atas.

a. Angka Partisipasi Kasar

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2009/2010 – 2012/2013 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.12 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode 2009/2010 s/d Periode 2012/2013

Kab/Kota	Angka Partisipasi Kasar											
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013		
	L	P	Rata2	L	P	Rata2	L	P	Rata2	L	P	Rata2
APK Tingkat SD												
Yogyakarta	150,12	131,06	140,25	149,32	129,88	139,29	148,87	129,09	138,63	141,59	138,60	140,13
Bantul	112,74	96,62	104,39	113,61	96,52	104,76	114,05	97,14	105,29	108,46	103,21	105,90
Kulon Progo	109,52	103,67	106,64	109,55	104,20	106,92	109,22	103,87	106,58	108,01	103,62	105,87
Gunungkidul	106,38	95,23	100,75	106,10	94,68	100,33	105,77	94,36	100,01	105,67	94,04	99,80
Sleman	142,58	96,98	116,43	117,70	115,22	116,50	118,58	114,37	116,53	119,63	114,93	117,34
DIY	122,74	101,30	111,44	116,78	106,19	111,46	116,97	105,95	111,43	114,89	108,56	111,78
APK Tingkat SMP												
Yogyakarta	142,45	131,65	136,93	136,90	125,35	131,00	147,01	135,77	141,25	148,73	148,82	148,78
Bantul	106,21	106,47	106,34	106,12	105,68	105,90	110,21	109,09	109,66	103,13	109,78	106,38
Kulon Progo	122,78	113,43	118,07	122,66	113,32	117,95	125,20	115,85	120,49	120,36	128,43	124,28
Gunungkidul	118,86	107,11	112,92	116,92	107,10	111,96	111,55	101,85	106,65	105,04	103,65	104,34
Sleman	128,89	102,28	114,43	115,49	113,34	114,43	114,75	112,57	113,68	112,83	114,65	113,72
DIY	121,50	109,69	115,47	117,01	111,67	114,36	118,16	112,80	115,50	113,99	116,90	115,43
APK Tingkat SMA												
Yogyakarta	137,23	125,66	131,23	134,69	125,72	130,04	134,52	124,81	129,49	122,67	125,82	124,23
Bantul	83,96	80,98	82,45	81,23	82,76	81,98	85,63	86,26	85,94	84,74	85,57	85,15
Kulon Progo	85,13	90,98	87,84	86,41	101,07	93,19	85,63	101,07	92,77	97,59	89,59	93,63
Gunungkidul	72,59	65,39	68,96	75,05	67,77	71,37	74,44	68,06	71,22	72,06	68,83	70,46
Sleman	85,12	68,64	75,72	75,02	78,19	76,61	74,70	78,39	76,56	75,27	79,47	77,35
DIY	91,43	83,04	87,06	87,92	88,32	88,12	88,57	89,00	88,79	87,83	88,24	88,04

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY

Dari periode 2009/2010 sampai dengan periode 2012/2013, beberapa catatan terkait APK adalah:

- Capaian APK SD DIY menunjukkan peningkatan dari 111,4 menjadi 111,78. Namun pada periode 2011/2012 terjadi penurunan dari 111,46 di periode 2010/2011 menjadi 111,43 di periode 2011/2012.
- Apabila dilihat dari capaian kabupaten/kota, periode 2012/2013 APK SD seluruh Kabupaten/Kota di DIY kecuali Kabupaten Gunungkidul mencapai di atas 100 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa banyak anak yang sekolah di SD umurnya diluar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun.
- Begitu pula APK SLTP juga diatas 100 persen. Karena banyak kita jumpai anak-anak yang usianya belum genap 7 tahun sudah sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun. Hal ini menyebabkan APK SD dan SMP diatas 100 persen. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA.
- Sedangkan untuk capaian APK SLTP DIY, terjadi penurunan dari periode 2011/2012 sebesar 115,50 menurun menjadi 115,43 di periode 2012/2013. Capaian APK SLTP tertinggi periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta sebesar 148,78 dan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 104,23.
- Capaian APK SLTA DIY juga mengalami penurunan dari 87,83 di periode 2011/2012 menurun menjadi 88,04 di periode 2012/2013. Capaian APK SLTA tertinggi periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta sebesar 124,23 dan terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar 70,46.
- Dari aspek gender, APK di DIY menunjukkan fakta yang menarik. Di beberapa jenjang pendidikan, APK laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan APK perempuan. Namun data historis menunjukkan dinamika, dimana untuk beberapa tahun, APK perempuan melebihi APK laki-laki, seperti di jenjang SLTP pada tahun 2012/2013, dan di jenjang SLTP sejak 2010/2011 hingga sekarang. Dinamika ini perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat apakah makna dari situasi ini, seperti terkait dengan putus sekolah bagi anak laki-laki dan perempuan dan apakah faktor yang menyebabkannya.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY tingkat SD, SLTP, dan SLTA periode 2009/2010 sampai dengan periode 2012/2013 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.13 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode 2009/2010 s/d Periode 2012/2013

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni											
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013		
	L	P	Rata2	L	P	Rata2	L	P	Rata2	L	P	Rata2
APM Tingkat SD												
Yogyakarta	130,30	113,41	121,55	130,49	113,29	121,59	131,45	113,66	122,24	124,29	121,49	122,93
Bantul	97,97	84,47	90,98	99,06	84,86	91,71	99,94	85,48	92,45	94,62	90,35	92,54
Kulon Progo	93,52	89,01	91,30	93,33	89,53	91,46	93,05	89,26	91,18	92,24	89,53	90,92
Gunungkidul	93,77	84,29	88,98	93,63	83,90	88,72	93,35	83,65	88,45	93,35	83,65	88,45
Sleman	121,99	83,35	99,83	101,77	99,92	100,87	103,12	99,96	101,58	103,31	99,77	101,59
DIY	106,26	88,03	96,65	101,31	92,54	97,15	102,19	92,93	97,53	100,02	94,97	97,54
APM Tingkat SLTP												
Yogyakarta	102,01	94,22	98,03	85,91	90,65	95,70	111,93	100,10	105,87	109,08	102,88	105,99
Bantul	81,11	80,74	80,93	71,29	72,16	71,71	74,34	74,99	74,65	75,51	76,06	75,78
Kulon Progo	90,33	85,73	88,01	90,24	85,64	87,92	86,85	82,13	84,47	81,94	83,19	82,55
Gunungkidul	80,87	73,72	77,26	81,49	75,06	78,24	77,05	70,95	73,97	74,55	68,46	71,47
Sleman	97,12	77,83	86,64	82,92	80,58	81,77	80,31	78,96	79,65	82,51	81,15	81,85
DIY	88,88	80,79	84,78	80,85	79,23	81,06	82,78	79,37	81,08	82,21	80,01	81,13
APM Tingkat SLTA												
Yogyakarta	102,69	89,63	95,92	90,49	86,04	88,18	89,94	86,42	88,11	86,83	90,50	88,65
Bantul	63,20	56,48	59,80	55,54	52,02	53,81	64,90	59,72	62,36	66,93	59,07	63,04
Kulon Progo	56,89	55,18	56,10	62,05	65,03	63,43	69,60	71,89	70,66	69,60	64,34	66,99
Gunungkidul	54,85	43,61	49,18	52,47	47,56	49,99	54,48	49,55	51,99	53,45	50,49	51,99
Sleman	54,78	46,89	50,28	53,02	55,09	54,06	52,91	55,15	54,04	52,77	57,39	55,06
DIY	65,44	56,65	60,87	60,94	59,66	60,30	64,31	62,58	63,45	64,13	63,17	63,65

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY

Secara umum dalam lima periode terakhir, situasinya adalah sebagai berikut:

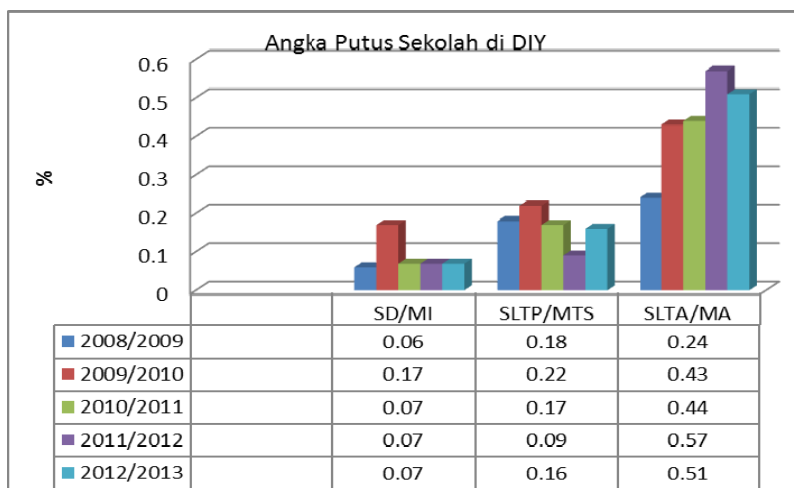
- Terjadi peningkatan APM di DIY untuk tingkat SD dan SMA.
- Menurut kabupaten/kota di DIY capaian APM tingkat SD periode 2012/2013 tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 122,93 dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 88,45.
- Untuk tingkat SMP, APM mengalami fluktuasi dari tahun 2010/2011 ke periode 2012/2013, setelah turun pada periode 2010/2011 namun kemudian membaik pada periode selanjutnya. Capaian APM tingkat SLTP periode 2012/2013 tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 105,99 dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 71,47.
- Untuk APM tingkat SLTA DIY, dalam lima periode terakhir mengalami kenaikan, walaupun sempat menurun pada periode 2010/2011. Capaian tertinggi APM tingkat SLTA periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 88,65 dan terendah di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 63,65.
- Di semua daerah dan semua jenjang pendidikan, APM laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan APM perempuan. Di jenjang SD, pada tahun 2012/2013, APM laki-laki adalah sebanyak 100,02% sementara perempuan hanya 94,97%. Begitu juga di tingkat SLTP, APM laki-laki adalah sebanyak 82,21% sementara APM perempuan adalah 80,01%. Di tingkat SLTA, angkanya adalah 64,13% untuk laki-laki dan 63,17% untuk anak perempuan. Seperti juga di banyak daerah, isu kesenjangan gender dalam pendidikan menjadi tantangan bagi Pemda DIY.

c. Angka Putus Sekolah.

Isu lain yang menjadi tantangan bagi peningkatan akses pendidikan adalah fenomena putus sekolah. Data tentang anak yang putus sekolah di DIY dari tahun 2008/2009 hingga 2012/2013 menunjukkan beberapa kecenderungan berikut ini:

- Pada jenjang SD/MI, terjadi fluktuasi angka putus sekolah dari 0,06% pada tahun 2008/2009 menjadi 0,17% pada tahun 2009/2010, namun turun lagi menjadi 0,07% pada tahun 2010/2011 hingga sekarang
- Pada jenjang SLTP/MTS, fluktuasi juga terjadi karena pada tahun 2009/2010, meningkat menjadi 0,22% dari sebelumnya hanya 0,18%, dan turun lagi menjadi 0,17% pada tahun 2010/2011, 0,09% pada tahun 2011/2012 dan naik lagi menjadi 0,16% pada tahun 2012/2013.
- Pada jenjang SLTA, trend nya menunjukkan pola yang perlu menjadi perhatian serius karena terus naik dari tahun ketahun. Bila pada tahun 2008/2009 adalah sebesar 0,24%, pada tahun 2009/2010 naik menjadi 0,43%, kemudian 0,44% pada tahun 2010/2011, naik kembali menjadi 0,57% pada tahun 2011/2012, namun kemudian turun menjadi 0,51% pada tahun 2012/2013.

Fluktuasi ini bisa dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 3.11 Angka Putus Sekolah di DIY Per Jenjang Pendidikan



Gambar 3.12 Fenomena Anak Putus Sekolah

Beberapa kasus memang terkait dengan faktor ekonomi, seperti banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah pada usia sekolah. Namun banyak faktor lain yang menjadi penjelasa putus sekolah, seperti ketersediaan akses dan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau. Saat ini, kita juga dihadapkan pada fenomena meningkatnya putus sekolah pada anak karena kejadian kehamilan yang tidak dikehendaki pada anak-anak. Kajian yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk menjawab akar persoalan dari angka putus sekolah ini.

d. Ketersediaan Sekolah

Bagian penting dari perluasan akses pendidikan adalah ketersediaan sarana pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah yang layak bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Data dalam di bawah ini menunjukkan bahwa untuk jenjang SD/MI, rasio gedung sekolah per 10.000 penduduk telah mengalami peningkatan pada tahun 2010, dari sebelumnya 71/10.000 penduduk menjadi 73/10.000 penduduk. Kondisi ini terjaga hingga tahun 2013. Namun untuk jenjang SLTP, mengalami fluktuasi karena mengalami penurunan pada tahun 2010 dari 37/10.000 penduduk menjadi 36/10.000 penduduk, walaupun sudah meningkat dan menjadi lebih baik pada tahun 2011 (menjadi 38/10.000 penduduk).

Tabel 3.14 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di DIY Tahun 2009-2013

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	2.009	2.009	2.017	2.009	2.010
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	281.389	276.343	277.987	275.046	277.023
1.3.	Rasio (Per 10.000)	71	73	73	73	73
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	509	507	507	517	526
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	136.595	139.763	134.311	133.163	136.356
2.3.	Rasio (Per 10.000)	37	36	38	39	39

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dan Data Pembangunan Daerah 2013

e. Rasio Guru Per Sekolah

Selain keberadaan gedung sekolah yang memadai, ketersediaan guru juga menjadi salah satu faktor penting dalam perluasan akses pendidikan. Rasio guru terhadap murid akan berkorelasi terhadap peningkatan akses dan pemenuhan hak warga atas pendidikan yang layak dan memadai. Tabel berikut menunjukkan bahwa di jenjang pendidikan dasar, rasio guru murid menunjukkan fluktuasi. Pada jenjang SD/MI, pada tahun 2010, terjadi lonjakan yang tinggi dari 76/1000 murid menjadi 89/1000 murid. Namun kemudian, rasionya mengalami penurunan pada tahun 2011 dan menurun lagi pada tahun 2013 menjadi hanya 85/1000 murid. Pada tahun 2013, rasionya adalah 85/1000 murid, atau setiap guru mengajar anak sekitar 12 murid.

Pada jenjang SLTP, fluktuasi juga ditunjukkan dengan kenaikan pada tahun 2010 dan 2011, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013. Saat ini, rasionya adalah 112/1000 murid, Di mana setiap guru mengajar anak sekitar 10.

Tabel 3.15 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di DIY Tahun 2009-2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	20.379	23.820	23.719	23.222	22.548
1.2.	Jumlah Murid (Pddk Usia 7-12 thn di Sedang Sekolah)	266.611	268.466	271.130	268.289	266.337
1.3.	Rasio (per 1.000)	76	89	87	87	85
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	13.131	12.971	12.684	12.634	12.834
2.2.	Jumlah Murid (Pddk Usia 13-15 thn di Sedang Sekolah)	115.590	113.185	108.851	108.029	114.186
2.3.	Rasio (per 1.000)	114	115	117	117	112

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY

Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, Pemda DIY memiliki beberapa program yang terkait sasaran ini pada tahun 2013, yaitu:

- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Menengah
- Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus
- Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olahraga
- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda Dan Olahraga
- Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda

Permasalahan:

- a. Sasaran perluasan aksesibilitas pendidikan perlu memperhatikan fluktuasi rasio guru dan murid serta ketersediaan gedung sekolah, karena dampaknya bagi kelancaran dan peningkatan kualitas belajar mengajar.
- b. Fluktuasi angka putus sekolah. Data DIY di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan perlunya perhatian untuk menjawab persoalan putus sekolah. Sebagian persoalan ini perlu dijawab dengan upaya sinergis lintas bidang dan juga lintas aktor, seperti menjawab persoalan pekerja anak ataupun putus sekolah karena kejadian kehamilan yang tidak dikehendaki.
- c. Disparitas antar kabupaten/kota, sebagaimana ditunjukkan dalam angka APM dan APK, perlu dijawab dengan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di berbagai kabupaten/kota.

Solusi:

- a. Pemerintah propinsi memiliki peran strategis untuk mengkoordinasikan program dan capaian kinerja antar kabupaten/ kota, termasuk untuk meminimalkan ketimpangan antar wilayah pada aspek pendidikan

- b. Kajian dan pengembangan strategi yang efektif untuk menjawab akar persoalan putus sekolah. Peran pemerintah bukanlah faktor tunggal namun menentukan karena menjadi katalisator dan fasilitator atas peran berbagai pihak baik unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Pemberian Beasiswa Retrieval, Bantuan Siswa Miskin, pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa, dan pemberian Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin untuk pelajar/mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

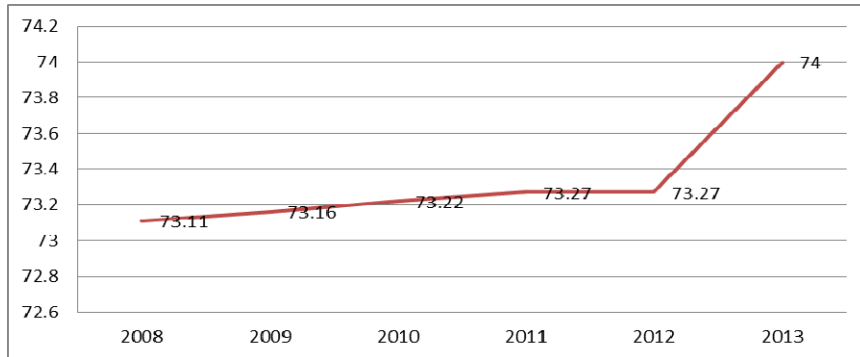
4. **Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat**

Sasaran untuk meningkatkan harapan hidup menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2013, capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan. Dari target 73,37 tahun, realisasi tahun 2013 menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk DIY mencapai 74 tahun atau 100,9% dari target kinerja, atau mencapai kinerja yang **sangat baik**. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 98,4% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2017, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Tabel 3.16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Harapan Hidup	73,37	73,37	74	100,9	74,55	98,4

Pencapaian AHH yang tinggi juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik juga akan sangat mempengaruhi. Gambar berikut menunjukkan trend yang baik bahwa dari tahun ke tahun, angka harapan hidup telah semakin meningkat. Bahkan data tahun 2013 menunjukkan capaian dan peningkatan yang signifikan dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup, yaitu meningkat menjadi 74 tahun dari sebelumnya 73,27 tahun.



Gambar 3.13 Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2008-2012

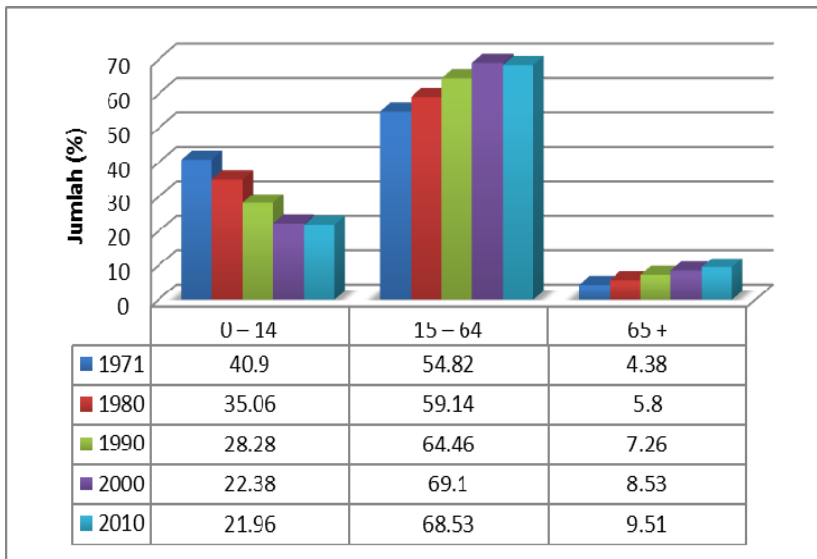
Selama kurun 30 tahun terakhir, angka harapan hidup penduduk DIY memang telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 1971, usia harapan hidup penduduk DIY adalah 53 tahun, kemudian menjadi 62 tahun pada tahun 1980, dan 67 tahun pada tahun 1990. Angkanya terus meningkat menjadi 71 pada tahun 2000 dan 74 pada tahun 2010. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan usia harapan hidup nasional yaitu 69 tahun.

Secara demografis, peningkatan usia harapan hidup menjadi bagian dari transisi demografi yang sebetulnya telah dimulai sejak tahun 90an, dengan peningkatan proporsi penduduk usia lanjut. Seyogyanya, transisi demografi ini perlu diikuti dengan perubahan kebijakan dan program/ kegiatan yang menjadikan isu-isu terkait kualitas hidup bagi lansia sebagai prioritas pembangunan.



Gambar 3.14 Angka Harapan Hidup di DIY Termasuk Tinggi

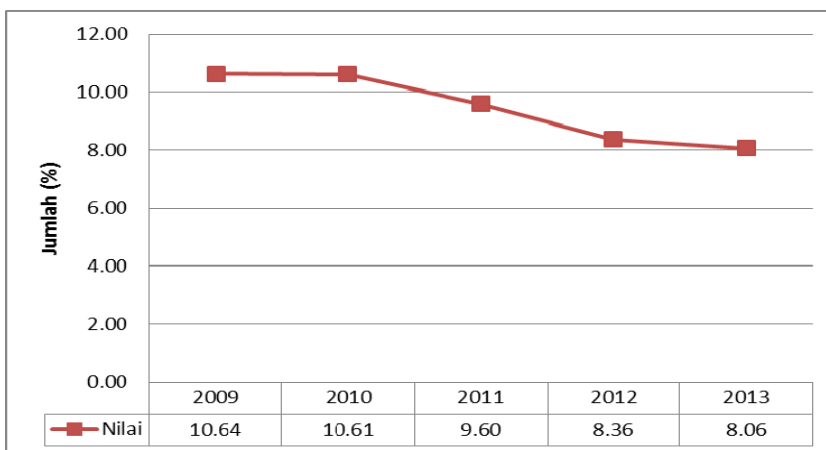
Selain penduduk usia lanjut, proporsi penduduk usia produktif juga semakin meningkat, yang juga dikenal sebagai bonus demografi. Pembangunan manusia dengan bertumpu pada bonus demografi perlu dikembangkan antara lain melalui pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan, dan pemerataan kesempatan kerja. Melalui cara-cara inilah, bonus demografi akan punya makna berarti untuk peningkatan status kesejahteraan rakyat. Proporsi penduduk berdasarkan kelompok umur bisa dilihat dalam tabel berikut ini.



Sumber: BPS DIY

Gambar 3.15 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY, 1971-2010

Beberapa trend juga menunjukkan dinamika dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat di DIY. Sebagai contoh adalah trend tentang prevalensi balita gizi kurang di DIY berikut ini:



Sumber: BPS DIY

Gambar 3.16 Trend Prevalensi Balita Gizi Kurang di DIY

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, angka prevalensi balita gizi kurang telah menunjukkan penurunan. Trend baik ini perlu di jaga di masa depan sebagai capaian penting pembangunan bidang kesehatan.



Gambar 3.17 Balita Sehat

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Ketersediaan tenaga dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi sudah di atas target Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014, namun masih di bawah ideal (1 dokter umum melayani 2.500 penduduk). Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di DIY, untuk setiap 1 orang dokter spesialis di DIY melayani 3.074 penduduk. Rasio tersebut sudah jauh di atas target Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 (9 per 100.000 penduduk). Sedangkan untuk dokter gigi, terdapat 608 dokter yang meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 597 orang. Rasio dokter gigi DIY per 100.000 penduduk sebesar 16,76.

Tabel 3.17 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk	3.426.637	3.501.374	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Jumlah Dokter Umum	1.304	773	1.358	1.214	1.378
Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	38,05	22,08	38,32	33,85	37,98
Jumlah Dokter Spesialis	931	789	1.245	1.354	1.180
Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	27,17	22,53	35,13	37,76	32,53
Jumlah Dokter Gigi	222	304	385	597	608
Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	6,48	8,68	10,86	16,65	16,76

Sumber : BPSProvinsi DIY dan Dinas Kesehatan DIY, diolah

*: Angka Sementara

Ketersediaan akses memadai pada sarana kesehatan juga bagian kunci dalam peningkatan usia harapan hidup. Hasil survey Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2008 menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk DIY lokasi tempat tinggalnya hanya berjarak 1-5 km terhadap puskesmas dan lebih dari 70% penduduk hanya berjarak 1-5 km terhadap rumah sakit dan dokter praktek swasta. Tidak ditemukan penduduk yang memiliki jarak tempuh lebih dari 10 km terhadap sarana pelayanan puskesmas, dokter praktek swasta dan bidan. Hal ini menunjukkan mudahnya akses dalam hal jarak jangkauan penduduk terhadap sarana pelayanan.

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2012 sebanyak 441 unit dengan rasio sebesar 0,122. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 8.131 penduduk. Sedangkan untuk proyeksi 2013, jumlah penduduk yang meningkat akan mempengaruhi rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk. Namun yang perlu menjadi perhatian, rasionya dari tahun ke tahun semakin menurun, dan ini menjadi tantangan ke depan bagi Pemda DIY.



Gambar 3.18 Puskesmas di DIY

Tabel 3.18 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk Tahun 2009-2012

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk	3.426.637	3.501.374	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Jumlah Puskesmas	118	120	121	121	121
Jumlah Puskesmas Pembantu	321	321	321	320	320
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	439	441	442	441	441
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0,128	0,126	0,125	0,123	0,122

Sumber : BPS Provinsi DIY dan Dinas Kesehatan DIY, diolah

*: Angka sementara

Selain Puskesmas, sarana kesehatan lain yang penting adalah rumah sakit. Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit di DIY dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Tidak ada penambahan jumlah rumah sakit di DIY dari tahun 2011 sampai dengan 2013 yaitu sebanyak 71 rumah sakit. Dengan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.627.821 jiwa, rasio rumah sakit per satuan penduduk di DIY tahun 2013 adalah sebesar 0,0196. Dengan kata lain, 1 rumah sakit di DIY melayani 51.096 jiwa.



Gambar 3.19 Rumah Sakit Sebagai Sarana Kesehatan di Yogyakarta

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY Tahun 2012-2013

Uraian	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Jumlah Rumah Sakit	71	71	71
Rumah Sakit Umum Pusat	1	1	1
Rumah Sakit Umum Daerah	7	7	7
Rumah Sakit Umum Swasta	52	52	52
Rumah Sakit Khusus	11	11	11
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0200	0,0198	0,0196

Sumber : BPS Provinsi DIY dan Dinas Kesehatan DIY, diolah

*: Angka Sementara

Selain itu, data penting yang terkait dengan pencapaian sasaran peningkatan angka harapan hidup adalah cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Di tahun 2013, sebanyak 66,49% penduduk telah memiliki jaminan kesehatan.

Tabel 3.20 Cakupan Jaminan Kesehatan

No	Kab/kota	Askes komersial	Askes	Jam	Askeskin /Jamkesmas
1	Kota	8,351	66,183	45,427	68,456
2	Bantul	7,591	92,209	17,075	222,987
3	Kulon progo	3,381	45,349	1,122	141,893
4	Gunungkidul	2,143	45,318	949	340,635
5	Sleman	46,671	141,263	39,891	168,158
	Jumlah	68,137	390,322	104,464	942,129
No	Kab/kota	Jamkesos	Jamkesda	Total	Jumlah penduduk
1	Kota	17,452	171,799	377,668	477,926
2	Bantul	17,086	89,185	446,133	951,756
3	Kulon progo	24,570	132,599	348,914	470,486
4	Gunungkidul	60,475	204,394	653,914	718,443
5	Sleman	26,503	215,384	637,870	1,088,187
	Jumlah	146,086	813,361	2,464,499	3,706,798

Program yang telah dilakukan oleh Pemda DIY untuk peningkatan usia harapan hidup pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan Kesehatan Lansia
- b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapeljamkesos
- d. Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita
- e. Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja
- f. Program Pembinaan Kesehatan Ibu
- g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- h. Program Pelayanan Kesehatan
- i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
- j. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- k. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- l. Program Pembiayaan kesehatan
- m. Program pengelolaan persampahan
- n. Program pengembangan pengelolaan air minum
- o. Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
- p. Program pengurangan kawasan kumuh
- q. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak

- r. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- s. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- t. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- u. Program Pelayanan dan Perlindungan Anak bermasalah sosial
- v. Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar
- w. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
- x. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Permasalahan

- a. Meningkatnya usia harapan hidup memunculkan isu baru terkait dengan persoalan kependudukan, seperti isu kesejahteraan bagi lansia, termasuk layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi lansia.
- b. Penerapan pola perilaku hidup bersih dan sehat untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum sepenuhnya baik. Termasuk didalamnya adalah pola umum gizi seimbang (PUGS), kesehatan lingkungan (sanitasi dan akses air bersih), pencegahan penyakit menular, aktifitas fisik, dan penggunaan obat
- c. Walaupun rasio sarana dan prasarana kesehatan sudah melampaui standar nasional, data dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi (pada rasio dokter dan dokter spesialis per satuan penduduk) dan penurunan rasio sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas dan rumah sakit). Hal ini perlu menjadi perhatian upaya pembangunan kesehatan, termasuk yang diselenggarakan oleh pihak swasta, untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat
- d. Implementasi BPJS untuk jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara per 1 Januari 2014 menimbulkan beberapa tantangan, termasuk di wilayah DIY. Berbagai tantangan ini mencakup proses integrasi antara berbagai skema jaminan kesehatan yang sudah ada sebelumnya, sosialisasi kebijakan yang belum optimal ke segenap lapisan masyarakat, hingga sistem pendukung untuk pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya tersedia dan berjalan.

Solusi

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Hal ini bisa dilakukan antara lain melalui pemberdayaan masyarakat melalui posyandu, desa/kelurahan siaga, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan.
- b. Dalam konteks masyarakat Yogyakarta yang memiliki ikatan kekerabatan dan jejaring sosial yang kuat, pemenuhan hak lansia akan kesejahteraan dan jaminan sosial bisa dilakukan dengan mensinergikan program dan layanan yang disediakan pemerintah dengan upaya sejenis yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator diperlukan untuk memastikan adanya jaminan yang memadai bagi lansia atas hak-hak dasarnya untuk hidup secara layak dan bermartabat. Selain upaya perlindungan pemenuhan kebutuhan khusus, juga mencakup upaya untuk pengakuan dan

- membuka ruang partisipasi lansia dalam pembangunan. Upaya ini menjadi penting karena isu tentang pengabaian kapasitas lansia seringkali justru memperkuat kerentanan lansia itu sendiri. Faktanya, banyak potensi dan kapasitas lansia yang bisa dikuatkan dan dikembangkan sebagai salah satu pilar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Momentum bonus demografi harus di manfaatkan dengan penguatan pembangunan berbasis kependudukan, terutama melalui peningkatan *human capital* melalui peningkatan status pendidikan, kesehatan, pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Penting untuk diperhatikan bahwa sebagai daerah yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia adalah keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki DIY, dan karenanya, *human development* yang bukan hanya berorientasi pada aspek ekonomi namun juga peningkatan kapabilitas sosial, adalah pilihan strategi yang paling tepat untuk konteks DIY.
 - d. Upaya-upaya untuk penerapan universal coverage melalui program BPJS perlu disinergikan dengan pendayagunaan dan pemberdayaan baik aparatur pemerintah di wilayah DIY, organisasi masyarakat yang terkait maupun juga peran media massa untuk sosialisasi kebijakan yang efektif. Begitu juga integrasinya dengan sistem dan penyediaan layanan publik sehingga kualitas layanan kesehatan yang universal bisa didapatkan masyarakat secara baik dan memadai.

5. Sasaran Pendapatan Masyarakat Meningkat

Peningkatan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi –yang diwakili antara lain oleh pendapatan- tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri.

Peningkatan pendapatan juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian, penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan, peningkatan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri. Peran dari pihak non negara, seperti swasta dan masyarakat adalah pilar kunci yang menyumbang pada capaian peningkatan pendapatan.

Dalam IKU Gubernur 2013, peningkatan pendapatan ditargetkan naik dari Rp 6,68 juta per kapita per tahun menjadi Rp 7 juta per kapita per tahun. Realisasinya mencapai nilai pendapatan sebesar Rp 6,94 juta per kapita per tahun, atau sebanyak **99.14%** dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja yang sangat baik** untuk tahun 2013. Selain itu, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah menyumbang sebanyak 81,65% dari target akhir RPJMD untuk meningkatkan pendapatan sebanyak Rp8.5 juta per kapita per tahun pada tahun 2017.

Tabel 3.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pendapatan Masyarakat Meningkat

Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta).	6,68	7	6,94	99,14	8,5	81,65

Data historis juga menunjukkan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.22 Nilai PDRB per Kapita DIY, 2009-2013 (Rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2009	12.083.874	5.855.379
2010	13.030.767	6.010.224
2011	14.613.135	6.245.315
2012	16.350.082	6.680.202
2013	17.980.000	6.940.000

Sumber: BPS DIY

Walaupun sudah mencapai kinerja yang sangat baik, penting untuk melihat bagaimanakah situasi kemiskinan di DIY saat ini. Data menunjukkan bahwa angka penduduk miskin di DIY masih cukup tinggi. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2012 adalah sebanyak 565.350 orang atau sebesar 15,88% dari total penduduk DIY. Perhatian akan pentingnya upaya pengentasan kemiskinan yang perlu dilakukan adalah karena secara relatif, angka kemiskinan di DIY masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Tabel 3.23 Data Penduduk Miskin dari Tahun ke Tahun

Tahun	Kota/Urban		Desa/Rural		Jumlah Total	
	Jumlah (000)	%thd penduduk Kota	Jumlah (000)	%thd penduduk Desa	Jumlah (000)	% thd penduduk DIY
2005	340,30	16,02	285,50	24,23	625,80	18,95
2006	346,00	17,85	302,70	27,64	648,70	19,15
2007	335,30	15,63	298,20	25,03	633,50	18,99
2008	324,16	14,99	292,12	24,32	616,28	18,32
2009	311,47	14,25	274,31	22,60	585,78	17,23
2010	308,36	13,38	268,94	21,95	577,30	16,83

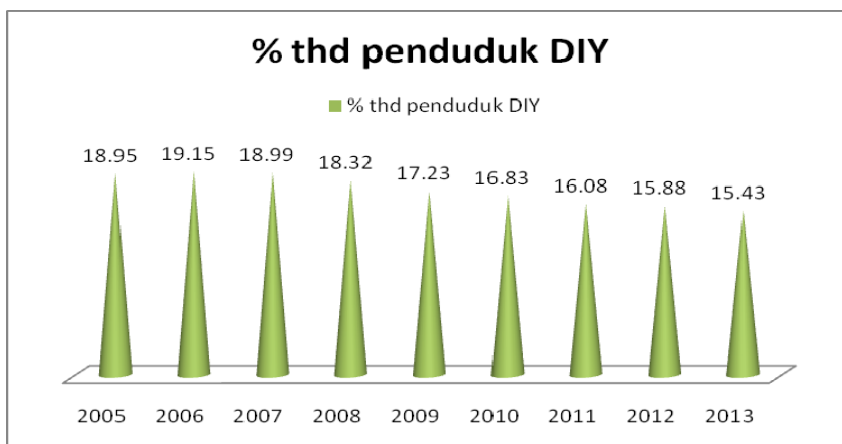
Tabel 3.23 Data Penduduk Miskin dari Tahun ke Tahun

Tahun	Kota/Urban		Desa/Rural		Jumlah Total	
	Jumlah (000)	%thd penduduk Kota	Jumlah (000)	%thd penduduk Desa	Jumlah (000)	% thd penduduk DIY
2011	304,34	13,16	256,55	21,82	560,88	16,08
2012	305,34	13,13	259,44	21,76	565,35	15,88



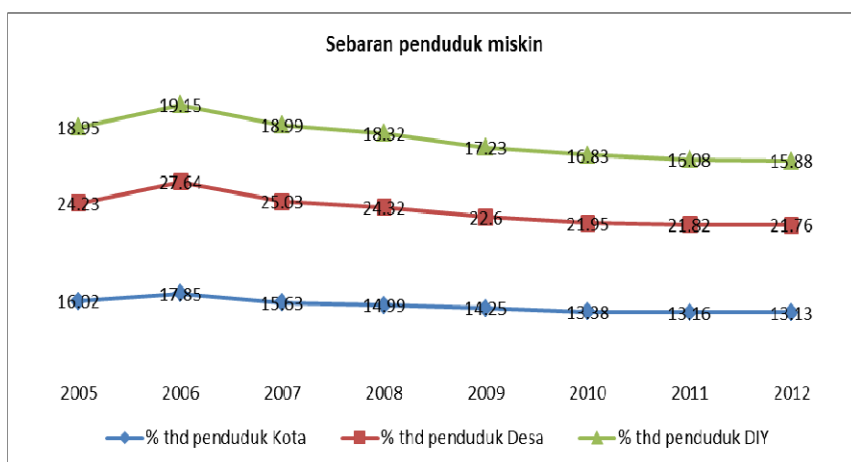
Gambar 3.20 Kemiskinan di DIY

Data tahunan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin di DIY dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin di DIY telah berkurang menjadi 15,43%. Hal ini ditunjukkan oleh grafik berikut ini:



Gambar 3.21 Trend Persentase Penduduk Miskin di DIY, 2005-2013

Di lihat dari sebarannya, persentase penduduk miskin di kawasan perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di kawasan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk miskin masih berada di wilayah pedesaan. Hal ini bisa dipahami karena penduduk pedesaan memiliki akses layanan publik yang lebih rendah, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian di mana nilai produk pertanian telah semakin menurun. Karenanya, penduduk pedesaan memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Grafik berikut menunjukkan sebaran dan trendnya dari tahun ke tahun.



Gambar 3.22 Sebaran Penduduk Miskin, Desa, dan Kota

Sasaran peningkatan pendapatan juga terkait dengan kesempatan dan angkatan kerja. Data tahunan menunjukkan bahwa rasio penduduk yang bekerja memiliki

kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, walaupun pernah mengalami penurunan pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2013, data sementara menunjukkan bahwa rasio penduduk yang bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja adalah 96.66%.

Tabel 3.24 Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja di DIY Tahun 2008-2013

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Penduduk yang Bekerja	1.892.205	1.895.648	1.775.148	1.798.595	1.867.708	1.847.070
Angkatan Kerja	1.999.734	2.016.694	1.882.296	1.872.912	1.944.858	1.910.959
Rasio Penduduk yang bekerja	94,62	94,00	94,31	96,03	96,03	96,66

Sumber : Dinas Nakertrans DIY

*: Angka sementara

Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat juga penting untuk melihat kontribusi sektor unggulan di DIY terhadap perekonomian DIY. Ukuran yang digunakan adalah besarnya kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB DIY. Dikatakan sektor unggulan apabila kontribusinya terhadap nilai PDRB DIY dari waktu ke waktu secara konsisten relatif besar. Di DIY terdapat empat sektor yang mendominasi perekonomian DIY yaitu sektor jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Karenanya, upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat perlu dikembangkan dengan memperhatikan kontribusi sektor unggulan di atas, sehingga akan menjadi lebih efektif.

Capaian yang sudah diuraikan di muka menunjukkan kinerja yang sudah dicapai oleh DIY tahun 2013. Peran pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat telah dilakukan melalui program-program berikut ini:

- Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan pemerataan pertumbuhan Investasi
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar
- Program perlindungan dan pemberdayaan bagi Korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial psikologis, dan korban trafficking
- Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial L
- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya *)
- Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial
- Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

- j. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- k. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
- l. Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
- m. Program Pengembangan Bina Keluarga
- n. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- o. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- p. Program Transmigrasi Regional
- q. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Upaya peningkatan pendapatan untuk mendorong pengentasan kemiskinan juga perlu dilakukan dengan memfokuskan program penanggulangan kemiskinan di wilayah yang menjadi kantong kemiskinan. Sinergi program pengentasan kemiskinan termasuk dengan pihak non pemerintah dilakukan untuk menguatkan fokus program pengentasan kemiskinan sebagaimana nampak dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3.23 Sinergi Arah Pembangunan Kewilayahan dan Pengentasan Kemiskinan

Permasalahan:

- a. Walaupun angka kemiskinan telah semakin menurun dari tahun ke tahun, namun laju penurunannya juga menunjukkan kecenderungan yang lebih lambat. Ini menunjukkan bahwa target pengurangan angka kemiskinan menjadi semakin tidak mudah untuk dicapai.
- b. Masih lebih tingginya angka kemiskinan di kawasan pedesaan. Data-data tahunan telah mengkonfirmasi akan situasi ini, yang bisa menunjukkan akses pelayanan publik dan pasar yang masih terbatas untuk masyarakat di kawasan pedesaan.
- c. Masih belum kuatnya sinergi antara upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang dilakukan pemerintah dengan upaya yang dilakukan oleh pihak lain seperti swasta. Walaupun.

Solusi:

- a. Menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan, termasuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Ke depan, strategi ini bisa disinergikan dengan kerangka dan otonomi desa sebagai bagian dari pengesahan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Strategi ini juga perlu disinergikan sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep dan kerangka keistimewaan untuk menjadikan desa sebagai pusat budaya, termasuk budaya dalam pengertian yang luas yang juga mencakup sumber penghidupan masyarakat. Konsep desa sebagai pusat budaya dan pertumbuhan dan kontribusi sektor jasa dan pariwisata juga bisa dilakukan dengan menumbuhkan desa wisata sebagai bagian dari strategi peningkatan pendapatan masyarakat.
- b. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong akses terhadap layanan publik dan pasar yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan pedesaan. Dengan cara ini, upaya menjawab tingginya persentase penduduk miskin di kawasan pedesaan bisa dilakukan dengan lebih efektif dengan manfaat berupa peningkatan pendapatan masyarakat.
- c. Sinergi program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan di DIY, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Dalam kaitan dengan peningkatan pendapatan, sederhana untuk memahami bahwa kontribusi pihak non pemerintah khususnya swasta sangatlah besar. Namun ini tidak menutupi peran kunci pemerintah untuk menjamin akses yang setara dan memberikan perlindungan sosial bagi setiap warga negara untuk memiliki sumber penghidupan yang layak dan bermartabat.
- d. Strategi peningkatan pendapatan dengan pemanfaatan bonus demografi yang ditandai dengan proporsi penduduk usia produktif yang tinggi. Hal ini bisa disinergikan dengan upaya peningkatan human capital melalui peningkatan status pendidikan dan kesehatan masyarakat.

6. Sasaran Ketimpangan Antar Wilayah Menurun

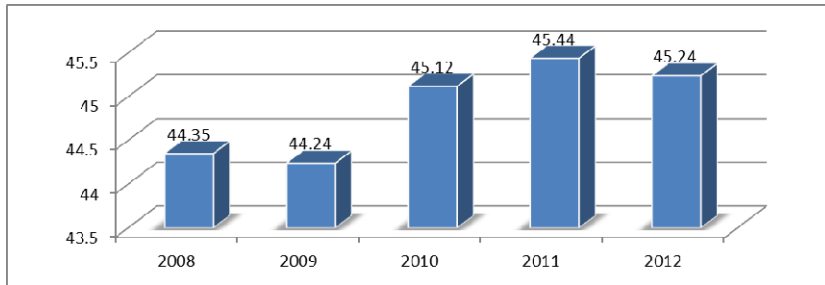
Isu kesenjangan antar wilayah menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan. Kesenjangan ini bisa berimplikasi lebih jauh karena menunjukkan distribusi akses dan manfaat pembangunan yang tidak setara. Isu kesenjangan bisa menjadi faktor yang menjelaskan mengapa target-target pembangunan bisa tidak terealisasi, karena ada wilayah yang menghadapi kendala yang lebih tinggi untuk mengakselerasi pembangunan. Identifikasi atas isu kesenjangan yang tepat juga menjadi pijakan awal untuk merumuskan strategi yang efektif, karena dibutuhkan strategi yang tepat dan sesuai untuk menjawab konteks yang berbeda-beda antar wilayah.

Data capaian IKU untuk penurunan kesenjangan antar wilayah digambarkan dalam tabel berikut ini. Pada tahun 2013, realisasi indeks ketimpangan wilayah mencapai angka 0,4547 atau 99,62% dibandingkan target yang ditetapkan. Dengan capaian ini, kinerja yang dicapai telah masuk **kriteria sangat baik**. Bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini juga telah menyumbang sebanyak 98,55% dari target 0,4481 pada tahun 2017.

Tabel 3.25 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Ketimpangan Antar Wilayah Menurun

Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	0,4524	0,453	0,4547	99,62	0,4481	98,55

Ketimpangan antar wilayah di DIY ditunjukkan oleh Indeks Williamson, yang mana semakin tinggi angkanya, menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang juga semakin lebar. Data pada periode 2008-2012 menunjukkan tren terjadinya peningkatan Indeks Williamson yaitu dari 0,4435 pada tahun 2008 menjadi 0,4524 tahun 2012. Namun demikian, Indeks Williamson pada tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun 2011 yang sebesar 0,4544. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar kabupaten/kota di DIY semakin menyempit walaupun belum terlalu signifikan.



Sumber: Analisis PDRB DIY, Bappeda DIY

Gambar 3.24 Indeks Williamson DIY, 2008-2012

Capaian di atas diraih melalui beberapa program yang dilakukan oleh Pemda DIY pada tahun 2013. Beberapa program tersebut adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
- b. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
- c. Program Peningkatan Jalan & Jembatan
- d. Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur
- e. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- f. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya
- g. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- h. Program Pembinaan, pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
- i. Program Pengembangan Perumahan
- j. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi



Gambar 3.25 Kekeringan di Kabupaten Gunungkidul

Capaian-capaian dari program yang sudah dilaksanakan di atas juga bisa dilihat dari beberapa indikator seperti ketersediaan infrastruktur yang telah membaik di kawasan pedesaan, seperti sarana jalan, sarana sanitasi, dan pengembangan perumahan yang layak huni.

Pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius. Setiap tahun diperkirakan terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan

keluarga baru rata-rata sekitar 6.325 unit rumah. Pembangunan/pengembangan unit baru diharapkan akan meningkat sebesar 2,5% per tahun hingga tahun 2020. Berdasarkan data SUSENAS tahun 2007 masih terdapat 91.200 keluarga yang belum memiliki rumah yang layak huni. Dari jumlah tersebut yang tidak layak huni terbagi sebanyak 40% di pedesaan dan 60% di perkotaan. Dinas PU-P dan ESDM pada tahun 2011 mengidentifikasi terdapat 91.200 rumah tidak layak huni (RTLH).



Sebelum Peningkatan Kualitas



Sesudah Peningkatan Kualitas

Gambar 3.26 Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul

Penanganan sampai dengan tahun 2013 dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dari sisi penyediaan rumah yang layak huni melalui pembinaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan pemberian bantuan stimulan. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan perbaikan RTLH sejumlah 4.911 dan pada tahun 2013 sejumlah 1.234 unit. Perwujudan rumah sehat juga dilakukan melalui upaya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pemenuhan akan rumah secara swadaya, maka Pemerintah DIY setiap tahun memfasilitasi dengan memberikan stimulan bahan bangunan kepada komunitas perumahan.

Pembangunan unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam rangka penataan kawasan kumuh di perkotaan telah mencapai 24 unit sampai dengan tahun

2013. Keseluruhan pembangunan Rusunawa bersumber dari APBN sedangkan untuk pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebaran Rusunawa yang ada di DIY sebagian besar berlokasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Adapun peruntukan penggunaan dari Rusunawa tersebut adalah untuk; masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, dan pendidikan.

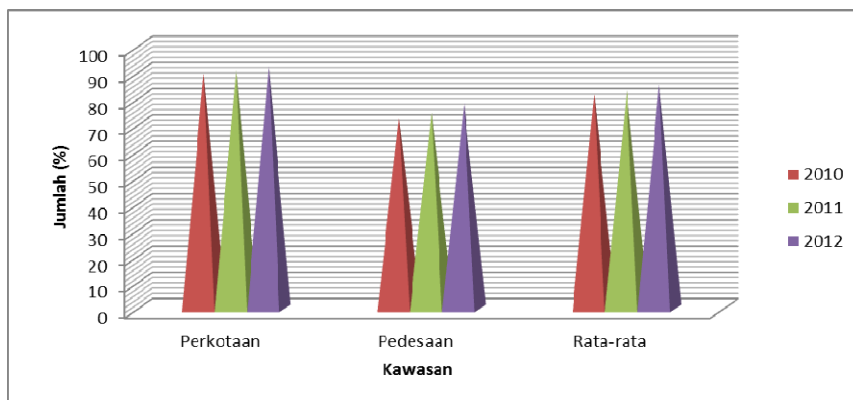
Selain itu juga telah dilakukan upaya penataan kawasan kumuh. Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Berdasarkan kajian dari NUSSP Tahun 2009 bahwa kawasan kumuh di DIY sebanyak 69 kawasan yakni di Kabupaten Bantul sebanyak 9, Kabupaten Kulonprogo 10, Kabupaten Gunungkidul 9, Kabupaten Sleman 12 dan Kota Yogyakarta 29 yang terdiri dari 107 titik lokasi kumuh.

Tabel 3.26 Persentase Lokasi Kumuh Yang Telah Ditangani

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase lokasi kumuh yang telah ditangani (%)	2,8	5,6	8,4	11,2	14
Jumlah lokasi kumuh yang telah ditangani	3	3	3	3	3
Jumlah lokasi kumuh (titik)	107	107	107	107	107

Sumber: Bappeda DIY, 2013, diolah

Terkait dengan sarana sanitasi dan cakupan rumah tangga dengan kondisi sanitasi yang layak, data menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan sanitasi yang layak telah meningkat dari tahun ke tahun, seperti data tahun 2010 sampai 2012, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Namun demikian, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan bagi DIY ke depan. Pada tahun 2012 misalnya, jumlah rumah tangga dengan sarana sanitasi layak di kawasan perkotaan adalah sebanyak 92,94%, sementara di kawasan pedesaan, baru mencapai 78,15%. Upaya-upaya pengurangan kesenjangan dengan memfokuskan pembangunan rumah dan sarana sanitasi layak di kawasan pedesaan harus menjadi prioritas bagi pembangunan ke depan.



Gambar 3.27 Persentase Rumah Tangga dengan Sarana Sanitasi Layak

Upaya mengatasi ketimpangan antar wilayah juga menjadi prioritas dalam pembangunan daerah dengan pengembangan wilayah pesisir secara terpadu, mengingat wilayah pesisir DIY merupakan daerah tertinggal dan miskin. Perencanaan tata ruang harus mengakomodir kebijakan tersebut, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan daya dukung lingkungan. Salah satunya adalah strategi pembangunan baru di kawasan Pantai Selatan, yakni kegiatan yang memanfaatkan potensi adanya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan antara lain rencana pembangunan Bandara Baru, pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, pembangunan pabrik Pig Iron dan Konsentrat Biji Besi dan pengolahan pasir besi yang mempengaruhi kegiatan dan guna lahan di Kawasan Pantai Selatan. Strategi ini tergambar dalam peta berikut ini.



Gambar 3.28 Peta Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan

Permasalahan:

- Pengembangan kawasan pesisir selatan dihadapkan dengan tantangan dinamika sosial masyarakat menyangkut proses pembebasan lahan dan juga keterkaitan dengan aktivitas ekonomi produktif masyarakat. Isu utama yang diangkat adalah sejauh mana strategi yang merupakan kegiatan penanaman modal dengan pelibatan pihak pemodal asing ini akan bisa bersinergi dengan kebutuhan masyarakat lokal yang hidup dari aktivitas ekonomi tradisional seperti pertanian lahan kering.
- Seperti juga terkait sasaran peningkatan pendapatan, peran pemerintah bukanlah menjadi faktor tunggal dalam upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah. Namun demikian, ini tidak mengurangi peran strategi pemerintah untuk menjadi katalisator dan fasilitator, dengan memberikan dukungan kebijakan, mengembangkan proteksi sosial bagi kelompok marjinal dan mengembangkan pusat pertumbuhan baru.

Solusi:

- Pengembangan kawasan dan pembukaan kawasan pertumbuhan baru perlu dilakukan dengan mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas pada publik, dan perlindungan terhadap usaha ekonomi lokal. Proses dialog dalam pengembangan kebijakan dan kawasan pertumbuhan baru seringkali membutuhkan waktu dan proses tambahan, namun strategi ini bukan hanya

menjadikan tujuan bisa dicapai namun juga meningkatkan legitimasi dan dukungan publik.

- b. Insentif untuk pihak-pihak non pemerintah untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan baru. Pihak non pemerintah ini bisa mencakup dunia usaha maupun juga inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal, sehingga pusat-pusat pertumbuhan baru akan bisa semakin didorong dan dikuatkan.

7. Sasaran Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun

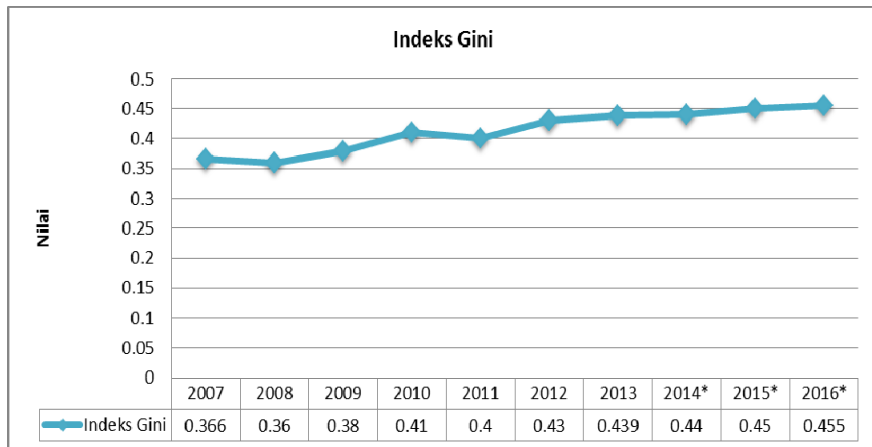
Salah satu indikator yang menjadi penanda ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Penurunan ketimpangan pendapatan yang berhasil dicapai tahun 2013 sudah mencapai 93,05% dari target, atau memiliki capaian **kinerja sangat baik**. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah mencapai 90,30% dari target indeks ketimpangan pendapatan sebesar 0,2878.

Tabel 3.27 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun

Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Ketimpangan Pendapatan	0,3194	0,298	0,3187	93,05	0,2878	90,30

Data yang ada di DIY menunjukkan bahwa indeks gini dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Ini bisa dimaknai bahwa kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat juga semakin melebar. Pada tahun 2013, indeks gini adalah 0,439, naik sedikit dari tahun 2012 sebesar 0,43.



Gambar 3.29 Indeks Gini DIY, 2007-2016

Upaya menjawab persoalan ketimpangan juga didorong oleh pengembangan skema keluarga sejahtera. Data Tabel Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2009–2011 menunjukkan bahwa jumlah KK Pra Sejahtera terus mengalami kenaikan, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera III. Dengan kata lain, upaya yang berfokus pada mereka yang berada pada garis terbawah (Pra sejahtera dan KSI) perlu terus dikuatkan ke depan.

Tabel 3.28 Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY, 2009-2011

No.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Tahun					
		2009		2010		2011	
		Jumlah KK	Persentase	Jumlah KK	Persentase	Jumlah KK	Persentase
1.	Pra S	174.534	18,35	187.277	20,15	225.823	24,30
2.	KS I	214.083	22,51	208.367	22,42	200.008	21,52
3.	KS II	222.674	23,41	198.237	21,33	146.038	15,72
4.	KS III	281.481	29,60	281.909	30,33	302.792	32,59
5.	KS III Plus	58.230	6,12	53.665	5,77	54.575	5,87
	Jumlah KK	951.002		929.455		929.236	

Sumber : BKKBN DIY, diolah

Kondisi dan capaian di atas, merupakan hasil dari serangkaian program untuk menurunkan kesenjangan pendapatan. Pada tahun 2013, program yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah:

- Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan pemerataan pertumbuhan Investasi
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar

- d. Program perlindungan dan pemberdayaan bagi Korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial psikologis, dan korban trafficking
- e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial L
- f. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya *)
- g. Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- h. Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial
- i. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
- j. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- k. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
- l. Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
- m. Program Pengembangan Bina Keluarga
- n. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- o. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- p. Program Transmigrasi Regional
- q. Program Transmigrasi Regional

Permasalahan:

- a. Kapasitas dan kondisi wilayah yang berbeda membutuhkan strategi dan pendekatan yang berbeda. Perbedaan ini bukan hanya pada aspek persoalan ketimpangan yang ada di masyarakat, namun juga dalam hal kapasitas pemerintah daerah.
- b. Cakupan keluarga dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani oleh pemerintah masih sedikit. Padahal data tentang keluarga pra sejahtera dan sejahtera I justru makin meningkat. Koordinasi dengan pihak non pemerintah, dan pelibatan keluarga dan penyandang masalah kesejahteraan sosial harus dilakukan sebagai bagian dari strategi dan pencapaian sasaran pengurangan kesenjangan pendapatan.

Solusi:

- a. Penguatan peran pemerintah propinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengkonsolidasikan upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah, termasuk dari sumber-sumber pembiayaan dari pusat (APBN).
- b. Keterlibatan keluarga dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam program dan kegiatan untuk pengurangan kesenjangan pendapatan. Keterlibatan

ini juga perlu disinergikan dengan keberadaan skema perlindungan sosial yang sudah ada di masyarakat, seperti skema arisan sambil mendorong peran pemerintah yang lebih kuat untuk inklusi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam kehidupan sosial masyarakat. Melibatkan mereka sebagai pihak kunci akan jauh lebih efektif dibandingkan memposisikan mereka sebagai sumber masalah.

8. Sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat

Pengembangan kepariwisataan di DIY mendapatkan prioritas utama, bersama dengan sektor pendidikan dan kebudayaan, dalam Visi Pembangunan DIY Tahun 2025 yang mewujudkan DIY sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, Sejahtera.



Gambar 3.30 Paket Wisata Pedesaan di DIY

Capaian IKU tahun 2013 menunjukkan bahwa realisasi kunjungan wisatawan nusantara jauh melebihi target yang dipatok. Pada tahun 2013, realisasi jumlah wisatawan nusantara adalah sebanyak 2.602.074 wisatawan. Angka ini mencapai 123,13% dibandingkan target yang dipasang. Capaian ini juga telah melampaui target akhir RPJMD (106,75%) dari target sebanyak 2.437.614 wisatawan pada tahun 2017. Dengan capaian ini, kinerja pencapaian IKU tahun 2013 adalah **sangat baik**.

Begitu juga capaian IKU tahun 2013 untuk peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan bahwa realisasi kunjungan wisatawan nusantara jauh melebihi target yang dipatok. Pada tahun 2013, realisasi jumlah wisatawan nusantara adalah sebanyak 2.602.074 wisatawan. Angka ini mencapai 123,13% dibandingkan target yang dipasang. Capaian ini juga telah melampaui

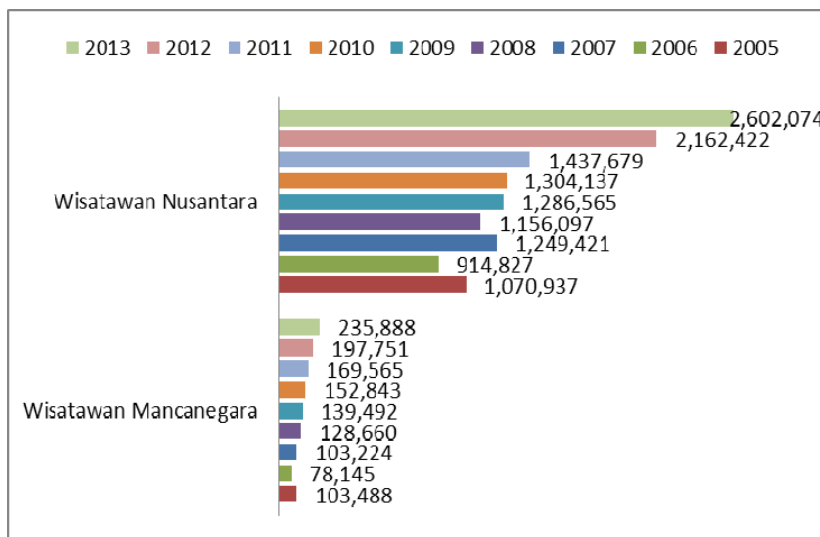
target akhir RPJMD (106,75%) dari target sebanyak 2.437.614 wisatawan pada tahun 2017. Dengan capaian ini, kinerja pencapaian IKU tahun 2013 adalah **sangat baik**.

Tabel 3.29 Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat

Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah wisatawan nusantara.	2.162.422	2.113.314	2.602.074	123,13	2.437.614	106,75
Jumlah wisatawan mancanegara.	197.751	212.518	235.888	111,50	245.198	96,20

Perkembangan pariwisata ini menunjukkan capaian yang menggembirakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tingkat kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara menunjukkan trend kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung oleh beragamnya potensi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta baik potensi alam, budaya, serta berbagai potensi wisata lainnya. Kondisi ini tentunya memberikan nilai tambah dan daya saing yang semakin kuat baik secara nasional maupun internasional

Trend jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegara nampak dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.31 Trend Jumlah Wisatawan

Jumlah wisatawan nusantara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun sempat mengalami fluktuasi seperti pada tahun 2006 dan 2008. Begitu juga dengan jumlah wisatawan mancanegara yang walaupun sempat menurun pada tahun 2006, trend nya menunjukkan kecenderungan positif dengan peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa DIY semakin diakui sebagai tujuan destinasi wisata baik di tingkat domestik maupun di skala global. Pertumbuhan pariwisata DIY ini juga didorong peningkatan penyelenggaraan *Meetings Incentives Conferencing Exhibitions* (MICE). Tercatat pada tahun 2013 terdapat penyelenggaraan 13.695 MICE di hotel berbintang DIY. Jumlah ini meningkat 6,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan infrastruktur hotel dan ruang pertemuan lainnya yang semakin meningkat dari sisi kuantitas dan kualitasnya.

Capaian positif di atas juga merupakan hasil dari beberapa program Pemda DIY tahun 2013 berikut ini:

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- e. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY
- f. Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan
- g. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Permasalahan:

- a. Potensi pariwisata DIY sebetulnya sangat terbuka dan masih mungkin dikembangkan lagi. Namun, salah satu hambatan adalah membangun sinergi antara event-event budaya dengan pola distribusi dan kalender musim pariwisata. Terdapat bulan-bulan dimana jumlah wisatawan meningkat seperti liburan sekolah atau liburan hari raya dan akhir/ awal tahun. Pengelolaan event budaya yang disinergikan dengan momentum seperti ini akan bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang lebih banyak lagi
- b. Pentingnya sektor pariwisata juga bisa dilihat dari dukungan dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan nilai, keragaman dan kekayaan budaya yang ada. Namun demikian, upaya-upaya ini masih perlu disinergikan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah, seperti dukungan kebijakan dan sarana-prasarana yang akan menjadi *enabling environment* bagi inisiatif masyarakat dalam pengembangan wisata berbasis budaya
- c. Seiring peningkatan kunjungan wisatawan, dinilai tingkat pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata yang profesional belum memadai sesuai dengan jumlah dan karakteristik wisatawan yang semakin beragam

Solusi:

- a. Memperluas pilihan wisata dengan memperbaharui destinasi wisata termasuk destinasi baru yang beragam
- b. Sarana pendukung untuk meningkatkan kepuasan wisatawan, seperti sarana transportasi, ataupun sarana dan prasarana yang lain
- c. Pelembagaan partisipasi masyarakat dan dukungan bagi inisiatif masyarakat dalam pengembangan sarana dan destinasi wisata

Seperti juga capaian positif untuk peningkatan jumlah wisatawan nusantara, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara juga merupakan hasil dari beberapa program Pemda DIY tahun 2013 berikut ini:

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- e. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY
- f. Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan
- g. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

9. Sasaran Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Meningkat

Selain menarik lebih banyak wisatawan yang datang, lama tinggal wisatawan juga menjadi sasaran penting karena akan berkontribusi terhadap kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan. Secara ekonomi, lama tinggal yang lebih lama memberikan kesempatan untuk peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat dari sektor ini.

Di tahun 2013, lama tinggal wisatawan nusantara ditargetkan sebanyak 2 hari per wisatawan nusantara. Target ini dipatok naik sebanyak 5% dibandingkan capaian tahun 2012. Realisasinya pada tahun 2013 menunjukkan capaian sebanyak 1,59 hari per wisatawan atau sebanyak 79,50% dibandingkan target. Capaian ini juga berarti 61,15% dibandingkan target pada akhir RPJMD yaitu sebanyak 2,6 hari. Pencapaian ini juga bermaka **kinerja baik** untuk pencapaian sasaran 11 dalam IKU tahun 2013.

Di tahun 2013, lama tinggal wisatawan mancanegara ditargetkan sebanyak 2,15 hari per wisatawan nusantara. Target ini dipatok naik sebanyak 5,9% dibandingkan capaian tahun 2012. Realisasinya pada tahun 2013 menunjukkan capaian sebanyak 1,90 hari per wisatawan atau sebanyak 88,37% dibandingkan target. Capaian ini juga berarti 70,63% dibandingkan target pada akhir RPJMD yaitu sebanyak 2,69 hari. Pencapaian ini juga bermaka **kinerja baik** untuk pencapaian sasaran 11 dalam IKU tahun 2013.

Tabel 3.30 Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Meningkat

Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	1,9	2	1,59	79,50	2,6	61,15
Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	2,03	2,15	1,90	88,37	2,69	70,63

Dalam pengembangan destinasi telah dilakukan kegiatan pembangunan sarana prasana destinasi wisata, peningkatan standarisasi pelaku usaha pariwisata dan pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata menjadi perhatian

pembangunan pariwisata DIY mengingat potensi serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, melalui program pengembangan kemitraan, dilakukan kegiatan penyelenggaraan event dan fasilitasi penyelenggaraan event untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata di DIY. Strategi penyelenggaraan event dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat atau komunitas.



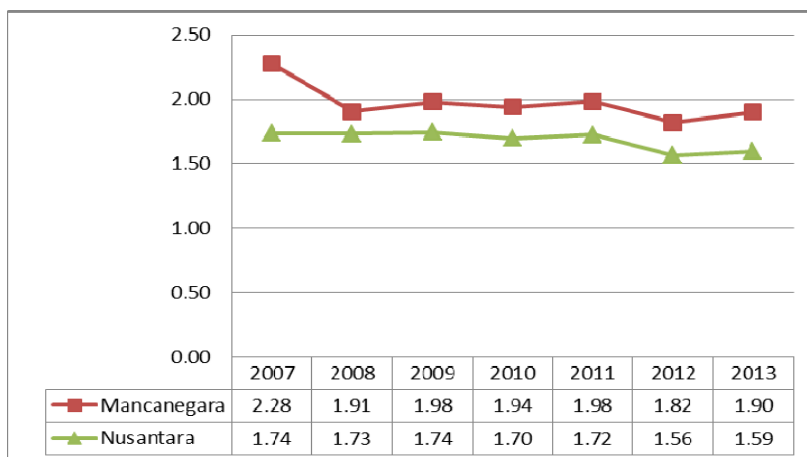
Gambar 3.32 Wisata di Pesisir Pantai Selatan DIY



Gambar 3.33 Keramahan Yogyakarta

nusantara adalah 1.59 hari sementara wisatawan mancanegara lebih lama tinggal yaitu 1.9 hari.

Infrastruktur jalan yang bagus, sikap ramah tamah dan lingkungan yang nyaman diharapkan mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan sehingga akan meningkat kesejahteraan para pelaku industri wisata di Yogyakarta. Data historis tentang lama kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara berfluktuasi, walaupun cenderung naik pada tahun 2013. Pada tahun ini, lama kunjungan wisatawan



Gambar 3.34 Lama Kunjungan Wisatawan

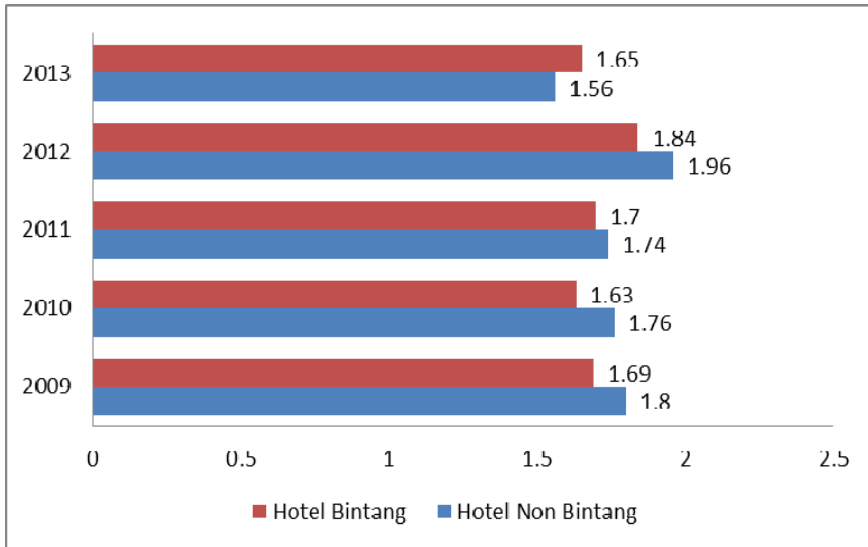
Apabila dilihat dalam tabel di bawah ini, untuk wisatawan mancanegara, terdapat kecenderungan yang menarik, yaitu terjadi pergeseran pilihan akomodasi pada tahun 2012. Jika sebelumnya lama tinggal wisatawan yang memilih di hotel berbintang lebih lama dibandingkan mereka yang tinggal di hotel melati, namun pada tahun 2012, justru sebaliknya. Pada tahun 2012, mereka yang memilih tinggal di hotel melati memiliki waktu tinggal yang lebih lama dibandingkan yang memilih hotel berbintang.

Tabel 3.31 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan di DIY, 2009-2013

Akomodasi	Tahun					
	2009		2010		2011	
	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
Hotel Non Bintang	1.8	1.8	1.86	1.76	1.82	1.74
Hotel Bintang	2.02	1.69	1.96	1.63	2.02	1.7
Akomodasi	Tahun					
	2012			2013		
	Wisman	Wisnus		Wisman	Wisnus	
Hotel Non Bintang	1.98	1.96		1.98	1.96	
Hotel Bintang	2.09	1.84		2.09	1.84	

Sumber: Dinas Pariwisata DIY

Lama tinggal wisnus dan wisman ini tergambar dalam grafik berikut ini. Yang menarik, terdapat kecenderungan bahwa hotel non bintang menjadi semakin signifikan perannya, terutama bagi wisatawan mancanegara. Ini bisa menjadi indikasi meningkatnya komunitas wisatawan backacker yang semakin banyak. Komunitas ini biasanya menyukai destinasi yang menarik baik dari aspek budaya maupun juga alam/ lingkungan.



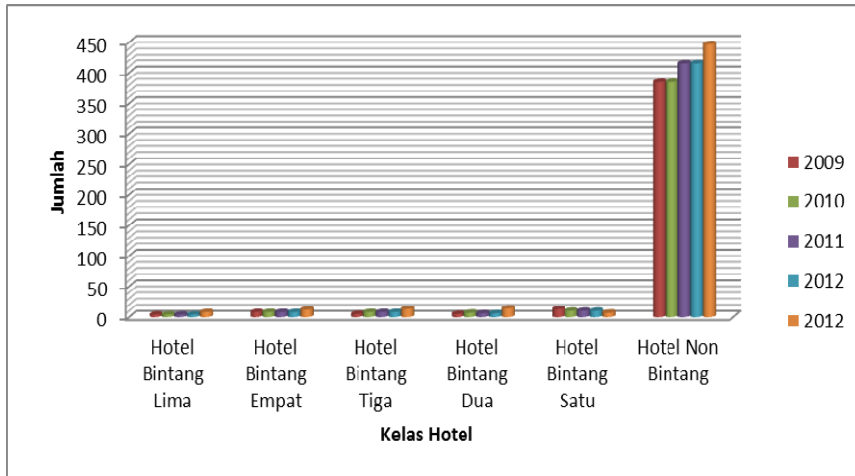
Gambar 3.35 Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Hal yang senada juga terjadi pada sisi penawarannya, dimana walaupun perkembangannya bervariasi, namun terjadi peningkatan jumlah hotel yang cukup besar pada kelas hotel non bintang. Sebaliknya, jumlah hotel bintang satu dan bintang tiga justru mengalami penurunan jumlah. Pada tahun 2013, jumlah hotel non bintang adalah sebanyak 447 buah.

Bandingkan dengan hotel bintang lima yang hanya 8 buah, hotel bintang empat sebanyak 12 buah, hotel bintang tiga sebanyak 13 buah, hotel bintang dua sebanyak 14 buah dan hotel bintang satu sebanyak 7 buah. Hal ini bisa menandakan bahwa preferensi akomodasi ke sarana penginapan yang lebih ekonomis adalah kecenderungan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.



Gambar 3.36 Hotel di Yogyakarta



Sumber: SIPD DIY, 2013

Gambar 3.37 Jumlah Hotel Berbintang dan Non Berbintang di DIY, 2009-2013



Gambar 3.38 Cagar Budaya Istana Ratu Boko

Seperti juga upaya peningkatan jumlah wisatawan, salah satu daya tarik untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan adalah pengelolaan dan promosi terkait tentang bangunan cagar budaya. Bangunan Cagar Budaya merupakan satu kesatuan filosofis dan sejarah yang dalam pelestariannya perlu dipertimbangkan sehingga ada keseimbangan arkeologis, historis dan kekhasan masing-masing kawasan cagar budaya. Kekayaan BCB di DIY menduduki peringkat ketiga nasional setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kawasan Cagar Budaya di DIY

ada 13 Kawasan, dan yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya di DIY yaitu Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Kotabaru, Kotagede, Imogiri, yang lain menjadi kewenangan pusat (Prambanan dan Ratu Boko) dan kabupaten (Ambarketawang, Ambarbinangun, Parangtritis, Sokoliman).

Terdapat sebanyak 13 kawasan cagar budaya di wilayah DIY yang tersebar di Kab. Bantul sebanyak 2 kawasan cagar budaya, di Kab. Gunungkidul sebanyak 1 kawasan cagar budaya, di Kab. Sleman sebanyak 3 kawasan cagar budaya, di Kota Yogyakarta sebanyak 6 kawasan cagar budaya. Museum yang tersebar di DIY ada sekitar 38 museum yang tersebar di Kab Bantul sebanyak 5, Kab. Gunungkidul sebanyak 1, Kab. Sleman sebanyak 12, dan Kota Yogyakarta sebanyak 20, yang sudah masuk Barahmus ada 32

Museum. Keseluruhan koleksi yang ada di 38 museum tersebut sekitar 68.217 buah benda cagar budaya. Dari 38 museum tersebut, museum Ullen Sentalu dan museum Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum internasional. Museum merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai budaya luhur kepada masyarakat. Melalui museum masyarakat dapat memahami nilai-nilai luhur sejarah bangsa di masa lalu yang dapat diterapkan di masa sekarang.

Kelestarian cagar budaya di DIY dilindungi oleh Pemerintah Pusat melalui UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Pemerintah Daerah memperkuat melalui Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi tiga nasional. Sampai pada tahun 2012 benda cagar budaya terdapat 715 buah, yang ditetapkkan sudah mencapai 521

buah. Jumlah kawasan cagar budaya ada 16 buah, baru 6 buah yang ditetapkan melalui SK Gubernur. Juru Pelihara BCB dan situs di DIY ada 4 orang. BCB dan situs ada yang menyebar di Kawasan-Kawasan Cagar Budaya, ada yang parsial di berbagai tempat, dan ada pula yang tersimpan di museum.



Gambar 3.39 Cagar Budaya Watugudig di Kotagede



Gambar 3.40 Museum Ullen Sentalu

Tabel 3.32 Kawasan Cagar Budaya

No	Kawasan Cagar Budaya	SK Penetapan
1	Kraton	SK Gubernur 2011
2	Puro Pakualaman	SK Gubernur 2011
3	Kotagede	SK Gubernur 2011
4	Imogiri	SK Gubernur 2011
5	Kotabaru	SK Gubernur 2011
6	Malioboro	SK Gubernur 2011
7	Ambarketawang	SK Bupati
8	Ambarbinangun	SK Bupati
9	Pleret	Situs, dalam proses penetapan
10	Sokoliman	Situs, dalam proses penetapan
11	Prambanan	SK Menteri
12	Ratu Boko	SK Menteri
13	Parangtritis	Situs, dalam proses penetapan

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Tabel 3.33 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, 2009-2013

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013
Benda Cagar Budaya yang ditetapkan	511	511	515	521	521
Kawasan Cagar Budaya	12	13	13	16	16
Situs	96	96	96	96	96
Monumen Sejarah Perjuangan	44	44	44	44	44
Museum	34	34	38	42	42

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Program yang dilakukan untuk mendorong lama tinggal wisatawan antara lain adalah:

- Program Pengembangan Transportasi berbasis Keistimewaan
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Program Pengembangan Desa Wisata
- Program Pengembangan Kemitraan

Permasalahan:

- Dalam aspek destinasi pariwisata, sudah dilakukan pengembangan berbagai daya tarik wisata baru dan pemeliharaan berbagai daya tarik wisata yang sudah ada namun belum optimal
- Dalam hal kemitraan pariwisata, jejaring, kerjasama dan koordinasi yang sinergis (keterpaduan) antar pelaku pariwisata (stakeholder) terutama

pemberdayaan/keterlibatan masyarakat di sekitar daya tarik wisata masih dirasakan kurang intensif

- c. Pemeliharaan bangunan cagar budaya masih belum terkelola dengan baik. Ini bisa dilihat dalam kemunculan bangunan baru di dalam kawasan Cagar Budaya yang walaupun bisa menjadi faktor positif karena merupakan fasilitas pelengkap, juga bisa bersifat negatif jika kemunculannya tidak terkendali. Juga persoalan penegakan regulasi seringkali yang masih perlu dikuatkan ketika terjadi persoalan dengan pengembangan fasilitas pendukung di kawasan cagar budaya
- d. Keunikan, keindahan, kelangkaan BCB acapkali menjadi daya tarik bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pengrusakan dan pencurian, bahkan BCB yang tersimpan dalam museum pun terancam keselamatannya. BCB di DIY pun tidak luput dari ancaman itu. Perusakan BCB baik sengaja maupun tidak sengaja banyak terjadi.

Solusi

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan event-event kepariwisataan dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata dan lama tinggal wisatawan dengan strategi melibatkan komunitas/masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan memperhatikan lokasi, waktu, kualitas event dan strategi pemasaran yang tepat.
- b. Melakukan Peningkatan kualitas daya tarik wisata baru melalui pengembangan sarana prasana pariwisata, meningkatkan peran serta pelaku industri pariwisata maupun kelompok/masyarakat pengelola dan pengembangan paket-paket wisata yang lebih kreatif dan inovatif.
- c. Mengintensifkan jejaring, kerjasama dan koordinasi yang sinergis (keterpaduan) antar pelaku pariwisata (stakeholder) baik antar pelaku di dalam maupun luar DIY terutama dengan meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat di sekitar obyek / daya tarik wisata
- d. Meningkatkan kegiatan pelatihan, sertifikasi dan pengawasan mutu SDM pariwisata
- e. Sebagai salah satu destinasi wisata internasional, upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara adalah menjadikan Yogyakarta menjadi wilayah yang ramah dan terbuka, serta daya dukung seperti sarana dan prasarana wisata yang nyaman dan memadai. Sarana transportasi, perhotelan dan restoran, hingga informasi destinasi wisata yang bisa diakses oleh wisatawan mancanegara dengan beragam kebangsaan, akan menjadikan lama tinggal wisatawan bisa ditingkatkan.
- f. Bagi wisatawan mancanegara, bangunan cagar budaya menjadi salah satu daya tarik utama yang bersama dengan event-event budaya akan bisa meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara. Untuk menjadikan bangunan cagar budaya menjadi lebih terawat, pengembangan pariwisata perlu dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dan strategi pengentasan kemiskinan ataupun peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan strategi ini, pelibatan dan kontribusi masyarakat akan menjadi maksimal karena dirasakan manfaatnya

secara langsung oleh masyarakat. Pelibatan masyarakat ini juga bisa meminimalkan persoalan-persoalan seperti penegakan regulasi dan pengrusakan bangunan cagar budaya.

10. Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD DIY 2012-2017, perhatian DIY akan pentingnya akuntabilitas, bisa dilihat dalam rumusan misi ke-3 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

Capain kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan adalah nilai B untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, yang telah berhasil dicapai (100%), atau bernilai **kinerja sangat baik**. Dengan pencapaian ini, menyumbang 66,67% terhadap target akhir RPJMD yaitu mencapai nilai A pada tahun 2017. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi kinerja pemerintah daerah tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kemenpan tahun 2013, karena proses penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2013 sedang dalam proses.

Tabel 3.34 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	B	B	B	100	A	66,67

Menurut penilaian Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemda DIY adalah sebagai berikut:

- Pemda DIY meraih nilai 72.12 atau mencapai predikat B. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:
- Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Pemda DIY yang dievaluasi.
- Pemda DIY telah membangun akuntabilitas kinerja pada tingkat pemerintah provinsi dan SKPD dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang meliputi perencanaan, kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
- Secara umum, evaluasi atas kinerja Pemda DIY adalah baik, namun ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk perbaikan ke depan yaitu:

Tabel 3.35 Hasil Penilaian Akuntabilitas Pemda DIY Tahun 2012, Kemenpan-RB

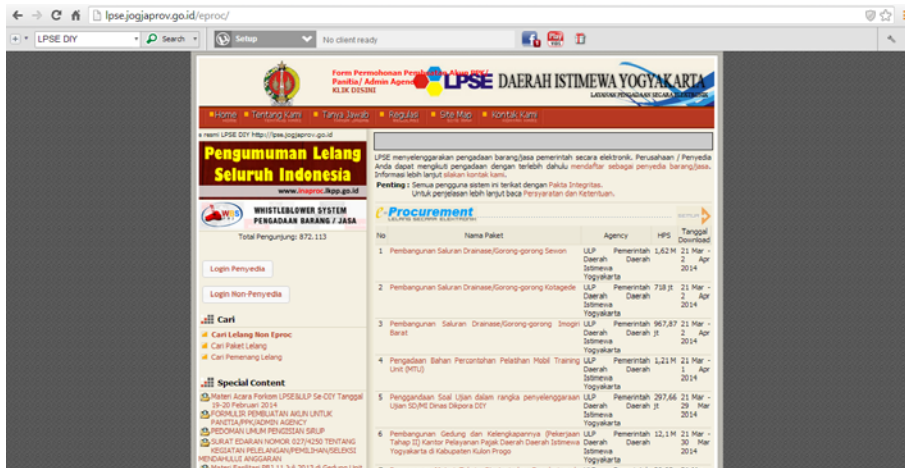
Aspek	Tantangan dan Rekomendasi
Perencanaan Kinerja	Keselarasn kegiatan dengan sasaran strategis organisasidalam dokumen Renstra, dan Renja SKPD masih perlu ditingkatkan
	Perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan Renja dan RKA SKPF khususnya dalam penentuan sasaran organisasi, indikator kinerja dan target kinerja
	Pemanfaatan monev berkala atas capaian penetapan kinerja belum dimanfaatkan optimal untuk mengarahkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
Pengukuran Kinerja	Sistem pengumpulan data kinerja yang dibangun SKPD sebagian belum dapat menghasilkan data kinerja yang cepat dan akuart
	Pemanfaatan pengukuran hasil kinerja secara berkala dan tahunan atas capaian IKU belum dimanfaatkan secara optimal oleh SKPD untuk umpan balik perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan
Pelaporan Kinerja	Lakip sebagian SKPD belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan dengan target kinerja jangka menengah
	Pemanfaatan informasi kinerja dalam LAKIP untuk perbaikan perencanaan kinerja secara berkelanjutan belum dilakukan secara optimal
Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja belum fokus dilakukan pada keberhasilan pencapaian target kinerja program tetapi masih terfokus pada penyerapan anggaran dan fisik kegiatan. Juga belum mengidentifikasi rekomendasi-rekomendasi untuk peningkatan kinerja program yang dilaksanakan
Capaian Kinerja	Pencapaian kinerja dinilai dari aspek pencpaaian target, dan keandalan data kinerja, serta keselarasan kinerja output dengan kinerja outcome Capaian kinerja bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial dan ekonomi sudah baik, juga kinerjan lainnya. Belum optimalnya ketercapaian outcome disebabkan masih ada sasaran yang tidak berorientasi hasil dan indikator kinerja yang tepat

Beberapa hal telah dilakukan oleh Pemda DIY untuk mendorong akuntabilitas juga bisa dilihat dari upaya menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Pemda DIY melalui Peraturan Gubernur Nomer 42 tahun 2006 telah menetapkan *Blueprint Jogja Cyber Province* yang dititikberatkan pada program *Digital Government Services* (DGS) sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.



Gambar 3.41 Kerangka *Digital Government Services (DGS)*

Dalam dokumen DGS yang telah diperbaharui, pada tahun 2013 direncanakan ada 10 program yang menjadi unggulan dalam pelaksanaan DGS dan telah tercapai. Seluruh program layanan sudah dikembangkan dengan pelayanan secara *on-line*. Beberapa program pendukung pelaksanaan DGS di Pemerintah Daerah DIY untuk pelayanan masyarakat dan pelayanan internal pemerintahan antara lain Portal Pemda DIY jogjaprov.go.id, LPSE (Pengadaan Barang Secara Elektronik), CPNS *On-line* (Penerimaan CPNS Secara Online), SIPKD (Sistem Informasi Penganggaran Keuangan Daerah), Web Monev, Jogja Plan, SIM Pegawai, SIM Perijinan Terpadu Pemda DIY, Sistem Informasi Jembatan Timbang, Sistem Informasi Perijinan online, dan lain sebagainya.



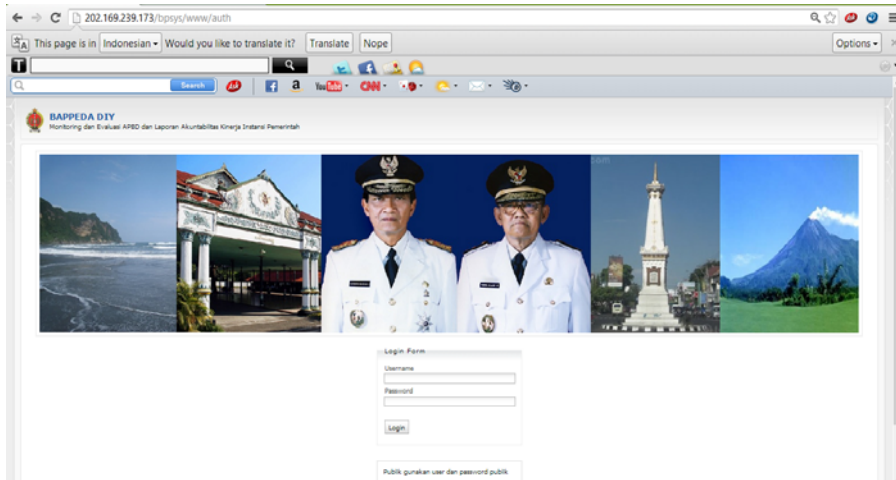
Gambar 3.42 LPSE DIY

Dengan konsep *e-government* tersebut, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraksi melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terlibat dan berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Konsep inilah yang dinamakan layanan teknologi berbasis *Citizen Centris*.

Pembangunan infrastruktur jaringan komputer di Pemerintah Daerah DIY telah dimulai sejak tahun 2002 dan telah mengalami pengembangan sampai saat ini. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksi tiap-tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga transformasi data dan informasi antar unit kerja dapat berjalan semakin lancar. Sampai dengan akhir tahun 2013, jaringan infrastruktur komputer Pemerintah Daerah DIY telah menghubungkan 104 titik lokasi di lingkup Pemerintah Daerah DIY dengan rincian :

- Menggunakan jaringan kabel fiber optic sejumlah 19 titik
- Menggunakan jaringan kabel HFC sejumlah 35 titik
- Menggunakan jaringan wireless sebanyak 50 titik

Dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan ini, partisipasi masyarakat juga didorong melalui pengembangan aplikasi dan ruang keterlibatan publik dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan. Masyarakat bisa mengakses informasi-informasi untuk pengendalian pelaksanaan pembangunan dengan masuk ke tautan monevapbd.jogjaprov.go.id. Dengan menggunakan user name dan password 'publik', masyarakat bisa mendapatkan informasi memadai tentang bagaimana pelaksanaan dan kinerja pembangunan di DIY untuk kurun waktu tertentu. Berikut adalah tampilan awal untuk akses publik tersebut:



Gambar 3.43 Web Monev APBD DIY (monevapbd.jogjaprov.go.id)

Dalam menu sistem integrasi ROPK, Monev APBD dan E-Sakip misalnya, masyarakat bisa mengakses informasi-informasi yang disajikan dalam menu monev APBD, e-sakip (sesuai Permenpan RB Nomer 29 tahun 2010), monv hibah dan Bansos, arsip monev APBD (yang bisa dipilih tahunnya), dan buku petunjuk serta buku petunjuk ROPK.

Program yang sudah dilakukan oleh Pemda DIY untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan pada tahun 2013 adalah:

- a. Program peningkatan kerjasama antar daerah
- b. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan
- d. Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan
- e. Program Peningkatan Pelayanan Publik
- f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
- h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- i. Program kerjasama Informasi dengan mass media
- j. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- k. Program Analisis Kebijakan Pembangunan
- l. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- m. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
- n. Program Pengembangan Data/Informasi

- o. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa,
- p. Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi
- q. Program fasilitasi pos telekomunikasi , Pengendalian frekuensi dan Informasi Publik
- r. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- s. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Permasalahan:

- a. Persoalan dengan pengembangan sarana-sarana untuk membuka transparansi dan akuntabilitas adalah sejauh mana sarana-sarana dan sistem informasi berbasis teknologi informasi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat
- b. Juga muncul pertanyaan, apakah skem yang tersedia sebagai sarana pengembangan akuntabilitas untuk menjangkau masyarakat yang tidak melek teknologi. Strategi ini juga penting karena proporsi masyarakat yang belum melek teknologi jumlahnya lebih banyak
- c. Juga penting untuk menggali, sejauh mana aplikasi dan data berbasis teknologi informasi ini telah dipakai sebagai pijakan perbaikan perencanaan tahun/ periode setelahnya

Solusi:

- a. Pemanfaatan informasi dan hasil analisis pengendalian untuk perbaikan kualitas perencanaan pada periode berikutnya
- b. Penyebarluasan informasi dan prosedur untuk penerapan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menjamin hak masyarakat dalam kebijakan public.

11. Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan

Sejalan dengan misi mendorong tata kelola pemerintahan yang baik yang menjadi misi ke-3 dalam RPJMD 2012-2017, penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja yang sudah diuraikan dalam sasaran ke-13 sebelumnya.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW),

Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk sasaran ke-14 ini, realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2013, target kinerjanya adalah pemeriksaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan hasilnya mencapai target ini. Dengan status pencapaian opini yang terbaik ini, maka kinerja sasaran ke-14 adalah **sangat baik**. Pencapaian ini, apabila dipertahankan, capaian ini juga sudah memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada tahun 2017 yaitu opini WTP. Sebagai catatan, sebagaimana realisasi untuk nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan di sasaran ke-13, realisasi ini juga merupakan capaian kinerja Pemda DIY untuk tahun 2012 yang dikeluarkan BPK pada tahun 2013. Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2013, masih dalam proses ketika laporan ini disusun.

Tabel 3.36 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat

Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Opini pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan. Hal ini meliputi penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan dalam dibuat oleh Pemda DIY. Juga penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Opini BPK atas laporan keuangan Pemda DIY tahun 2009-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37 Opini BPK Atas Laporan keuangan Pemda DIY, Tahun 2009-2012

Tahun	Opini BPK	Keterangan
2009	WDP	Aset belum dapat diyakini kewajarannya
2010	WTP	Paragraf penjelas berupa aset dinas PUESDM yang belum diserahkan
2011	WTP	Paragraf penjelas pencatatan dana bergulir belum sesuai SAP dan belum diberlakukannya penyusutan aset
2012	WTP	Tanpa paragraf penjelas

Sebagai bagian penting dari proses pemeriksaan, aspek pengendalian internal juga menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Melalui penyalarsan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan / kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut, sampai dengan bulan Desember 2013 telah dilakukan pemeriksaan reguler sebanyak 173 obyek pemeriksaan dan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2012 terhadap 34 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY. Hasil dari pemeriksaan tahun 2013 terdapat 480 temuan dengan 875 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti sejumlah 667 rekomendasi (76%). Adapun 208 rekomendasi (24%) belum ditindak lanjuti dan merupakan temuan pemeriksaan bulan Nopember dan Desember 2013 dan saat ini baru dalam proses tindak lanjutnya.

Program yang dilakukan Pemda DIY untuk sasaran ini pada tahun 2013 adalah:

- a. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah
- c. Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro
- d. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
- f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- g. Program Peningkatan Profesionalisma Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
- h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Permasalahan:

- a. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target dikarenakan beberapa hasil temuan yang harus ditindaklanjuti dapat dikoordinasikan sehingga tidak diperlukan penyelesaian tindak lanjut

Solusi:

- a. Penguatan pengawasan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemda DIY
- b. Meningkatkan koordinasi dalam pembinaan SAKIP.
- c. Meningkatkan intensitas koordinasi percepatan TLHP.
- d. Meningkatkan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP maupun BPK secara periodik untuk memacu penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

12. Sasaran Layanan Publik Meningkat, Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi Dan Akses Masyarakat Di Pedesaan.

Arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan penataan sistem transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna *mencapai load factor* angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% dan peningkatan akses di pedesaan. Untuk mendukung arah kebijakan ini telah ditetapkan 3 indikator kinerja (*outcome*) sebagai indikator capaian, yaitu:



Gambar 3.44 Kondisi Transportasi di Ruas Jalan Malioboro

- a. Penerapan manajemen lalu lintas berbasis kawasan
- b. Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta
- c. Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta

Selain ke-tiga indikator tersebut diatas, untuk mengarahkan arah kebijakan pembangunan di tahun pertama RPJMD 2012-2017, atau di pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2013, telah ditetapkan pula 6 indikator kinerja untuk mendukung capaian arahan pembangunan daerah yang menjadi urusan perhubungan. Sehingga, secara keseluruhan, terdapat 9 indikator kinerja yang ditetapkan sebagai indikator capaian pembangunan daerah untuk urusan perhubungan.



Gambar 3.45 Load Factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan DIY

Dalam realisasi tahun 2013, pencapaian IKU menunjukkan telah berhasil dicapainya 99,77% dari target kinerja atau memiliki pencapaian **sangat baik**. Dari load factor yang ditargetkan sebanyak 34,57%, realisasinya menunjukkan capaian sebanyak 34,49%. Pencapaian ini juga berarti mencapai 81,02% dari target akhir RPJMD pada tahun 2017.

Tabel 3.38 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Layanan Publik Meningkat Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi dan Akses Masyarakat di Pedesaan

Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat	30,66	34,57%	34,49%	99,77	42,57%	81,02

Data load factor berikut menggambarkan kecenderungan dari tahun ke tahun, baik untuk angkutan perkotaan maupun AKDP. Rata-rata untuk angkutan perkotaan menunjukkan peningkatan sejak tahun 2011, walaupun untuk AKDP, angkanya lebih bervariasi.

Tabel 3.39 Load Factor Angkutan Umum Perkotaan dan AKDP di DIY

Tahun	Angkutan Perkotaan (%)			Angkutan AKDP (%)
	Reguler	Trans Jogja	Rata - Rata	
2008	27,60	31,87	29,74	36,18
2009	27,29	33,60	30,45	32,40
2010	22,00	33,99	28,00	18,00
2011	24,01	38,26	31,14	23,00
2012	22,73	42,41	32,57	26,85
2013	20,21	48,77	34,49	34,79

Sumber :Dinas Perhubungan, Komunikasi, & Informatika DIY

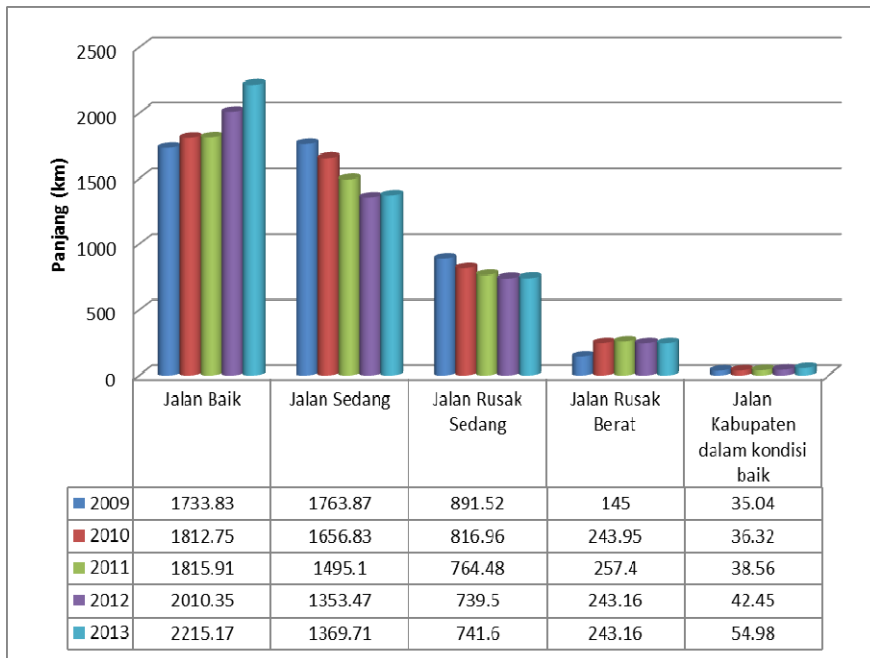
Load factor angkutan umum juga akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas jalan yang ada. Berdasarkan data tahunan, untuk data panjang jalan berdasarkan kelas, terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada jalan nasional yaitu dari 168,61 km pada tahun 2010 menjadi 223,16 km pada tahun 2011. Sebaliknya, untuk panjang jalan propinsi malah menurun pada tahun 2012 dan juga jalan kabupaten pada tahun 2013.

Tabel 3.40 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas dan Kondisi dalam Km

Panjang Jalan Berdasarkan Kelas dan Kondisi	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Panjang Jalan Berdasarkan Kelas					
1. Jalan Nasional	168.61	168.61	223.16	223.16	223.16
2. Jalan Propinsi	690.25	690.25	690.25	619.34	619.34
3. Jalan Kabupaten	4040.8	4040.8	4040.8	4040.8	3.656.23
Panjang Jalan Berdasarkan kondisi					
1. Jalan Baik	1.733..83	1.812.75	1.815.91	2.010.35	2.215.17
2. Jalan Sedang	1.763.87	1.656.83	1495.10	1.353.47	1.369.71
3. Jalan Rusak Sedang	891.52	816.96	764.48	739.50	741.60
4. Jalan Rusak Berat	145.00	243.95	257.40	243.16	243.16
5. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	35.04	36.32	38.56	42.45	54.98

Sumber: Dinas PUP & ESDMDIY, 2011

Sementara melihat kualitasnya, jalan dengan kualitas baik menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun ke tahun, sementara panjang jalan dengan kualitas sedang mengalami penurunan. Begitu juga panjang jalan dengan kualitas rusak sedang, juga mengalami penurunan. Untuk jalan dengan kondisi rusak berat, kecenderungannya juga meningkat walaupun berfluktuasi. Untuk jalan kabupaten dalam kondisi yang baik, jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Kecenderungan status jalan menurut kualitas bisa dilihat dalam grafik berikut ini.



Gambar 3.46 Status Jalan di DIY Menurut Kualitas

Program yang dilakukan pada tahun 2013 untuk sasaran ini adalah:

- Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa lalulintas
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal
- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi
- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,
- Program Inspeksi Kondisi Jalandan Jembatan

Permasalahan

- Banyaknya kegiatan yang sifatnya lintas sektoral maupun lintas kewenangan, bahkan juga kewenangan yang menjadi “domain” dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. Banyaknya angkutan perkotaan reguler non buy the service yang tidak melayani masyarakat baik dari sisi jam layanan yang tidak menentu maupun rute layanan yang dibiarkan kosong menyebabkan load factor angkutan perkotaan yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan;
- c. Banyaknya masyarakat yang masih enggan untuk menggunakan angkutan umum, menjadikan pergerakan lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta masih didominasi oleh kendaraan pribadi.

Solusi

- a. Melakukan penguatan koordinasi antar daerah dan pusat dan menjadikan target sasaran yang harus dicapai dalam capaian kinerja adalah target bersama;
- b. Me-redesign rute layanan angkutan umum perkotaan dan menjadikan angkutan umum perkotaan menjadi layanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah;
- c. Pengembangan angkutan umum yang nyaman dan masyarakat tentang pentingnya penggunaan angkutan umum. Juga penerapan kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi di jalan dengan berkolaborasi antar Pemerintah Kota dan Kabupaten.

13. Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup yang ditargetkan dalam IKU Gubernur 2013 telah menunjukkan capaian yang positif. Dari target sebanyak 3,14%, capaian tahun 2013 menunjukkan realisasi dalam jumlah yang sama (100%). Capaian ini juga menjadikan target capaian pada akhir tahun RPJMD terealisasi sebesar 20% dari target tahun 2017. Dengan pencapaian ini, kinerja DIY untuk sasaran ke 16 pada tahun 2013 adalah memenuhi **kriteria sangat baik**.

Tabel 3.41 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Indikator Kinerja	2012	2013			Capaian 2013 Terhadap 2017	Target 2017 (%)
		Target	Realisasi	Realisasi %		
Prosentase peningkatan kualitas lingkungan	2 %	3,14 %	3,14 %	100	20 %	15,72

Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan merupakan upaya yang perlu terus dilakukan karena merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu *pro poor*, *pro growth*, *pro environment* dan *pro gender*. Indikator yang digunakan dalam pembangunan lingkungan hidup di DIY adalah persentase peningkatan kualitas lingkungan,

sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD DIY 2012 – 2017. Untuk penghitungannya digunakan indikator peningkatan kualitas udara ambien dan peningkatan kualitas air sungai. Untuk kualitas udara ambien mendasarkan hasil pengukuran pada 5 kabupaten/kota, dengan parameter kunci yang digunakan hidro karbon (HC) dan karbon monoksida (CO). Untuk kualitas air sungai mendasarkan pada pengukuran pada 11 sungai yang mengalir di DIY, dengan parameter kunci yang digunakan *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD).

Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan di DIY untuk parameter udara didapat nilai bahwa untuk CO sebesar $716,15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan HC sebesar $117,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Secara lebih jelasnya hasil pengukuran kualitas udara terhadap zat pencemar yang memberikan kontribusi terhadap indikator peningkatan kualitas lingkungan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.42 Hasil Pemantauan Kualitas Udara

No.	Parameter Pencemaran Udara	Baku Mutu yang Ditargetkan	Satuan	Kondisi Eksisting Tahun 2013	Keterangan
1.	CO	< 11.140	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$716,15 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Mencapai Target
2.	HC	< 150	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$117,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Mencapai Target

Untuk kondisi kualitas air sungai di DIY pada Tahun 2013 berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan didapat hasil kumulatif zat pencemar adalah sebesar 9,96 mg/l untuk parameter BOD dan 20,28 mg/l untuk parameter COD. Secara lebih jelasnya hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.43 Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai

No.	Parameter Pencemaran Air Sungai	Baku Mutu yang Ditargetkan	Satuan	Kondisi Eksisting Tahun 2013	Keterangan
1.	BOD	< 10	mg/l	9,96 mg/l	Mencapai Target
2.	COD	< 50	mg/l	20,28 mg/l	Mencapai Target

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai perhitungan untuk parameter pencemaran udara (CO dan HC) maupun pencemaran air sungai (BOD dan COD) masih berada dibawah ambang batas yang ditargetkan. Apabila dikorelasikan dengan indikator prosentase peningkatan kualitas lingkungan di DIY dengan skema perhitungan bahwa masing-masing nilai hasil uji kualitas udara maupun uji kualitas air pada Tahun 2013, maka angka hasil uji tersebut secara kumulatif merupakan rerata perhitungan secara menyeluruh sebesar 3,14%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan capaian terhadap indikator prosentase peningkatan kualitas lingkungan hidup di DIY pada Tahun 2013 tercapai.

Meskipun demikian beberapa permasalahan terkait peningkatan aktivitas sumber pencemar domestik dan industri di DIY masih membutuhkan perhatian, mengingat masih banyaknya aktivitas hunian pada tepi sungai sebagai salah satu kontributor terhadap sumber pencemar air sungai di DIY.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemda DIY untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2013, program yang dilakukan oleh Pemda DIY adalah sebagai berikut:



Gambar 3.47 Pemukiman Padat di Sekitar Sungai Code

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan LH
- e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Permasalahan:

- a. Peningkatan aktifitas transportasi akibat peningkatan aktivitas perekonomian dan bisnis memang terus diupayakan penataannya dan, kondisi ini juga menyebabkan meningkatnya pencemaran udara terutama parameter CO, NO₂, HC dan partikulat pada titik-titik tertentu di wilayah perkotaan.
- b. Adanya anggapan dari sebagian para pelaku usaha (penanggungjawab usaha dan atau kegiatan) serta masyarakat bahwa untuk melakukan pengolahan limbah cair (IPLC) dari proses produksi memerlukan biaya yang mahal sehingga menghambat investasi dalam pengembangan usaha. Hal ini merupakan tantangan dalam upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air sungai, khususnya parameter BOD (kondisi saat ini masih fluktuatif kualitasnya).
- c. Masih terbatasnya jumlah kelompok masyarakat yang peduli lingkungan serta terbatasnya pemahaman terhadap pentingnya menjaga kualitas kesehatan lingkungan, sehingga menyebabkan replikasi percontohan/demplot pengelolaan lingkungan (biogas, IPLC, Komposter) belum bisa berjalan secara baik. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, terutama kandungan bakteri koli dalam air sungai dan air tanah masih tinggi.

- d. Belum adanya kesadaran perusahaan dalam pengelolaan lingkungan terbukti masih banyak perusahaan yang belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang menjadi kewajiban perusahaan, sehingga kecenderungan adanya pelanggaran dari perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan dan menimbulkan masalah/dampak terhadap lingkungan.

Solusi:

- a. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk membuat peraturan sebagai tindak lanjut tentang pengendalian pencemaran udara dengan mewajibkan setiap sumber bergerak (kendaraan bermotor) untuk melakukan uji emisi, kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan upaya perbaikan sistem transportasi dan mendorong pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) maupun jalur hijau.
- b. Melakukan upaya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi, sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha (penanggungjawab usaha/kegiatan) serta menjalin kerjasama yang kondusif sesuai dengan kapaitas dan kewenangannya.
- c. Mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan edukasi dan fasilitasi pembangunan IPLC komunal bagi masyarakat yang menjadi kewajibannya sesuai dengan regulasi yang berlaku (Perda Limbah Domestik)
- d. Pembinaan yang intensif terhadap perusahaan agar kewajiban-kewajibannya dilaksanakan dengan baik sehingga potensi dampak bisa dikendalikan. Pembinaan dalam pelaksanaan kewajiban yang tertuang dalam dokumen RKL-RPL dan juga pelaporannya.
- e. Mendorong Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk lebih tegas terhadap kegiatan usaha yang melakukan pelanggaran tata ruang. Dalam memberikan izin Kabupaten/Kota perlu lebih berhati-hati dan para penanggungjawab usaha/kegiatan diwajibkan untuk menyusun dokumen lingkungan terlebih dahulu sebelum memulai membangun/konstruksi untuk kegiatan/usahanya.

14. Sasaran Pemanfaatan Ruang Terkendali

Undang–Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka Pemerintah Daerah DIY juga telah melakukan Penataan Ruang yang didasarkan pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

Sesuai dengan kewenangan dalam pengaturan penataan ruang, rencana tata ruang yang harus disusun sebagai tindak lanjut regulasi penataan ruang yang lebih atas dengan kaidah berjenjang dan komplementer, adalah rencana detail tata ruang pada kawasan strategis provinsi. Rencana detail tata ruang tersebut sebagai instrumen

pedoman operasional untuk pemberian perijinan pemanfaatan ruang, terutama bagi Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perkotaan Yogyakarta yang merupakan kawasan strategis nasional, dan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung bawahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun Kabupaten/Kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Dari target kinerja untuk sasaran pemanfaatan ruang, pencapaian untuk tahun 2013 menunjukkan hasil yang positif. Dari target kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW kab/ kota dan RTRW provinsi yang meningkat sebanyak 50%, capaiannya adalah sebanyak 63,25%. Indikator ini diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini berarti 70,28% dari target kinerja akhir RPJMD sebanyak 90%.

Kesesuaian penggunaan lahan tersebut dapat dilihat berdasarkan data kesesuaian lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY dan kondisi eksisting Tahun 2013 dibandingkan pula dengan Tahun 2012. Secara lebih jelasnya data kesesuaian lahan Tahun 2012 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.44 Kesesuaian Lahan dengan RTRW DIY Tahun 2012

No.	Kabupaten/Kota	Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Luas Total
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	Kota Yogyakarta	758.22	1,951.92	539.95	3,250.08
2	Kabupaten Sleman	29,628.69	9,532.55	18,321.04	57,482.28
3	Kabupaten Bantul	10,220.91	14,275.74	26,188.35	50,685.00
4	Kabupaten Kulon Progo	18,958.92	22,332.15	17,335.93	58,627.00
5	Kabupaten Gunungkidul	84,807.19	12,046.85	51,682.03	148,536.07
	TOTAL	144,373.93	60,139.20	114,067.30	318,580.43

Sumber : DPUP-ESDM DIY, Tahun 2012

Kesesuaian lahan Tahun 2013 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.45 Kesesuaian Lahan dengan RTRW DIY Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Luas Total
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	Kota Yogyakarta	1,258.21	1,951.93	39.95	3,250.08
2	Kabupaten Sleman	33,714.93	504.93	23,262.14	57,482.00
3	Kabupaten Bantul	26,838.42	13,408.25	10,438.33	50,685.00
4	Kabupaten Kulon Progo	33,800.58	12,332.15	12,494.27	58,627.00
5	Kabupaten Gunungkidul	105,883.70	2,046.85	40,605.45	148,536.00
TOTAL		201,495.84	30,244.10	86,840.14	318,580.08

Sumber : DPUP-ESDM DIY, Tahun 2012

Capaian ini menjadikan kinerja untuk IKU ke-17 untuk DIY tahun 2013 ini masuk dalam **kriteria sangat baik**.

Tabel 3.46 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pemanfaatan Ruang Terkendali

Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	45%	50%	63,25%	127,86	90%	70,28

Luas total ruang wilayah di DIY yang telah dimanfaatkan sebesar 318.085,75Ha. Pada tahun 2013, luas wilayah yang pemanfaatan ruangnya sesuai dengan RTRW Provinsi dan Kab/Kota sebesar 201.495,85 Ha, sehingga sampai dengan Tahun 2013 persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi sebesar 63,25%, atau tercapai sebesar 127,86%.

Permasalahan

- Sampai saat ini ketersediaan produk perencanaan terkait tata ruang sudah sesuai target, namun masih perlu didukung ketersediaan regulasi yang lebih detail yang perlu ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang.
- Masih kurangnya PPNS Tata Ruang di Kabupaten/Kota sebagai perangkat pelaksana pengendalian pemanfaatan ruang, serta pelaksana sosialisasi ketaatan terhadap rencana tata ruang kepada masyarakat.

Solusi

- Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut penyusunan kebijakan yang lebih operasional (RDTR & PZ) sebagai turunan

dari RTRW DIY untuk dapat dijadikan dasarimplementasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- b. Meningkatkan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam pembinaan ke Kabupaten/Kota agar menyiapkan aparat (personil sebagai PPNS) untuk membantu pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang serta untuk melakukan sosialisasi ketaatan terhadap rencana tata ruang kepada masyarakat.

3.3 Pencapaian Kinerja Lainnya

Selain pencapaian IKU Gubernur sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, pencapaian tujuan dan target pembangun yang lain juga menjadi penanda kemajuan dan keberhasilan dari program/kegiatan pembangunan daerah. Bagian berikut akan menguraikan capaian kinerja DIY untuk beberapa kinerja yang lain, khususnya MDGs dan IPM/IPG.

3.3.1 Pencapaian Target MDGs

Capaian MDGs di DIY menunjukkan hasil yang positif secara umum. Mayoritas indikator dari 7 tujuan pembangunan dan 57 indikator telah dicapai pada tahun 2013. Sebagian indikator bahkan sudah tercapai saat ini sebelum tahun 2015 yang menjadi tahun pencapaian tujuan MDGs. Beberapa indikator di bidang pendidikan telah menunjukkan pencapaian yang baik, seperti pencapaian angka melek huruf usia 15-25 tahun, ataupun rasio angka partisipasi murni baik perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan SD dan SLTP. Begitu juga dengan prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi serta gizi buruk, telah mencapai target.

Namun demikian, beberapa indikator memerlukan perhatian khusus dan kerja keras supaya bisa dicapai pada tahun 2015. Hal ini terjadi pada beberapa indikator seperti penurunan angka kemiskinan, indikator terkait kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS, serta indikator untuk penurunan emisi karbon dan kawasan lindung perairan. Beberapa indikator ini perlu menjadi perhatian dari program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Tabel 3.47 Target dan Realisasi Pencapaian MDGs di DIY Tahun 2013

No	Indikator	Capaian 2013	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN					
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015					
1.1	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	15.03	10,30%	▼	= garis kemiskinan
1.1a	Persentase penduduk				

No	Indikator	Capaian 2013	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional				
1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,4	2,50%	●	
1.4	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	1,42	2,20 %	▶	
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	66,59	Meningkat (Angka menurun, tapi targetnya ttp meningkat)	▶	BPS, Sakernas Agustus 2012
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	28,89	Menurun	▶	BPS, Sakernas Agustus 2012
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	8,55%	< 10%	●	
1.8a	Prevalensi balita gizi buruk	0,49%	< 1%	●	
1.8b	Prevalensi balita gizi kurang	8,06%	11,9%	●	
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:				
	- 1400 Kkal/kapita/hari	18,66	8,50%	▶	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
	- 2000 Kkal/kapita/hari	72,5	35,32%	▶	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA					
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar					
2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar	96.81	100	▶	BPS
2.2.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	94,08	100	▶	Disdikpora DIY
2.3	Angka melek huruf	99.70	100	▶	BPS, Susenas

No	Indikator	Capaian 2013	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki				Triwulan III Tahun 2012
TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015					
3.1	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi				
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di SD	-	100	►	BPS, Susenas BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP	-	100	►	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA	82,86	100	►	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di Perguruan Tinggi	112,61	100	►	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
3.1a	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	99,91	100%	►	
3.2	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	43,29	39,86	●	BPS, Sakernas Agustus 2012
3.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	DPRD DIY : 21,82 DPRD Kab/ Kota : 15,64	DPRD DIY : 30 DPRD Kab/ Kota : 30	►	KPUD dan BPPM DIY
TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK					
Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015					
4.1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	420 kasus kematian balita dari 40.138 kelahiran hidup	16	●	BPS, SDKI 2012 Profil kesehatan - DIY, 2010 - Data Program Seksi Kesga Dinkes DIY 2013

No	Indikator	Capaian 2013	Target MDGs 2015	Status	Sumber
4.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	377 kasus kematian bayi dari 40.138 kelahiran hidup	16	●	BPS, SDKI 2012 - SDKI, 2007 - Data Program di Seksi Kesga Dinkes DIY 2013
4.2a	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	293 kasus kematian neonatal dari 40.138 kelahiran hidup	16	●	BPS, SDKI 2012 - Data Program di Seksi Kesga Dinkes DIY 2013
4.3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	98,6%	100	▶	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012 - Riskesdas 2010) - Data Program di Seksi Imunisasi Dinkes DIY 2013
TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU					
Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015					
5.1	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	92,18 (37 kasus kematian ibu dari 40.138 kelahiran hidup)	100	▶	- Susenas 2005 - Data program di Seksi Kesga Dinkes DIY 2013 Laporan PWS KIA tahun 2013 Semester I dan Laporan Hasil Audit Maternal Perinatal Kab/Kota Tahun 2013 Semester I
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	99,92%	99%	▶	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012 Laporan PWS KIA tahun 2013 Semester I dan Laporan Hasil Audit Maternal Perinatal Kab/Kota
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi	80,22%	80%	●	SDKI, 2012 Laporan

LAKIP DIY Tahun 2013

No	Indikator	Capaian 2013	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	perempuan menikah usia 15-49, semua cara				BKKBN Info : dalam RAD digabung semua cara dan cara modern
5.3a	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun, cara modern	80,22%	80%	●	SDKI,2012 Laporan BKKBN
5.4	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	685 kasus (SDKI 2012 40 per 1000)	24 per 1000 (mempertahankan TFR 1,8)	▼	- SDKI, 2007 - Data program di Seksi Kesga Dinkes DIY 2013
5.5	Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan)				- Riskesdas, 2010 - Data program di Seksi Kesga Dinkes DIY 2013
	- 1 kunjungan:	100%	100%	●	
	- 4 kunjungan:	92,02%	95%	►	
5.6	Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)	7,67%	5%	▼	- BKKBN,2010 - SDKI 2012
Tujuan: MEMERANGI HIV dan AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA					
Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015					
6.1	Prevalensi HIV dan AIDS (persen) dari total populasi	0,07%	<0,5%	●	Dinkes Prov DIY, 2010,2013
6.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	189.925 buah	50% lakilaki; 50% perempuan		- Dinkes Prov DIY, 2011 - KPA, 2013 - (Data jumlah kondom yang didistribusi)
6.3	Proporsi jumlah	25,69%	80%	▼	- Riskesdas, 2010

No	Indikator	Capaian 2013	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS				- Dinkes DIY 2013 (Survey Pengetahuan Sederhana)
6.5	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	92%	90%	●	Sistem Informasi HIV dan AIDS Dinas Kesehatan DIY -Capaian belum mencapai target disebabkan banyak ODHA masih menolak untuk segera akses
Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015					
6.6	Angka kejadian dan tingkat kematian akibat Malaria				
6.6.a	Angka kejadian Malaria (per 1,000 penduduk):	0,02 0,038 (revisi 0,05)	0,0017 (revisi 0,05)	●	Dinkes DIY, 2011,2013
6.7	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	100%	100%	●	Dinkes DIY, 2010,2013
6.8	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100%	100%	●	Dinkes DIY, 2010,2013
6.9	Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis				
6.9a	Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100,000 penduduk/tahun)	79,74	83,5	●	Dinkes DIY, 2010,2013
6.9b	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)	36,96	44,8	●	Dinkes DIY, 2013
6.9c	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)	1,94	4	●	Dinkes DIY, 2013
6.10	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati				Dinkes DIY, 2013

No	Indikator	Capaian 2013	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	dalam program DOTS				
6.10 a	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	57,8%	70%	►	Dinkes DIY, 2013
6.10 b	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	84,92%	85%	►	Dinkes DIY, 2013
TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP					
Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang					
7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	40.25%	50	►	BLH DIY
7.2	Jumlah emisi karbon dioksida (CO ₂)	5.667.672	5.052.162	►	BLH DIY/Bappeda Ket : secara alami tetap naik namun kecepatan naik telah berkurang
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton	23.16	24,5 metrik ton CFCs	●	BLH DIY
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	1.46 %	24.26 2.36 %	►	Masih dlm batasan tangkap max yg diperbolehkan (dicari maxnya) Diskanla DIY
7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	18,80	17,80	●	Dishutbun
7.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	3.388,46 Ha	5 ha 0.011 ha	►	Diskanla DIY
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,	74,25% (Des 2013)	78,36	►	PUESDM

No	Indikator	Capaian 2013	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	perkotaan dan perdesaan				
7.8a	Perkotaan	71,82% (Des 2013)	81,01	►	PUESDM
7.8b	Perdesaan	79,49% (Des 2013)	81,01	►	PUESDM
7.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	86,28% (Des 2013)	88,46	►	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
7.9a	Perkotaan	93,41% (Des 2013)	96,81	►	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
7.9b	Perdesaan	82,67% (Des 2013)	68,09	●	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
7.10	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	3,76% (Juni 2013)	3,01	●	BPS, Susenas 2012

Status : ● Sudah Tercapai ► Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus

Permasalahan:

1. Koordinasi program-program bagi pengurangan kemiskinan yang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya, termasuk untuk perlindungan dan pemberdayaan orang miskin dan perbaikan pelayanan publik
2. Kesempatan kerja terutama kesempatan kerja formal masih perlu diperluas untuk meningkatkan kesejahteraan. Begitu juga upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak pekerja masih belum optimal, termasuk dalam upaya mempersempit kesenjangan upah antarpekerja pada tingkatan yang sama
3. Upaya penegakan hukum dan sosialisasi yang efektif terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan, termasuk kaitannya dengan pencemaran udara dan
4. Persoalan kesehatan reproduksi khususnya kesehatan reproduksi remaja dan HIV/AIDS perlu menjadi perhatian semua pihak. Persoalan kesehatan reproduksi remaja dan HIV/AIDS merupakan isu yang bukan hanya terkait dengan aspek kesehatan medis saja, namun juga berbagai faktor sosial yang lain.

Solusi:

1. Memperbaiki lingkungan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin. Juga dukungan pendanaan untuk memperbaiki infrastruktur yang akan mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat
2. Perlunya kebijakan prioritas pendidikan dan pelayanan kesehatan serta perlindungan sosial bagi warga miskin, dan mendorong inklusi sosial bagi warga miskin dan kelompok marjinal dalam pembangunan dan kehidupan sosial.
3. Persoalan kespro remaja menjadi tantangan untuk mengedukasi publik bahwa remaja berhak mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi secara memadai. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalkan akses yang tidak aman dan bisa berujung pada persoalan kehamilan yang tidak dikehendaki atau bentuk lain kekerasan berbasis gender.
4. Edukasi tentang HIV/AIDS, yang penting memasukkan aspek pencegahan serta rehabilitasi medik maupun sosial untuk mengurangi pengucilan bagi para penderitanya.
5. Peningkatan angkutan publik dan sarana jalan yang aman dan nyaman, untuk pengurangan polusi udara. Juga perlu edukasi publik dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan
6. Koordinasi dan sinergi dengan upaya-upaya pencapaian target MDGs yang dilakukan oleh pihak non pemerintah.

3.3.2 Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Jender

3.3.2.1 Indek Pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka harapan hidup DIY cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik.

Tabel 3.48 IPM DIY Menurut Komponen, Tahun 2009-2012

Tahun	Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-Rata lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil per kapita (ribu rupiah)	IPM
2009	73,16	90,18	8,78	644,67	75,23
2010	73,22	90,84	9,07	646,56	75,77
2011	73,27	91,49	9,20	650,16	76,32
2012	73,27	92,02	9,21	653,78	76,75

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2009-2012

Angka IPM DIY selama kurun waktu 2009 hingga 2012 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2012, IPM DIY tercatat sebesar 76,75 naik dari angka IPM tahun 2011 yang sebesar 76,32. Nilai IPM DIY tahun 2012 menduduki peringkat 4 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tingginya nilai IPM DIY ini didukung oleh tingginya angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah serta relatif rendahnya pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

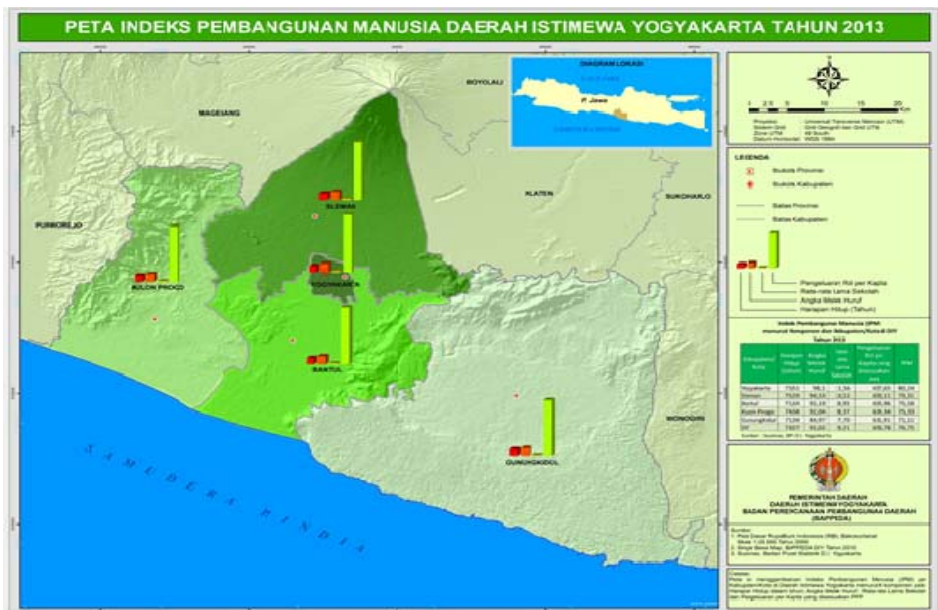
Di lihat dari sebaran wilayahnya, data *time series* yang ada mengkonfirmasi Kota Yogyakarta yang memiliki IPM tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di DIY, yang kemudian diikuti dengan Sleman.

Tabel 3.49 IPM Antar Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2008-2011

Kabupaten/Kota	IPM				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kulon Progo	73,26	73,77	74,49	75,04	75,33
Bantul	73,38	73,75	74,53	75,05	75,58
Gunungkidul	70,00	70,18	70,45	70,84	71,11
Sleman	77,24	77,70	78,20	78,79	79,31
Kota Yogyakarta	78,95	79,29	79,52	79,89	80,24
DIY	74,88	75,23	75,77	76,32	76,75

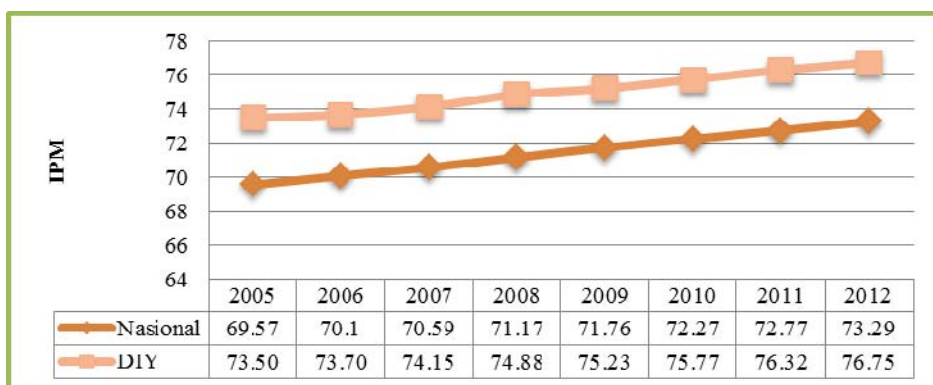
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2008-2012

Dibawah ini adalah peta IPM masing-masing Kabupaten/Kota di DIY, pada tahun 2012.



Sumber : BAPPEDA DIY 2013

Gambar 3.48 Peta Indeks Pembangunan Manusia DIY Tahun 2013



Gambar 3.49 Grafik IPM DIY Tahun 2005-2012

IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY tahun 2012 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat ke-1 dengan angka 80,24. Kabupaten dengan angka IPM yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Sleman dengan angka 79,31. Sementara itu, tiga kabupaten lain dengan angka IPM yang relatif masih rendah adalah Kabupaten Bantul (75,58), Kulon Progo (75,33) dan Kabupaten Gunungkidul (71,11).

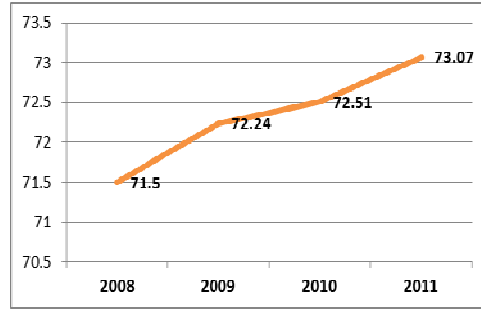
Tabel 3.50 Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Riil Per Kapita, IPM, dan Peringkat IPM di DIY Tahun 2012

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan (000 Rp)	IPM	Peringkat IPM
Yogyakarta	73,51	98,10	11,56	657,65	80,24	1
Sleman	75,29	94,53	10,52	653,11	79,31	2
Bantul	71,34	92,19	8,95	654,96	75,58	3
Kulon Progo	74,58	92,04	8,37	634,34	75,33	4
Gunungkidul	71,04	84,97	7,70	631,91	71,11	5
DIY	73,27	92,02	9,21	653,78	76,75	4

3.3.2.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama dengan IPM, dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan.

Capaian IPG dari tahun ke tahun di DIY telah mengalami peningkatan. Tahun 2011, capaian IPG DIY sebesar 73,07. Berdasarkan sebaran kabupaten/kota di DIY capaian IPG tahun 2011 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 77,92 dan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Tabel berikut menunjukkan pergerakan dari tahun ke tahun di semua kabupaten/kota. Kesenjangan antar wilayah juga menjadi isu yang muncul dari data IPG tahunan ini.



Sumber : BPS, Kementerian PP dan PA

Gambar 3.50 Pemukiman Padat di Sekitar Sungai Code

Tabel 3.51 Capaian IPG Menurut Kabupaten/Kota DIY, Tahun 2008-2011

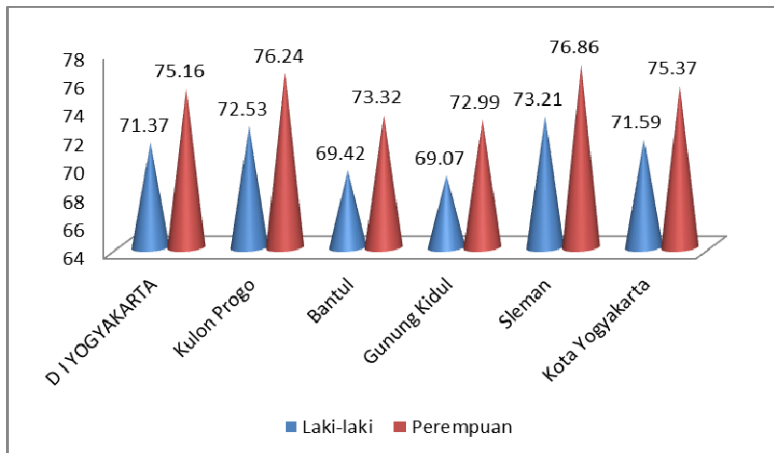
Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011
DIY	71,50	72,24	72,51	73,07
Kota Yogyakarta	77,05	77,10	77,56	77,92
Kab. Bantul	71,20	71,20	71,33	71,71
Kab. Kulon Progo	66,13	66,56	67,04	67,85
Kab. Gunungkidul	64,69	64,77	65,42	66,04
Kab. Sleman	73,73	73,94	74,17	74,75

Sumber : BPS, Kementerian PP & PA

Apabila di rinci per komponen dan per wilayah, data nya adalah sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup.

Dari kelima kabupaten/kota, polanya adalah sama. Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kecenderungan ini juga menjadi pola yang terjadi di tingkat nasional maupun global.

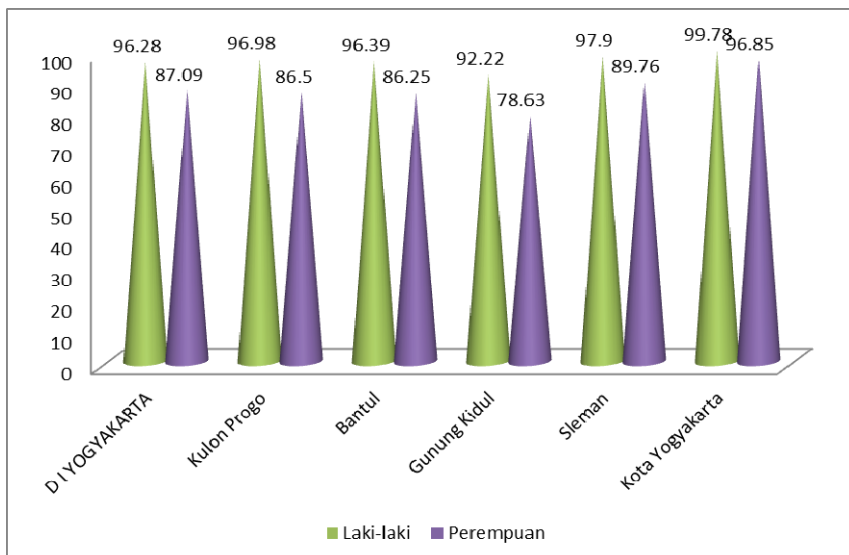


Sumber : BPS, Kementerian PP & PA

Gambar 3.51 Angka Harapan Hidup Per Jenis Kelamin dan Wilayah

2. Angka Melek Huruf.

Berbeda dengan usia harapan hidup, angka melek huruf perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini terjadi di semua kabupaten/kota di DIY.

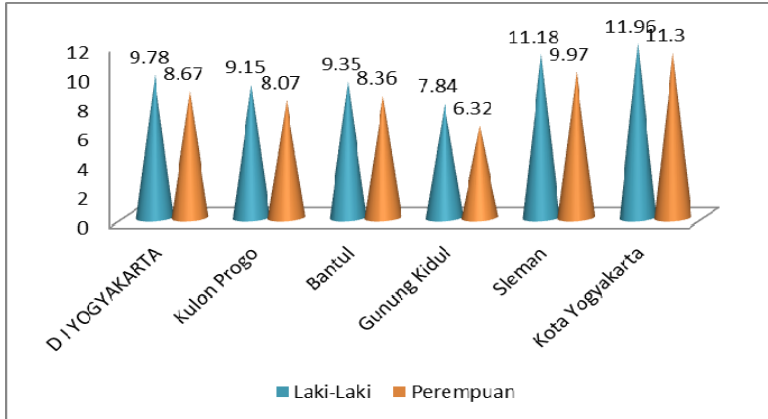


Sumber : BPS, Kementerian PP & PA

Gambar 3.52 Angka Melek Huruf Per Jenis Kelamin dan Wilayah

3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah juga memiliki pola yang sama dengan angka melek huruf. Akses perempuan yang lebih rendah ditunjukkan dengan angka rata-rata lama sekolah perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki, yang terjadi di semua kabupaten/kota.

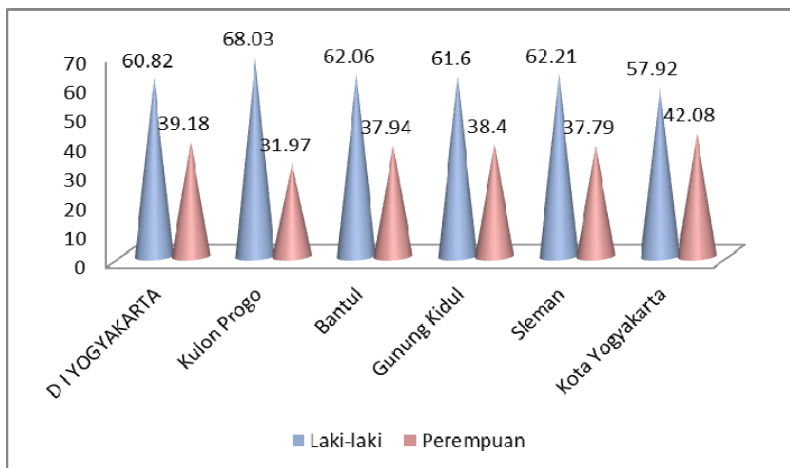


Sumber : BPS, Kementerian PP & PA

Gambar 3.53 Rata-rata Lama Sekolah per Wilayah dan Jenis Kelamin

4. Pendapatan

Kesenjangan gender juga terlihat dari aspek sumbangan pendapatan. Gambar berikut menunjukkan pola yang seragam di semua wilayah, dimana kontribusi laki-laki dalam pendapatan masih dominan. Namun demikian, kesenjangan ini bervariasi. Kota Yogyakarta adalah wilayah dengan kesenjangan terendah, dimana laki-laki menyumbang 57.92% sementara perempuan menyumbang 42.08%. Di DIY, laki-laki menyumbang 60.82% sementara perempuan berkontribusi terhadap 39.18% pendapatan keluarga.



Sumber : BPS, Kementerian PP & PA

Gambar 3.54 Sumbangan Pendapatan Per Jenis Kelamin dan Wilayah

Permasalahan:

1. Kesenjangan berbasis gender menjadi salah satu tantangan yang harus dijadikan fokus bagi agenda pembangunan di berbagai bidang. Hal ini karena tanpa upaya serius untuk menjawab persoalan ini, pencapaian tujuan dan target pembangunan bisa jadi akan terganggu atau menjadi lebih lambat karena ada kelompok yang lebih tidak punya akses dan manfaat terhadap pembangunan
2. Isu-isu gender juga tidak cukup hanya menjadi perhatian pemerintah saja, karena kontribusi dari berbagai pihak juga sangat penting

Solusi:

1. Pemerintah perlu membangun sinergi yang kontinu dan efektif dengan berbagai pihak non negara untuk memastikan upaya-upaya pengurangan kesenjangan gender dalam pembangunan.
2. Pengembangan strategi-strategi yang tepat untuk menjawab persoalan gender dengan mengembangkan model dan mendokumentasikan best practices upaya-upaya mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang

3.3.2.3 Penanggulangan Bencana

Urgensi persoalan bencana bisa dilihat dari frekuensi maupun dampak kejadian bencana yang terjadi di wilayah DIY dalam delapan tahun terakhir. Pada 27 Mei 2006, terjadi gempa bumi yang selain menimbulkan korban 4554 jiwa di DIY. Gempa ini juga mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang tak bernilai karena sekitar 15.000 bangunan termasuk rumah mengalami rusak berat. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Begitu juga erupsi merapi pada akhir 2010 menimbulkan skala kerusakan dan kerugian yang masif selain jatuhnya 275 korban jiwa, hingga sekitar 400.000 pengungsi pada saat terjadinya erupsi terbesar dalam 130 tahun sejarah Merapi ini. Secara lebih jelasnya dampak dari erupsi Gunung Merapi pada Tahun 2010 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Kerawanan bencana bagi masyarakat di DIY juga bukan hanya terbatas pada gempa dan erupsi saja. Pada tahun 2013 saja, kejadian bencana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.52 Frekuensi Kejadian Bencana di DIY Tahun 2012-2013

Jenis Bencana	Bantul		Gkidul		Kprogo		Sleman		Kota Yk	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Banjir	40	2	17	0	0	0	8	6	2	7
Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanah Longsor	14	12	84	18	216	1	8	3	0	1
Kebakaran Hutan/Lahan	1	8	16	0	6	3	8	2	2	5
Gempa Bumi	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0
Angin Kencang	127	89	133	34	25	3	84	56	2	4
Epidemi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gunung Meletus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Aspek pentingnya adalah bukan hanya penanganan kedaruratan, namun juga pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan. Pemerintah DIY sudah mengantisipasi timbulnya bencana sesuai dengan sistem manajemen bencana melalui pengembangan regulasi yang memadai, perencanaan dan penganggaran, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang dulu berpola responsif-tanggap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Di tingkat masyarakat, upaya membangun kesiapsiagaan juga dilakukan dengan mengembangkan desa tangguh dan sekolah siaga bencana. Hal ini menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan dukungan yang memadai baik untuk mengantisipasi kejadian bencana atau memulihkan kehidupan apabila terjadi bencana. Datanya menunjukkan peningkatan jumlah desa tangguh dan sekolah siaga bencana dari tahun 2012 ke tahun 2013.

Tabel 3.53 Jumlah Desa Tangguh dan Sekolah Siaga Bencana

Aspek	2012	2013
Persentase desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	94 desa	104 desa
Sekolah siaga bencana (SSB)	6 SSB	9 SSB

Permasalahan:

1. Karakter ancaman bencana tidak terbatas pada wilayah administratif tertentu. Pengalaman penanganan gempa dan erupsi Merapi menunjukkan keterkaitan dengan wilayah dari propinsi lain baik dalam upaya pencegahan maupun penanganan dan pemulihan pasca bencana.
2. Inisiatif masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana sudah banyak dilakukan, salah satunya sebagai bentuk pembelajaran dari pengalaman dampak bencana sebelumnya. Namun upaya-upaya ini perlu dikuatkan dengan dukungan kebijakan, dan sinergi dengan program pembangunan yang lain untuk mendorong integrasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan

Solusi:

1. Kerja sama lintas wilayah terutama dengan menggunakan pendekatan kawasan yang memiliki ancaman yang sama untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan serta pemulihan pasca bencana
2. Perluasan dan pelembagaan partisipasi masyarakat di berbagai level dalam upaya-upaya penanggulangan bencana, termasuk mengkoordinasikan dan membangun sinergi dengan aktor yang lain seperti dunia usaha, perguruan tinggi ataupun media massa

3.4 Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2013 sebesar 77,07% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 79,01%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 74,29%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan (95,23%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat (41,60%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2013 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.54 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2013

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target Kinerja	Capaian	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	30%	63,46%	212	2,751,045,660	2,531,073,610	92.00
2	Melek huruf masyarakat meningkat.	91,99	92,02*	100,03	14,001,932,546	11,034,873,031	78.81
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	9,6	9,21	95,94	91,817,375,685	63,185,275,035	68.81
4	Harapan hidup masyarakat meningkat.	73,37	74	100,9	102,050,956,258	49,520,838,449	48.53
5	Pendapatan masyarakat meningkat.	7	6,94	99,14	47,307,672,297	40,944,784,131	86.55
6	Ketimpangan Antar Wilayah menurun.	0,453	0,4547	99,62	159,661,741,418	149,047,866,596	93.35
7	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	0,298	0,3187	93,05	15,593,831,420	13,951,317,958	89.47
8	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	2.113.314	2.602.074	123,13	59,009,655,938	24,545,428,155	41.60
		212.518	235.888	111,50			
9	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	2	1,59	79,50	13,785,073,150	9,384,861,270	68.08
		2,15	1,90	88,37			

LAKIP DIY Tahun 2013

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target Kinerja	Capaian	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
10	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.	B	B	100	94,031,725,373	77,073,736,705	81.97
11	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	WTP	WTP	100	14,784,647,305	13,159,834,901	89.01
12	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	34,57%	34,49%	99,77	163,743,003,418	155,926,880,065	95.23
13	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	3,14%	3,14%	100	32,234,718,792	29,606,948,725	91.85
14	Pemanfaatan Ruang terkendali.	50%	63,25%	127,86	6,778,477,300	6,052,860,400	89.30
Jumlah					817,551,856,560.00	645,966,579,031.00	79.01
Belanja Langsung Pendukung					569,706,411,928.00	423,214,499,220.57	74.29
Total Belanja langsung					1,387,258,268,488.00	1,069,181,078,251.57	77.07

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

*Kesimpulan dari Hasil
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP) Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2013*

LAKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga

keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LAKIP bagi Pemda DIY juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi pemda DIY, dalam masa-masa awal implementasi keistimewaan DIY pasca keluarnya UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam kaitannya dengan kedudukan Pemda DIY sebagai provinsi, LAKIP juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom maupun sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2013), namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemda DIY pada tahun 2013 adalah sangat baik, karena 15 indikator memenuhi kriteria sangat baik dan 2 indikator memenuhi kriteria tinggi. Dalam IKU tahun 2013, terdapat 1 indikator yang belum dicanangkan target kinerjanya.

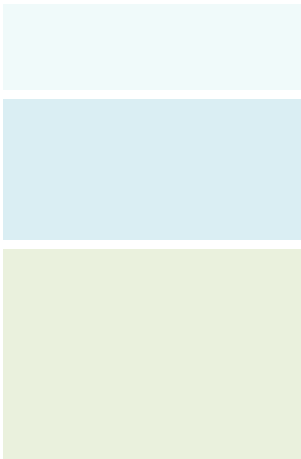
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemda DIY untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah

mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2013, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk perencanaan yang dikenal sebagai Jogja Plan adalah bagian dari membuat perencanaan sebagai bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/ kegiatan yang berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link webmonev untuk pelaporan kinerja triwulanan yang bisa diakses publik adalah bagian dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas publik sebagai satu paket kebijakan daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemda DIY ke depan. *Pertama*, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan penurunan ketimpangan (baik antar wilayah maupun pendapatan), kualitas lingkungan dan penegakan tata ruang, hingga mendorong peningkatan lama tinggal wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Peran Pemda DIY diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemda DIY dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY, daerah yang berbatasan dengan DIY maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti peningkatan pendapatan, pengurangan ketimpangan dan peningkatan jumlah dan lama tinggal wisatawan menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemda DIY sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemda DIY untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LAKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



Lampiran

Lampiran Berisi :

Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Pemda DIY selama kurun waktu Tahun 2013

Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah DIY selama tahun 2013:

- Penghargaan atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dengan predikat nilai “B” dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- Penghargaan Capaian Target PUS Terbaik Pertama Tahun 2013 untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Penghargaan Peringkat II Pemerintah Daerah Peduli Konsumen Tahun 2013 dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
- Penghargaan Terbaik II Anugerah Pangripta Nusantara Utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2013 Tingkat Provinsi Kelompok A dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Penghargaan Terbaik Indikator Utama perencanaan Tenaga Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik Indonesia;
- Penghargaan sebagai Penyaji Terbaik antar Wilayah Jawa dan Bali Parama Natya Budaya “Jawa dan Bali Dwipa” Parade Tari Nusantara Taman Mini “Indonesia Indah” 2013 dari Direktur Utama Taman Mini “Indonesia Indah”;
- Penghargaan sebagai Penyaji Unggulan parade Tari Nusantara Taman Mini “Indonesia Indah” 2013 dari Direktur Utama Taman Mini “Indonesia Indah”;

- Penghargaan Efisiensi Energi Nasional 2013 sebagai Pemenang III Kategori Penghematan Energi dan Air pada Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Penghargaan Khusus Kategori Provinsi, Sub Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Penghargaan Pekerjaan Umum Tahun 2013 dari Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
- Penghargaan Terbaik III Kategori Provinsi, Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Penghargaan Pekerjaan Umum Tahun 2013 dari Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
- Penghargaan Terbaik I Kategori Provinsi, Sub Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi Penghargaan Pekerjaan Umum Tahun 2013 dari Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
- Penghargaan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah juara harapan II dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
- Penghargaan Juara Utama tingkat Nasional (APE/Anugrah Parahita Ekapraya) untuk Pengelolaan Terbaik Program-Program Pemberdayaan Perempuan.